



Direktorat Jenderal
Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING



DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku “Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting” ini. Buku ini disusun sebagai panduan strategis dan operasional bagi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan program dan kegiatan lintas sektor untuk percepatan penanganan stunting di Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui, stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga persoalan pembangunan manusia yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam upaya mendukung target nasional untuk menurunkan prevalensi stunting, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial. Pendekatan konvergensi yang mencakup kolaborasi multisektor serta berbasis data dan bukti menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas intervensi.

Melalui buku ini, diharapkan pemerintah daerah mampu melaksanakan aksi konvergensi secara terarah, terukur, dan berbasis bukti untuk mencapai target percepatan penurunan stunting.

Kami menyadari bahwa keberhasilan dalam mengimplementasikan aksi konvergensi ini memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan buku ini sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi aksi konvergensi di tingkat daerah.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2024

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri



Reshardy Daud



Direktorat Jenderal
Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
GEDUNG A

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR ISTILAH.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	13
C. Tujuan.....	14
D. Hasil Yang Diharapkan	15
E. Prinsip	17
F. Ruang Lingkup	18
G. Tahapan	21
BAB II AKSI KONVERGENSI KECAMATAN.....	24
A. Pengantar.....	24
B. Tahapan Aksi Konvergensi Kecamatan.....	24
1. Analisis Situasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.....	26
2. Penandaan Program/Kegiatan APBD Kab/Kota Tahun berjalan di kecamatan.....	31
3. Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang) Kecamatan tematik stunting	33
4. Penandaan Perencanaan Kecamatan Tahun Depan.....	35
5. Identifikasi capaian layanan dan realisasi kegiatan APBDes, Swadaya dan Swasta Semester 1	37
6. Penandaan Pelaksanaan Kecamatan pasca Perubahan APBD	39
7. Penilaian hasil Monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting kecamatan	41
C. Aksi pendukung:.....	45
1. Dukungan regulasi.....	45
2. Publikasi	45
BAB III AKSI KONVERGENSI KABUPATEN/KOTA	46
A. Pengantar.....	46
B. Tahapan Aksi Konvergensi Kabupaten/Kota	47
1. Analisis Situasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota	48
2. Pelaksanaan Penandaan APBD Kabupaten/kota Tahun berjalan	52
3. Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota (Pra-Musrenbang Kab/Kota) tematik stunting.....	54
4. Penandaan Perencanaan Kabupaten/Kota Tahun depan	57

5. Pelaksanaan Penandaan APBD Kabupaten/Kota pasca Perubahan	59
6. Penilaian hasil Monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota	61
C. Aksi pendukung:.....	63
1. Dukungan regulasi.....	63
2. Publikasi	64
BAB IV AKSI KONVERGENSI PROVINSI	65
A. Pengantar.....	65
B. Tahapan Aksi Konvergensi Provinsi.....	66
1. Analisis Situasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting provinsi	67
2. Penandaan Pelaksanaan APBD Provinsi Tahun berjalan.....	71
3. Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Pra-Musrenbang Provinsi) tematik stunting.....	73
4. Penandaan Perencanaan Provinsi Tahun depan	76
5. Penandaan Pelaksanaan Provinsi pasca Perubahan APBD	78
6. Penilaian hasil Monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi.....	80
C. Aksi pendukung:.....	82
1. Dukungan regulasi.....	82
2. Publikasi	82
BAB V PENUTUP.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Rancangan Pilar Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 2025-2029	12
Gambar 2 Usulan perubahan siklus pelaksanaan aksi konvergensi	13
Gambar 3 Siklus Pelaksanaan Aksi Konvergensi	22
Gambar 2 Siklus Aksi Konvergensi Kecamatan	24
Gambar 3 Alur Pelaksanaan Analisis Situasi Kecamatan	26
Gambar 4 Alur Penandaan Program/Kegiatan APBD Tahun Berjalan di Kecamatan	31
Gambar 5 Alur Pramusrenbang Kecamatan	34
Gambar 6 Alur Penandaan Rencana APBD Kab/Kota Di Kecamatan (Satu Tahun Depan)	36
Gambar 7 Alur Pencatatan Capaian Layanan Kecamatan Semester I.....	38
Gambar 8 Alur Penandaan Apbd Kab/Kota Di Kecamatan Pasca APBD Perubahan.....	39
Gambar 9 Alur Pencatatan Capaian Layanan Kecamatan Semester II	41
Gambar 10 Alur pelaksanaan Penilaian Hasil Monitoring dan Evaluasi Kecamatan	42
Gambar 11 Siklus Aksi Konvergensi Kabupaten/Kota	46
Gambar 12 Alur pelaksanaan analisis situasi Kabupaten/Kota	48
Gambar 13 Alur pelaksanaan penandaan APBD Kabupaten/Kota tahun berjalan.....	53
Gambar 14 Alur pelaksanaan Pramusrenbang Kabupaten/Kota	55
Gambar 15 Alur pelaksanaan penandaan perencanaan Kabupaten/Kota tahun depan	58
Gambar 16 Alur pelaksanaan penandaan APBD Kabupaten/Kota pasca perubahan	60
Gambar 17 Alur Penilaian hasil Monitoring dan Evaluasi Kabupaten/Kota	62
Gambar 18 Siklus Aksi Konvergensi Provinsi	65
Gambar 19 Alur pelaksanaan Analisis Situasi Provinsi	67
Gambar 20 Alur pelaksanaan Penandaan APBD tahun berjalan	72
Gambar 21 Alur pelaksanaan Analisis Situasi Provinsi	74
Gambar 22 Alur pelaksanaan penandaan perencanaan provinsi tahun depan	77
Gambar 23 Alur pelaksanaan penandaan APBD Provinsi pasca perubahan	78
Gambar 24 Alur pelaksanaan Penilaian hasil Monitoring dan Evaluasi Provinsi	80

DAFTAR TABEL

Table 1 Data Sasaran dan penanggungjawab data	26
Table 2 Indikator Layanan	27
Table 3 Data Pendukung Layanan	29

DAFTAR ISTILAH

1.	Aksi Konvergensi	Aksi konvergensi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan intervensi gizi dalam penurunan <i>Stunting</i> melalui aksi konvergensi penurunan <i>Stunting</i>
2.	Aksi Pendukung	Terdiri dari 2 aksi yaitu regulasi yang mendukung Upaya percepatan, pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> serta publikasi kegiatan aksi konvergensi Tingkat kabupaten dan kota
3.	Aksi Utama	Terdiri dari 4 aksi yaitu analisis situasi, penguatan perencanaan, penguatan pelaksanaan dan penilaian hasil monitoring dan evaluasi
4.	APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5.	APBDes	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6.	Approver	Orang yang bertugas untuk memberikan persetujuan data hasil verifikasi pada web aksi bangsa.
7.	Evaluasi	Rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>
8.	https://konvergensi.bangda.kemendagri.go.id/	Laman resmi web aksi bangsa yang diperuntukan untuk pelaporan pelaksanaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
9.	Indikator	Variabel-variabel yang dapat menunjukkan ataupun mengindikasikan kepada penggunanya tentang kondisi tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi
10.	Kelompok Sasaran	Terdiri dari ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, anak usia 0-23 bulan, anak usia 24-59 bulan, remaja, calon pengantin, rumah tangga dan masyarakat

11.	Konvergensi	pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah Stunting kepada semua kelompok Sasaran
12.	MMS	Multiple Micronutrients Supplementation
13.	MPASI	Makanan Pendamping Air Susu Ibu
14.	OPD Pengampu	OPD (organisasi pemerintah daerah) pengampu pada Tingkat kabupaten dan kota terdiri dari Dinas Kesehatan, dinas social, dinas mengurus urusan keluarga berencana serta dinas yang mengurus urusan air minum dan sanitasi
15.	Operator	Orang ditunjuk sebagai penghimpun dan penginput data untuk kebutuhan pelaksanaan aksi konvergensi pada web aksi bangda
16.	Pemangku Kepentingan	Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan penurunan <i>Stunting</i>
17.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
18.	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan
19.	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah daerah provinsi yang terdiri atas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.

20.	Pemerintah Desa	Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
21.	Pemetaan	Suatu proses penyajian informasi yang merupakan hasil identifikasi dan analisa terhadap satu kondisi atau lembaga baik berupa kekuatan maupun kelemahan yang digunakan untuk perbaikan pada masa mendatang
22.	Penandaan/Tagging	proses mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mencatat alokasi anggaran berdasarkan tujuan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat dengan jelas ditelusuri dan dilaporkan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.
23.	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	setiap upaya yang mencakup paket layanan intervensi lengkap bagi kelompok sasaran yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat dan daerah.
24.	Perangkat Daerah	Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
25.	RKP	Rencana Kerja Pemerintah
26.	RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
27.	RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
28.	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
29.	RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
30.	Sasaran	kelompok masyarakat yang perlu dipastikan untuk mendapatkan paket layanan intervensi lengkap dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

31.	Sasaran Prioritas	Sasaran Prioritas terdiri dari Remaja Putri, Calon pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi usia 0-23 bulan, dan Anak usia 24-59 Bulan
32.	SIPD	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
33.	<i>Stunting</i>	Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
34.	Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TP3S)	Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang berfungsi mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pencegahan dan percepatan penurunan <i>Stunting</i> secara efektif konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah
35.	Verifikator	Orang ditunjuk melakukan verifikasi atas data yang dihimpun dan diinput oleh operator menggunakan tools pada web aksi bangda

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah stunting di Indonesia masih menjadi tantangan serius yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang cukup lama. Kondisi ini tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berdampak pada perkembangan otak dan potensi anak di masa depan.

Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan stunting menjadi sebesar 14,4% pada tahun 2029 dan mencapai 5% pada tahun 2045 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Pencapaian Pemerintah sebelumnya yang berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 9,3% dalam 5 tahun dari 30,8% tahun 2018 menjadi 21,5% pada tahun 2023 patut diapresiasi. Pengalaman pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting tahun 2018 – 2024 telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi perbaikan pelaksanaan program kedepannya. Pemerintah akan melanjutkan dengan mempertahankan yang sudah berjalan baik dan memperbaiki yang belum berjalan dengan baik.

a. 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan penurunan stunting

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengamanatkan peran dan tugas Kemendagri adalah memastikan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting dilakukan secara konvergen. Untuk itu Kemendagri membuat desain 8 (delapan) aksi konvergensi sebagai instrumen bagi daerah dalam pelaksanaan upaya intervensi penurunan stunting terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah dan konvergen dengan melibatkan berbagai sumber daya yang ada.

Pendekatan intervensi dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama sehingga institusi penanggung jawab Aksi konvergensi harus melibatkan lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan melalui aksi konvergensi. Aksi Konvergensi ini dilaksanakan melalui 8 (delapan) aksi, yaitu:

1. Analisis Situasi Program Penurunan Stunting

2. Penyusunan Rencana Kegiatan
3. Rembuk Stunting
4. Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa
5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia
6. Sistem Manajemen Data Stunting
7. Pengukuran dan Publikasi Data Stunting
8. Reviu Kinerja Tahunan

Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi konvergensi harus disesuaikan dengan jadwal reguler perencanaan dan penganggaran di masing-masing daerah. Hal tersebut dilaksanakan untuk memastikan intervensi penurunan stunting dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan aksi konvergensi menggunakan indikator kinerja daerah dalam pelaksanaan intervensi percepatan penurunan stunting sebanyak 64 (enam puluh empat) indikator yang terdiri dari :

- a. 29 (dua puluh sembilan) indikator cakupan layanan esensial

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	URUSAN
1	Remaja	Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	58	Persentase remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah terhadap seluruh remaja putri	Kesehatan
2		Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	90	Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) terhadap seluruh remaja putri	Kesehatan
3	Calon Pengantin/ Pasangan Usia Subur (PUS)	Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	90	Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD) terhadap seluruh calon PUS	Kesehatan Kemenag Capil
4		Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	90	Persentase Calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah terhadap seluruh Calon Pasangan Usia Subur	Kesehatan Kemenag Capil
5		Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	90	Persentase Calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra nikah terhadap seluruh calon PUS	Kesehatan Dalduk KB
6		Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan	90	Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan	Kesehatan Dalduk KB Kemenag Capil

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	URUSAN
		perkawinan dengan materi pencegahan stunting		stunting terhadap seluruh calon pengantin	
7		Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	90	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat terhadap jumlah PUS dengan status miskin	Sosial
8		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai	90	Persentase PUS miskin dan penyandang masalah sosial yang menerima BPNT terhadap jumlah PUS miskin dan penyandang masalah sosial	Sosial
9		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	90	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan terhadap PUS dengan status miskin	Sosial
10		Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	90	Persentase Ibu Hamil KEK (yang memiliki lingkaran lengan atas kurang dari 23,5 cm) yang mendapatkan tambahan asupan gizi terhadap seluruh Ibu Hamil KEK	Kesehatan
11	Ibu Hamil	Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	80	Persentase Ibu hamil mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan dibandingkan terhadap seluruh Ibu Hamil.	Kesehatan
12		Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	7,4	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB (Statistik Rutin) terhadap seluruh PUS sasaran KB	Daldu KB

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	URUSAN
13		Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	15,5	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan terhadap seluruh kehamilan yang terjadi	Dalduk KB
14	Anak Usia Di Bawah Lima Tahun (Balita)	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	80	Persentase bayi usia di bawah 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif terhadap seluruh bayi dibawah 6 bulan	Kesehatan
15		Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	80	Persentase Anak usia 6-23 bulan mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dibandingkan dengan Seluruh anak usia 6-23 bulan	Kesehatan
16		Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	90	Persentase layanan tata laksana gizi buruk terhadap seluruh anak balita gizi buruk dalam kurun waktu yang sama	Kesehatan
17		Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	90	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya terhadap seluruh balita	Kesehatan
18		Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	90	Persentase layanan tambahan asupan gizi balita terhadap seluruh anak balita dalam kurun waktu yang sama	Kesehatan
19		Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	90	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) terhadap seluruh balita	Kesehatan
20	Keluarga Berisiko Stunting	Keluarga yang Stop BABS	90	Persentase keluarga stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defacation Free</i> (ODF) terhadap seluruh keluarga	Kesehatan
21		Keluarga yang melaksanakan PHBS	70	Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terhadap seluruh keluarga	Kesehatan
22		Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	90	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri terhadap keluarga berisiko stunting	Kesehatan Dalduk KB Perikanan

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	URUSAN
23		Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	70	Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan terhadap seluruh Persalinan	Dalduk KB
24		Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	90	Persentase keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan terhadap seluruh Keluarga Berisiko Stunting	Dalduk KB
25		Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	50	Persentase keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi terhadap keluarga berisiko stunting	Pertanian Pangan Dalduk KB
26	Air Minum dan Sanitasi	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	100	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak terhadap seluruh rumah tangga	Perkim
27		Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	90	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) yang layak di terhadap seluruh rumah tangga	Perkim
28	Perlindungan Sosial	Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	90	Persentase Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi terhadap keluarga penerima PKH	Sosial
29		Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur	90	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI) terhadap keluarga penerima manfaat	Sosial

b. 35 (tiga puluh lima) indikator layanan supply

NO	INDIKATOR	TARGET	TAHUN	DEFINISI OPERASIONAL	URUSAN
1	Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	Min 1 kali	Tiap Tahun	Pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	Setda Bappeda TPPS
2	Terselenggaranya rembuk stunting tingkat kecamatan	Min. 2 kali	Tiap Tahun	Pelaksanaan rembuk stunting di tingkat kecamatan	Dalduk KB Kecamatan
3	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten/kota	2 kali	Tiap tahun	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten/kota	Setda Bappeda TPPS
4	Cakupan Bantuan Jaminan Nasional Penerima Iuran (PBI) Kesehatan	112,9 Juta Jiwa	2024	Jumlah jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan Nasional	Kesehatan
5	Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting	100% Kab/Kota	2022	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki regulasi tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting	Setda PMD
6	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting	100% desa/kelurahan	2022	Cakupan pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting	PMD
7	Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusia yang mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90% Kader	2024	Cakupan Kader pembangunan manusia yang mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Setda PMD
8	Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja	100% desa/kelurahan	2022	Cakupan desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)	Setda PMD

NO	INDIKATOR	TARGET	TAHUN	DEFINISI OPERASIONAL	URUSAN
	pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)				
9	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	90% desa/kelurahan	2024	Cakupan desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	Setda PMD
10	Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting	80% desa/kelurahan	2024	Cakupan desa/kelurahan yang melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi bagi sasaran keluarga berisiko stunting	Setda PMD
11	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa	2 kali	Tiap tahun	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting oleh pemerintahan desa	PMD
12	Jumlah desa/kelurahan Bebas Stunting	100%	2024	Cakupan desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus baru stunting balita dalam 1 (satu) tahun pemantauan data hasil bulan timbang	PMD Kesehatan
13	Persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi penurunan stunting	90%	2024	Cakupan pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi penurunan stunting melalui hasil penilaian laporan konvergensi desa	PMD
14	Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan stunting lintas agama	2 kali	Tiap Tahun	Pelaksanaan forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan stunting lintas agama	Kemenag
15	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100% desa/kelurahan	2024	Cakupan Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kesehatan
16	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah terbebas dari	90%	2024	Cakupan Desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF)	Kesehatan

NO	INDIKATOR	TARGET	TAHUN	DEFINISI OPERASIONAL	URUSAN
	buang air besar sembarangan (ODF)				
17	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas	70%	2024	Cakupan sasaran yang telah memperoleh layanan Komunikasi Antar Personal (KAP) terhadap jumlah sasaran layanan dari KAP	Kesehatan
18	Publikasi data stunting tingkat kabupaten/kota	1 kali	Tiap Tahun	Pelaksanaan laporan publikasi data stunting hasil bulan timbang	Kesehatan
19	Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	100% kab/kota	2023	Cakupan kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	Kesehatan
20	Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	90%	2024	Cakupan penguatan kapasitas posyandu dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting	Kesehatan
21	Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) stunting	50%	2024	Cakupan audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) stunting	Kesehatan
22	Tersedianya bidan desa/ kelurahan sesuai kebutuhan	100% desa/ kelurahan	2024	Cakupan bidan desa/kelurahan yang ada di setiap desa/kelurahan	Kesehatan
23	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	75%	2024	Cakupan tindaklanjut hasil pengawasan produk pangan fortifikasi oleh pelaku usaha terhadap keseluruhan rekomendasi hasil pengawasan	Kesehatan
24	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting	2 kali	Tiap Tahun	Pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan data keluarga berisiko stunting	Dalduk KB
25	Tersedianya data keluarga risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	2 kali	Tiap Tahun	Tersedia laporan hasil surveilans keluarga berisiko Stunting berbasis Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Dalduk KB
26	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	90%	2024	Cakupan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Dalduk KB

NO	INDIKATOR	TARGET	TAHUN	DEFINISI OPERASIONAL	URUSAN
27	Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	90%	2024	Cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Dalduk KB
28	Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	90% kab/kota	2024	Cakupan data capaian Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000 di setiap kabupaten/kota	Pendidikan
29	Persentase Desa/kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/Kota	90% Desa/Kel	2024	Cakupan desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan Stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota	Pendidikan
30	Persentase Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	70% Desa/Kel	2024	Cakupan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	Pendidikan
31	Terlaksanannya kampanye nasional pencegahan stunting	3 kanal/metode	Tiap Bulan	Pelaksanaan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan dengan indikator dengan 3 kanal/metode setiap bulan	Kominfo
32	Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan stunting	100% kab/kota	2024	Pelaksanaan intervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di setiap kabupaten/kota	Pangan/ Pertanian
33	Jumlah Keluarga Miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	10 Juta Jiwa	2024	Jumlah jiwa warga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Sosial
34	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	15.600.039 Jiwa	2024	Jumlah jiwa warga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	Sosial
35	Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	100% Pendamping	2024	Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah terlatih modul kesehatan dan gizi	Sosial

b. Evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting

Sejak dilaksanakan pada Tahun 2019, tingkat partisipasi kabupaten/kota dalam pelaksanaan aksi konvergensi meningkat, baik secara jumlah maupun persentase. APBD Kabupaten/Kota yang diperuntukan untuk intervensi Stunting (APBD Stunting) terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya, namun demikian alokasi Anggaran Penurunan Stunting yang cenderung meningkat berdasarkan analisa kurang berdampak dalam upaya menurunkan angka prevalensi Stunting. Proses *tagging* dan *tracking* anggaran yang ada saat ini dianggap terlalu besar dan tidak mencerminkan anggaran yang sebenarnya untuk penurunan stunting. Idealnya, proses *tagging* dan *tracking* anggaran harus dapat memastikan apakah intervensi prioritas dibiayai, anggarannya mencukupi dan dilaksanakan di lokasi prioritas.¹

Selain itu hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa indikator yang dipantau terlalu banyak, pemahaman terkait data yang harus dikumpulkan tidak sama dan target yang harus dicapai pada tahun 2024 tidak mungkin dicapai. Oleh karena itu agar dilakukan penyederhanaan indikator yang akan dipantau.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi, maka diperlukan perbaikan pelaksanaan aksi konvergensi meliputi:

- a. Dilakukan penyederhanaan dan penyamaan indikator konvergensi daerah mulai dari desa dan kelurahan sampai dengan provinsi sehingga daerah dapat melaksanakan upaya penurunan stunting secara konvergen.
- b. Data anggaran APBD untuk intervensi stunting yang diinput oleh provinsi, kabupaten/kota harus berbasis data SIPD Kemendagri dan juga sesuai dengan tagging tematik stunting sehingga data yang diperoleh dapat lebih presisi.
- c. Perumusan ulang terhadap aksi konvergensi yang berkaitan dengan upaya langsung penguatan sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (aksi utama), serta yang tidak langsung berkaitan upaya penguatan sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (aksi pendukung).
- d. Perumusan ulang Petunjuk Teknis Aksi Konvergensi bagi Kabupaten/Kota, serta penyusunan juknis tingkat kecamatan. Aksi konvergensi perlu dilaksanakan untuk memberikan kepastian keterpaduan di bidang anggaran, maupun cakupan intervensi

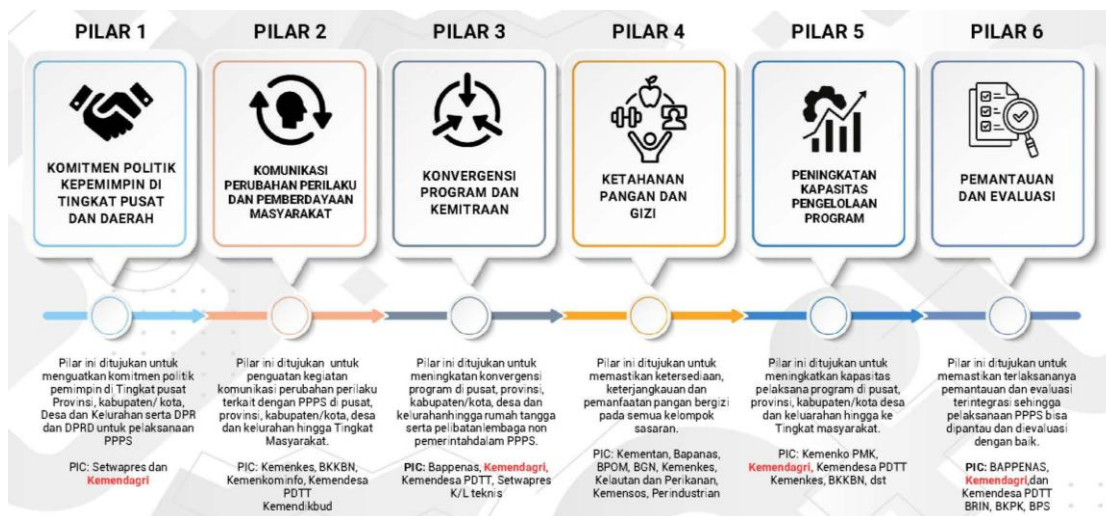
¹ Stranas Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 2025-2029

- e. Pengembangan web aksi bangsa yang terintegrasi dengan data NIK Dukcapil, SIPD (Keuda/Pusdatin), Peta Pemerintahan (Adwil) untuk membentuk dashboard kecamatan, Kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Berdasarkan rancangan strategi nasional terdapat 6 (enam) pilar strategi nasional yaitu: 1) pilar 1, Komitmen dan Visi Kepemimpinan. Komitmen dan visi kepemimpinan sangatlah penting dalam pelaksanaan P3S. Pengalaman pelaksanaan program dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa komitmen yang tinggi dari para pemimpin politik di pusat dan daerah akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. 2) pilar 2, Kampanye Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan. Masalah stunting bukan hanya disebabkan oleh ketersediaan makanan bergizi dan ketersediaan layanan, tetapi juga disebabkan oleh pengetahuan dan perilaku masyarakat, terutama dalam hal pola makan, pola asuh dan pola sanitasi. Data hasil SKI tahun 2023 menunjukkan bahwa baru 60% masyarakat yang mempunyai pemahaman yang benar terkait dengan stunting. Oleh karena itu, kampanye perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat penting untuk dilakukan masyarakat. 3) pilar 3, Konvergensi Program dan Kemitraan. Pelaksanaan P3S memerlukan keterpaduan antara program dan intervensi yang diperlukan oleh setiap kelompok sasaran. Oleh karena itu, konvergensi antar program baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa dan lembaga non pemerintah sangat penting untuk dilakukan. Konvergensi merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, dan terintegrasi, untuk memastikan sasaran prioritas mendapatkan layanan lengkap sesuai dengan kebutuhannya sebagai upaya mencegah terjadinya kasus stunting baru. Kemitraan P3S adalah kerja sama antara pemerintah bersama non-pemerintah yang bersepakat untuk menjalankan intervensi program P3S melalui model kerangka kerja kemitraan yang disepakati bersama. 4) pilar 4, Ketahanan Pangan dan Gizi. Ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat ini sangat penting untuk mencegah terjadinya stunting baru pada anak. 5) pilar 5, Peningkatan Kapasitas. Kapasitas pengelola pelaksanaan P3S di pusat dan daerah akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan P3S, salah satu tantangan utama pelaksanaan P3S di lapangan adalah terkait dengan kapasitas pelaksana yang belum baik dan tidak sama antar daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas harus mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaan P3S ke depan. Dan 6) pilar 6, Pemantauan dan Evaluasi. Pelaksanaan P3S perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala agar kemajuan pelaksanaan program dapat diketahui dengan baik. Selain

itu, melalui pemantauan yang dilakukan secara berkala, jika terdapat hambatan dalam pelaksanaannya dapat segera diketahui sehingga dapat segera diatasi. Pemantauan dan evaluasi ini harus dilaksanakan secara terintegrasi, karena pelaksanaan P3S melibatkan banyak pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Gambar 1 Rancangan Pilar Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 2025-2029



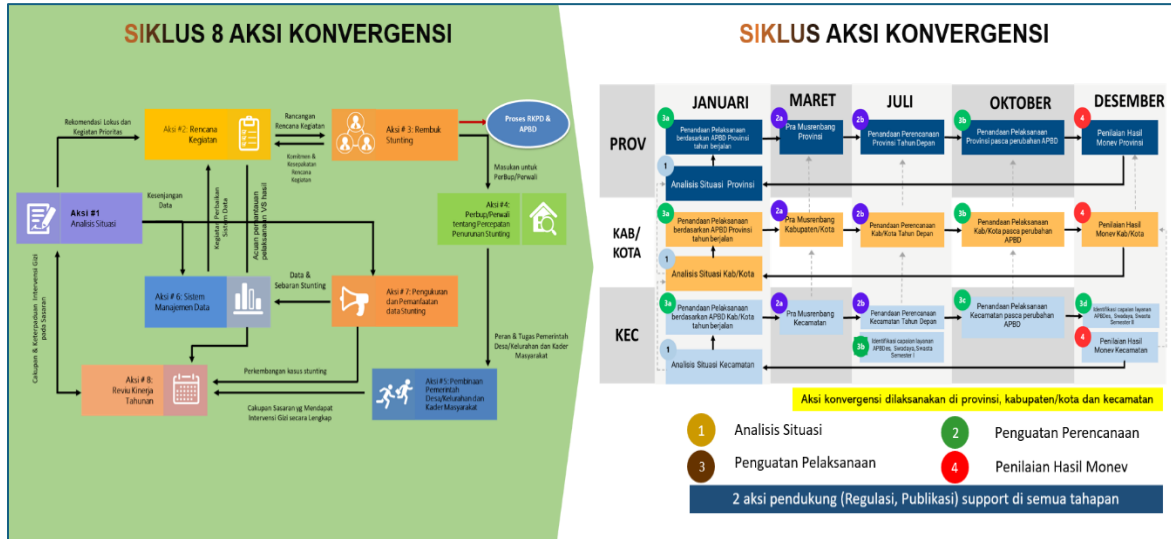
Dari 6 (enam) pilar tersebut, Kementerian Dalam Negeri memiliki tanggungjawab terhadap 4 (empat) pilar, yaitu pilar 1. Komitmen dan Visi Kepemimpinan, pilar 3. Konvergensi Program dan Kemitraan, pilar 5, Peningkatan Kapasitas, dan pilar 6. Pemantauan dan Evaluasi, serta dari hasil pembelajaran pelaksanaan percepatan penurunan stunting tahun 2018-2024, maka pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting perlu dilanjutkan dengan memperkuat pada proses analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi program/kegiatan.

Aksi konvergensi merupakan salah satu strategi yang dianggap efektif dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Melalui aksi konvergensi, diharapkan dapat terjadi sinergi antara berbagai pelaku kepentingan di desa dan kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat, sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih terarah dan memberikan dampak yang lebih besar.

Buku pelaksanaan aksi konvergensi pemerintah daerah ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan komprehensif bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan menurunkan angka stunting di wilayahnya

terutama dalam menyusun analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program penurunan stunting.

Gambar 2 Usulan perubahan siklus pelaksanaan aksi konvergensi



B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Diundangkan pada tanggal 17 Nopember 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138);
10. Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
11. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

C. TUJUAN

Buku pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi pemangku kepentingan tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi dalam:

1. Melakukan analisis situasi yang komprehensif guna mengidentifikasi sasaran, indikator dan masalah layanan pada tingkat lokal;
2. Memperkuat perencanaan yang terkoordinasi sehingga intervensi dan alokasi sumber daya dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan;

3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan di lapangan melalui kolaborasi para pemangku kepentingan yang sinergis;
4. Mengukur dan menilai kinerja program secara berkelanjutan dengan hasil monitoring dan evaluasi yang objektif; serta
5. Mendukung keberhasilan program melalui dukungan regulasi dan kebijakan yang memperkuat pelaksanaan program serta publikasi yang memastikan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Berikut adalah hasil yang diharapkan dari usulan pelaksanaan Aksi Konvergensi dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting:

1. Analisis Situasi:

Hasil yang diharapkan dari tahapan analisis situasi adalah dokumen yang berisi hasil analisis tentang target dan capaian anggaran, cakupan layanan serta masalah yang dihadapi dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di suatu wilayah yang meliputi cakupan layanan, kelompok sasaran, penyebab masalah dan solusi sebagai program prioritas.

2. Penguatan Perencanaan:

Hasil yang diharapkan dari tahapan penguatan perencanaan adalah 2 (dua) dokumen perencanaan yang terdiri dari:

- a. Dokumen yang berisi daftar rencana program/kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting hasil pra-musrenbang yang terbagi dalam bidang fisik prasarana, sosial budaya dan ekonomi di suatu wilayah berdasarkan hasil dari analisis situasi; dan
- b. Dokumen yang berisi hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan dari Subkegiatan tematik stunting dalam SIPD tahun berikutnya di suatu wilayah.

3. Penguatan Pelaksanaan:

Hasil yang diharapkan dari tahapan penguatan pelaksanaan adalah 4 (empat) dokumen pelaksanaan yang terdiri dari:

- a. Dokumen yang berisi hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan

turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan.

- b. Dokumen yang berisi hasil rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD perubahan sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan.
- c. Dokumen yang berisi hasil identifikasi realisasi anggaran (APBDes, swadaya masyarakat, dan kemitraan), capaian layanan serta masalah yang dihadapi di suatu wilayah pada akhir semester 1.
- d. Dokumen yang berisi hasil identifikasi realisasi anggaran (APBDes, swadaya masyarakat, dan kemitraan), capaian layanan serta masalah yang dihadapi di suatu wilayah pada akhir semester 2.

4. Penilaian Kinerja Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Hasil yang diharapkan dari tahapan penilaian kinerja hasil monitoring dan evaluasi adalah 2 (dua) dokumen yang terdiri dari:

- a. Dokumen yang berisi hasil monitoring pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi: analisis situasi, penguatan perencanaan, penguatan pelaksanaan, dukungan regulasi dan publikasi terkait masalah yang dihadapi dan tindaklanjutnya.
- b. Dokumen yang berisi hasil penilaian pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi: analisis situasi, penguatan perencanaan, penguatan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dukungan regulasi dan publikasi. Hasil penilaian aksi konvergensi di masing-masing wilayah maupun daerah dikelompokkan dalam klasifikasi Tumbuh, Berkembang dan Berdaya

5. Dukungan Regulasi/Kebijakan:

Hasil yang diharapkan dari dukungan regulasi/kebijakan dalam pelaksanaan aksi konvergensi ini adanya dokumen yang berisi daftar identifikasi regulasi untuk memastikan tahapan aksi konvergensi dalam rangka Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting diselenggarakan di desa dan kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

6. Publikasi

Hasil yang diharapkan dari dukungan publikasi pelaksanaan aksi konvergensi ini adanya dokumen yang berisi daftar identifikasi publikasi untuk memastikan tahapan aksi konvergensi dalam rangka Pencegahan

dan Percepatan Penurunan Stunting diselenggarakan di desa dan kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi

E. PRINSIP

Prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting agar memenuhi prinsip PATRIOT dengan uraian sebagai berikut:

1. **Partisipatif** adalah proses pemberdayaan lintas pelaku yang secara kritis, setara dan proaktif berpartisipasi pada setiap tahapan kegiatan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting untuk memperkuat tata kelola dan tindakan strategis dalam pembangunan;
2. **Akuntabel** adalah setiap tahapan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dapat dipertanggungjawabkan secara struktural maupun fungsional;
3. **Transparan** adalah keterbukaan dan kemudahan informasi dalam setiap tahapan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting;
4. **Responsif** adalah sikap proaktif, kritis, kooperatif dan suportif dari setiap pemangku kepentingan dalam memberikan tanggapan yang tepat dan bijaksana terhadap setiap permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tahapan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting;
5. **Integritas** adalah tindakan yang dilakukan secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, sesuai nilai-nilai yang berlaku di masyarakat;
6. **Objektif** adalah hasil setiap tahapan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dapat diterima oleh semua pihak; dan
7. **Terukur** adalah hasil setiap tahapan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dapat diukur dan dapat dibuktikan (diverifikasi).

F. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan aksi konvergensi yang diusulkan meliputi:

1. Analisis Situasi

Ruang lingkup analisis situasi meliputi:

- a. Pengumpulan data sasaran
 - 1) Data dasar kependudukan
 - Jumlah penduduk
 - Jumlah rumah tangga/keluarga
 - 2) Data sasaran



- b. Pengumpulan data capaian layanan berdasarkan indikator layanan yang diusulkan kementerian/lembaga sebagai berikut:

IBU HAMIL, IBU NIFAS & IBU MENYUSUI	BADUTA USIA 0 – 23 BULAN	BALITA USIA 24 – 59 BULAN	REMAJA PUTRI	CALON PENGANTIN	RUMAH TANGGA & MASYARAKAT
1. Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK; 2. Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan; 3. Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil; 4. Pemeriksaan Kehamilan 6 kali selama masa kehamilan;	1. Praktik Inisiasi Menyusui Dini; 2. Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif; 3. Anak usia 6-23 bulan mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam; 4. Anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat ASI; 5. Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tatalaksana gizi buruk;	1. Anak usia 24-59 bulan gizi buruk mendapatkan tatalaksana gizi buruk; 2. Anak usia 24-59 bulan dipantau pertumbuhan dan perkembangan; 3. Anak usia 24-59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi; 4. Anak usia 24-59 bulan diare mendapatkan	1. Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) terhadap Remaja Putri 2. Skrining anemia terhadap Remaja Putri	1. Calon pengantin mendapatkan pemeriksaan kesehatan; 2. Calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	1. Rumah tangga mendapatkan akses terhadap Air Minum Aman; 2. Rumah tangga mendapatkan akses terhadap Sanitasi Aman; 3. Penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 4. Kelompok sasaran

IBU HAMIL, IBU NIFAS & IBU MENYUSUI	BADUTA USIA 0 – 23 BULAN	BALITA USIA 24 – 59 BULAN	REMAJA PUTRI	CALON PENGANTIN	RUMAH TANGGA & MASYARAKAT
5. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	6. Anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan; 7. Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi; 8. Anak usia 0-23 bulan mendapatkan Imunisasi Rutin Lengkap; 9. Anak usia 0-23 bulan diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar; 10. Anak usia 0-23 bulan mendapat obat cacing (POPM).	oralit dan zinc sesuai standar; 5. Anak usia 24-59 bulan yang terpantau kasus pneumonia; 6. Anak usia 24-59 bulan mendapat obat obat cacing (POPM).			mendapatkan pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK); 5. Anak mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA); 6. Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi di desa dan kelurahan.

- c. Pengumpulan data program dan kegiatan dari berbagai sumber pendanaan, termasuk anggaran APBD, APBDesa, serta kontribusi dari masyarakat dan pihak swasta.
- d. Melakukan identifikasi masalah terkait ketercapaian layanan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting, mencakup faktor sosial, ekonomi, budaya, serta pola asuh yang relevan.
- e. Menyusun rekomendasi intervensi dan rencana program/kegiatan prioritas intervensi.
- f. Penetapan target prevalensi stunting dan capaian layanan berdasarkan indikator intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.

2. Penguatan Perencanaan

Ruang lingkup penguatan perencanaan meliputi:

- a. Melaksanakan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang) tematik stunting.
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan yang didanai dari berbagai sumber, mencakup sasaran dan target kinerja di setiap sektor (kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan pangan), serta

indikator capaian yang terukur dan jadwal pelaksanaan yang jelas.

- c. Melakukan pemilahan rencana program/kegiatan dalam bidang fisik prasarana, sosial budaya dan ekonomi.
- d. Membangun komitmen pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan program, termasuk kesepakatan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing, mekanisme koordinasi lintas sektor untuk penyelesaian permasalahan di lapangan, serta pelibatan organisasi masyarakat, akademisi, dan sektor swasta.
- e. Melakukan penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan dari Subkegiatan tematik stunting dalam SIPD tahun berikutnya di suatu wilayah.

3. Penguatan Pelaksanaan

Ruang lingkup penguatan pelaksanaan

- a. Melakukan penandaan terhadap rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan.
- b. Melakukan penandaan terhadap rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD perubahan sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan.
- c. Melakukan identifikasi realisasi program/kegiatan sampai dengan semester I yang bersumber dari APBDesa, swadaya masyarakat dan kemitraan pada tahun berjalan.
- d. Melakukan identifikasi realisasi program/kegiatan sampai dengan semester II yang bersumber dari APBDesa, swadaya masyarakat dan kemitraan pada tahun berjalan.

4. Penilaian Hasil Monitoring dan Evaluasi

Ruang lingkup penilaian hasil monitoring dan evaluasi meliputi:

- a. Monitoring terhadap pelaksanaan aksi konvergensi mulai dari analisis situasi, penguatan perencanaan, penguatan pelaksanaan, dukungan regulasi dan publikasi hasil pelaksanaan aksi konvergensi;

- b. Melakukan pengkategorian wilayah berdasarkan klasifikasi tumbuh, berkembang dan bedaya dalam pelaksanaan aksi konvergensi.

5. Kebijakan dan Regulasi Pendukung

Ruang lingkup dukungan kebijakan/regulasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting meliputi:

- a. Mengidentifikasi terhadap penyusunan dan penetapan kebijakan atau regulasi yang memperkuat pelaksanaan tahapan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di desa dan kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, dapat berupa antara lain peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, surat edaran, dan berita acara.

6. Publikasi

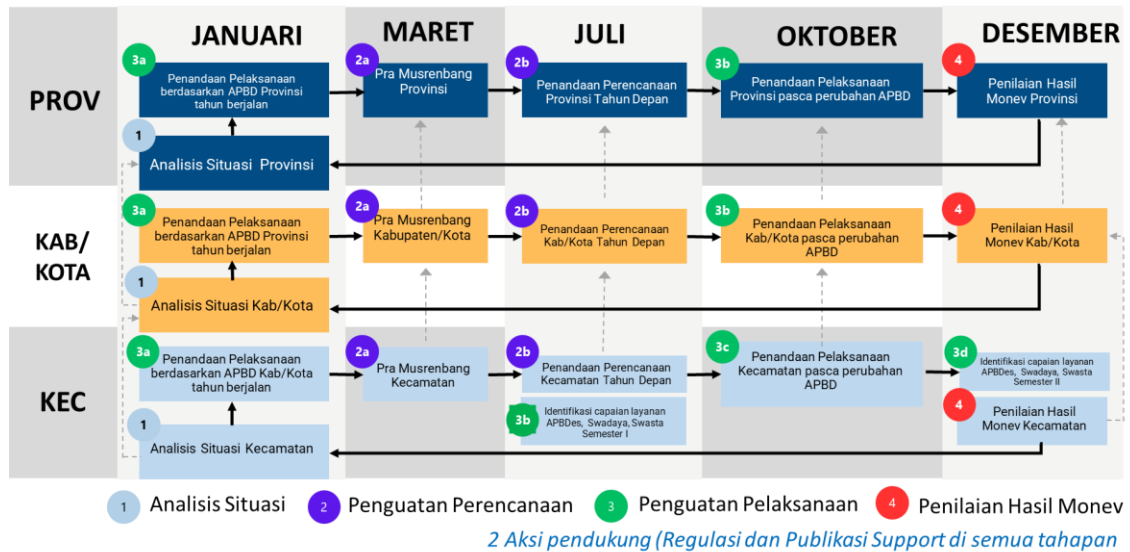
Ruang lingkup publikasi aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting meliputi:

- a. Melakukan identifikasi pelaksanaan publikasi terhadap hasil tahapan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dapat berupa antara lain berita media sosial, televisi, radio, kampanye, dan laporan publikasi hasil aksi dalam web.

G. TAHAPAN

Tahapan aksi konvergensi dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting mencakup analisis situasi, proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi yang dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Kegiatan konvergensi ini terdiri atas aksi utama dan aksi pendukung yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan penurunan stunting secara efektif.

Gambar 3 Siklus Pelaksanaan Aksi Konvergensi



Aksi Utama adalah langkah-langkah strategis penting yang diambil dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting agar tujuan tercapai, sedangkan aksi pendukung adalah rangkaian aktifitas yang berfungsi untuk memperkuat, memfasilitasi dan menciptakan lingkungan kondusif yang ada dalam setiap tahapan aksi utama.

Berikut tahapan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting:



1. Aksi Utama meliputi:

- a. Analisis situasi
- b. Penguatan Perencanaan.
- c. Penguatan Pelaksanaan
- d. Penilaian hasil monitoring dan evaluasi

2. Aksi Pendukung meliputi:

- a. Regulasi yang mendukung upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting
- b. Publikasi pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

BAB II

AKSI KONVERGENSI KECAMATAN

A. PENGANTAR

Pelaksanaan aksi konvergensi di tingkat kecamatan merupakan langkah penting dalam memastikan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting berjalan secara efektif dan terukur. Kecamatan, sebagai unit pemerintahan yang memiliki akses langsung ke masyarakat di tingkat desa/kelurahan, memiliki keunggulan dalam mengidentifikasi sasaran yang tepat, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan anak-anak.

Melalui pendekatan berbasis data, kecamatan dapat menentukan prioritas intervensi. Peran strategis kecamatan dalam aksi konvergensi juga terlihat dalam kolaborasi lintas sektoral. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dinas kesehatan, pendidikan, dan sosial, serta organisasi masyarakat sipil, kecamatan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Selain itu, pemantauan dan evaluasi yang sistematis akan memastikan bahwa setiap tahapan yang diambil dapat terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Gambar 4 Siklus Aksi Konvergensi Kecamatan



B. TAHAPAN AKSI KONVERGENSI KECAMATAN

Tahapan aksi konvergensi stunting di tingkat kecamatan terdiri dari dua kategori, yaitu aksi utama dan aksi pendukung. Aksi utama mencakup serangkaian proses dan kegiatan yang dilaksanakan secara berurutan

dan terintegrasi dalam perencanaan reguler, memastikan bahwa semua langkah yang diambil saling terkait dan mendukung pencapaian tujuan. Sementara itu, aksi pendukung berfokus pada penciptaan lingkungan yang kondusif di setiap tahapan aksi utama, termasuk upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengoptimalkan sumber daya lokal, serta memperkuat kolaborasi antar stakeholder untuk mendukung keberhasilan program.

Berikut tahapan aksi konvergensi Kecamatan:

a. Aksi Utama meliputi:

- 1) Analisis Situasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting kecamatan
- 2) Penguatan Perencanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting kecamatan
- 3) Penguatan Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting kecamatan
- 4) Penilaian hasil Monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting kecamatan

b. Aksi Pendukung meliputi:

- 1) Dukungan Regulasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di kecamatan
- 2) Publikasi pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di kecamatan

Sebelum tahapan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan, Camat menetapkan:

a. 3 (tiga) orang Operator kecamatan yaitu



Pegawai
Kecamatan



Pegawai
Puskesmas



Petugas Lapangan
Keluarga Berencana

b. 3 (tiga) orang Verifikator Kecamatan yaitu pegawai kecamatan, Kepala Puskesmas atau petugas puskesmas yang ditunjuk oleh kepala Puskesmas dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

c. 1 (satu) orang Approver yaitu Camat.

Operator, verifikator dan approver akan diberikan akun khusus untuk akses situs web Aksi Bangda. Penunjukan dilakukan melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh Camat atas nama Bupati atau Walikota.

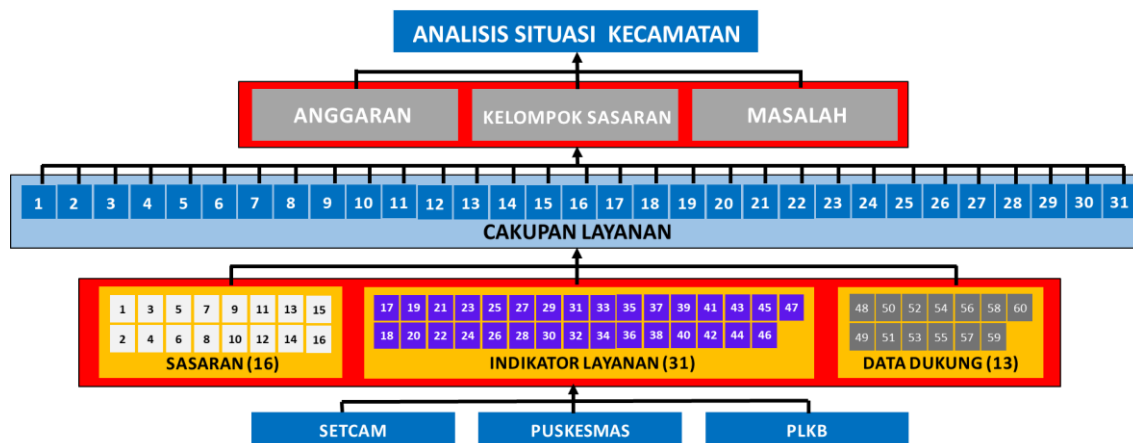
Aksi Utama:

1. Analisis Situasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Analisis situasi kecamatan adalah dokumen yang berisi hasil analisis tentang cakupan layanan, anggaran, serta masalah yang dihadapi dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di desa dan/atau kelurahan dalam wilayah kecamatan yang meliputi cakupan layanan, kelompok sasaran, penyebab masalah dan solusinya sebagai program prioritas.

Berikut langkah-langkah pelaksanaan analisis situasi:

Gambar 5 Alur Pelaksanaan Analisis Situasi Kecamatan



Tahapan pelaksanaan analisis situasi kecamatan meliputi:

1. Melakukan pengumpulan dan penginputan data sasaran, capaian layanan dan data pendukung berdasarkan desa/kelurahan dalam web aksi bangda;
 - a. Data sasaran, yaitu:

Table 1 Data Sasaran dan penanggungjawab data

No.	Sasaran	PJ Data
1	Jumlah Penduduk	Setcam
2	Jumlah Keluarga/Rumah Tangga	Setcam
3	Jumlah Remaja Putri	Setcam
4	Jumlah Ibu Hamil	Puskesmas
5	Jumlah Ibu Nifas	Puskesmas

No.	Sasaran	PJ Data
6	Jumlah Calon Pengantin	PLKB
7	Jumlah Ibu Hamil KEK	Puskesmas
8	Jumlah Anak usia 0-5 bulan	Puskesmas
9	Jumlah Anak usia 6-23 bulan	Puskesmas
10	Jumlah Anak usia 24-59 bulan	Puskesmas
11	Jumlah kasus diare pada anak usia 0-59 bulan	Puskesmas
12	Jumlah Anak usia 0-23 bulan gizi buruk	Puskesmas
13	Jumlah Anak usia 0-23 bulan gizi kurang	Puskesmas
14	Jumlah Anak usia 24-59 bulan gizi buruk	Puskesmas
15	Jumlah Anak usia 24-59 bulan gizi kurang	Puskesmas
16	Jumlah Anak usia 0-17 tahun	Setcam

- b. Data capaian layanan berdasarkan indikator Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, yaitu:

Table 2 Indikator Layanan

No.	Indikator	PJ data
Ibu hamil, ibu menyusui dan ibu nifas:		
1	Jumlah Ibu hamil KEK mendapat Makanan Tambahan	Puskesmas
2	Jumlah Ibu hamil menerima Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan	Puskesmas
3	Jumlah Ibu hamil menerima makanan bergizi seimbang	Puskesmas
4	Jumlah Ibu hamil memeriksakan kehamilannya 6 kali selama masa kehamilan;	Puskesmas
5	Jumlah Ibu Nifas menerima pelayanan Keluarga Berencana (KB)	PLKB
Anak usia 0-23 bulan:		
1	Jumlah anak baru lahir yang mendapatkan inisiasi menyusui dini	Puskesmas
2	Jumlah anak usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif	Puskesmas
3	Jumlah anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MPASI);	Puskesmas

No.	Indikator	PJ data
4	Jumlah anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat air susu ibu (ASI)	Puskesmas
5	Jumlah anak usia 0-23 bulan gizi buruk yang mendapatkan tatalaksana gizi buruk	Puskesmas
6	Jumlah anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Puskesmas
7	Jumlah anak usia 0-23 bulan gizi kurang yang mendapat asupan gizi	Puskesmas
8	Jumlah anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan imunisasi rutin lengkap	Puskesmas
9	Jumlah anak usia 0-23 bulan diare yang mendapatkan oralit dan zinc	Puskesmas
10	Jumlah anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan obat cacing;	Puskesmas
Anak usia 24-59 bulan:		
1	Jumlah anak usia 24-59 bulan gizi buruk yang mendapatkan pelayanan tata laksanaan gizi buruk	Puskesmas
2	Jumlah anak usia 24-59 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Puskesmas
3	Jumlah anak usia 24-59 bulan gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Puskesmas
4	Jumlah anak usia 24-59 bulan diare yang mendapatkan oralit dan zinc	Puskesmas
5	Jumlah anak usia 24-59 bulan yang terpantau kasus pneumonia	Puskesmas
6	Jumlah anak usia 24-59 bulan yang mendapatkan obat cacing;	Puskesmas
Remaja Putri		
1	Jumlah Remaja Putri yang mengonsumsi TTD;	Puskesmas
2	Jumlah Remaja putri yang mendapatkan pemeriksaan anemia	Puskesmas
Calon Pengantin		
1	Jumlah Calon Pengantin yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan pra nikah	Puskesmas
2	Jumlah Calon Pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	PLKB
Rumah tangga dan masyarakat		
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap Air Minum Aman	Puskesmas
2	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap Sanitasi Aman	Puskesmas

No.	Indikator	PJ data
3	Jumlah kelompok sasaran* Pendampingan keluarga 1000 HPK	PLKB
4	Jumlah penduduk yang memiliki JKN	Puskesmas
5	Jumlah Anak yang memiliki akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)	Setcam
6	Jumlah Desa dan Kelurahan yang melaksanakan program pemanfaatan pekarangan sebagai sumber peningkatan asupan gizi	Setcam
* kelompok sasaran meliputi: Ibu hamil, ibu nifas, anak usia 0-23 bulan, anak usia 23-59 bulan, remaja putri, calon pengantin		

c. Data dukungan layanan, yaitu:

Table 3 Data Pendukung Layanan

No.	Data Pendukung Layanan	PJ Data
1	Jumlah Posyandu tiap desa/kelurahan	Puskesmas
2	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Puskesmas Pembantu (Pustu)	Puskesmas
3	Jumlah klinik Kesehatan	Puskesmas
4	Jumlah Dokter	Puskesmas
5	Jumlah kader-kader kesehatan atau kader posyandu tiap desa/kelurahan	Puskesmas
6	Jumlah Bidan yang ada di desa/kelurahan	Puskesmas
7	Jumlah Petugas Gizi	Puskesmas
8	Jumlah Sanitarian	Puskesmas
9	Jumlah tenaga promosi Kesehatan	Puskesmas
10	Jumlah lembaga PAUD	Setcam
11	Jumlah SMP/MTs atau yang setara	Setcam
12	Jumlah SMA/MA atau yang setara	Setcam
13	Jumlah Guru PAUD	Setcam

2. Melakukan inventarisasi dan pemetaan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang berjalan di kecamatan. Terdiri dari:

- Program/Kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang didanai oleh APBD yang menjadi kewenangan kecamatan tahun berjalan.
- Program/Kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang didanai oleh desa (APBdesa) tahun berjalan.

- Program/Kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang didanai oleh sektor swasta tahun berjalan.
 - Program/Kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang dilakukan melalui swadaya masyarakat.
3. Melakukan identifikasi permasalahan dan kendala capaian layanan baik dari sisi penerima layanan, ketersediaan maupun tata kelola.
 4. Menyusun rekomendasi perbaikan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting
 5. Menyusun usulan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.

Adapun langkah analisis situasi sebagai berikut:

- a) Operator di kecamatan melakukan pencatatan ke dalam web aksi bangsa terhadap keseluruhan data yang dibutuhkan.
- b) Verikator melakukan verifikasi lengkap atas data yang telah terinput.
- c) Setelah semua data terinput dan terverifikasi, camat melaksanakan pertemuan terpadu dengan pemangku kepentingan lainnya di kecamatan yang terdiri dari Kepala puskesmas, PLKB, Perangkat Daerah di kecamatan, Kepala Desa, Lurah, kader prosyandu dan TP PKK untuk membahas tentang:
 - Review perkembangan cakupan layanan untuk mengidentifikasi cakupan layanan 'yang menjadi masalah' karena cakupan layanannya yang rendah/relatif tertinggal dibanding layanan lain;
 - penyebab kesenjangan cakupan layanan pada skala Kecamatan dan/atau pada skala desa/kelurahan;
 - Masalah dan penyebab masalah penyampaian layanan kepada kelompok sasaran baik dari penyedia layanan (supply side) maupun penerima layanan (demand side) serta dukungan layanan;
 - Rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan untuk peningkatan layanan;
 - usulan program/kegiatan peningkatan cakupan layanan.
- d) Camat memberikan persetujuan (approved) atas hasil analisis situasi pada web aksi bangsa.

Waktu Pelaksanaan:

Kegiatan analisis situasi ini dilakukan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berjalan.

Pelaksana dan penanggungjawab:

Operator kecamatan, verifikator kecamatan dan Camat.

KELUARAN ANALISIS SITUASI KECAMATAN:

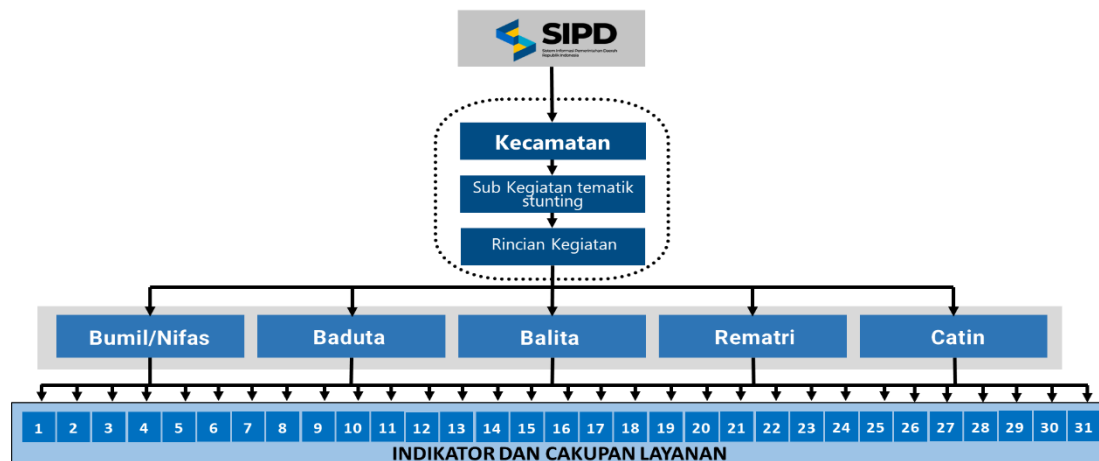
Dokumen hasil analisis tentang kondisi layanan, kelompok sasaran, alokasi anggaran, permasalahan yang dihadapi, dan rekomendasi serta rencana program/kegiatan dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di desa dan/atau kelurahan dalam wilayah kecamatan

2. Penandaan Program/Kegiatan APBD Kab/Kota Tahun berjalan di kecamatan

Penandaan program/kegiatan APBD Kabupaten/kota tahun berjalan yang menjadi kewenangan kecamatan adalah bagian dari penguatan pelaksanaan merupakan dokumen yang berisi hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan.

Penandaan yang dilakukan terhadap sub kegiatan yang dialokasikan untuk mengintervensi indikator layanan

Gambar 6 Alur Penandaan Program/Kegiatan APBD Tahun Berjalan di Kecamatan



Kegiatan Penandaan Program/Kegiatan tahun berjalan antara lain:

1. Mengidentifikasi program/kegiatan dari sub-kegiatan dalam dokumen penganggaran daerah (APBD Kabupaten/Kota) tahun berjalan yang menjadi kewenangan kecamatan dari dokumen SIPD pelaksanaan.
2. Mengidentifikasi program/kegiatan dari sub-kegiatan dalam penganggaran daerah (APBD Kabupaten/Kota) tahun berjalan yang dialokasikan untuk kelurahan dari dokumen SIPD pelaksanaan yang mengintervensi layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Memilah rincian belanja atau aktivitas yang ditujukan untuk sasaran dan pencapaian layanan percepatan pencegahan serta penurunan stunting.

Waktu Pelaksanaan:

Penandaan pelaksanaan program/kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan pada bulan Januari tahun berjalan.

Pelaksana dan penanggung jawab:

Operator kecamatan, verifikator kecamatan dan Camat

Adapun langkah penandaan Program/Kegiatan APBD Kab/Kota Tahun berjalan sebagai berikut:

1. Operator kecamatan melakukan pemilahan program/kegiatan berdasarkan sub kegiatan dalam DPA SKPD yang menjadi kewenangan kecamatan berdasarkan dokumen SIPD;
2. Selanjutnya pada subkegiatan yang telah ditandai, operator kecamatan menandai belanja/aktifitas pada akun belanja yang ditujukan kepada sasaran, layanan maupun kegiatan bimbingan dan pengawasan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Belanja/aktifitas yang ditandai dapat lebih dari satu dalam sub kegiatan;
3. Operator kecamatan melakukan input hasil penandaan belanja/aktifitas ke dalam web aksi bangda yang meliputi kode rekening belanja, uraian belanja, koefisien/volume, satuan, harga satuan serta total belanja;
4. Selanjutnya camat bersama Kepala puskesmas, PLKB, Perangkat Daerah di kecamatan, Kepala Desa, dan Lurah melakukan

evaluasi hasil penandaan dengan kebutuhan intervensi tahun berjalan yang menjadi prioritas;

Untuk efektifitas, pelaksanaan evaluasi hasil penandaan Pelaksanaan APBD tahun berjalan dilakukan bersamaan dengan pertemuan analisis situasi;

5. Camat memberikan persetujuan (approved) atas penandaan tahun berjalan.

Pelaksana dan penanggungjawab:

Operator kecamatan, verifikator kecamatan dan Camat

KELUARAN PENANDAAN APBD TAHUN BERJALAN DI KECAMATAN :

Dokumen yang berisi hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan

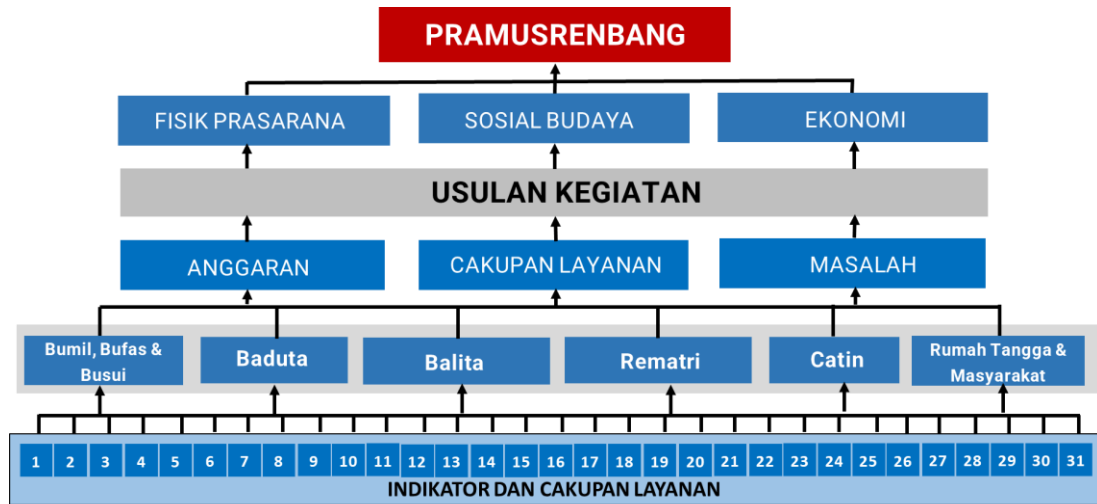
3. Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang) Kecamatan tematik stunting

Pra-musrenbang kecamatan tematik stunting merupakan forum pertemuan antar *stakeholders* di tingkat kecamatan dalam rangka membahas masalah, potensi serta kebutuhan program/kegiatan dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, berdasarkan data-data hasil analisis situasi serta penandaan/tagging anggaran program/kegiatan berdasarkan APBD Kab/Kota tahun berjalan.

Materi pembahasan pra-musrenbang mencakup:

1. Hasil analisis situasi.
2. Daftar program/kegiatan intervensi percepatan stunting dari APBD tahun berjalan hasil penandaan.
3. Daftar usulan program/kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Gambar 7 Alur Pramusrenbang Kecamatan



Waktu Pelaksanaan:

Pra Musrenbang Kecamatan tematik Stunting dilaksanakan pada bulan Februari sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Penyelenggara:

Camat

Peserta:

- ❖ Perwakilan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Kepala Desa/Lurah
- ❖ OPD/UPTD di kecamatan
- ❖ Kepala Puskesmas
- ❖ Cabang Dinas Pendidikan
- ❖ Pendamping program
- ❖ TP-PKK
- ❖ Kapolsek
- ❖ Danramil
- ❖ Swasta

Proses pelaksanaan:

- a. Pra-musrenbang kecamatan dipimpin oleh Camat;
- b. Camat menyampaikan data-data hasil analisis situasi dan hasil penandaan anggaran rincian belanja dan aktivitas intervensi percepatan pencegahan penurunan stunting;

c. Pembahasan bersama terhadap:

- ✓ Kendala, masalah serta keberhasilan ketercapaian layanan;
- ✓ Program/kegiatan pemenuhan layanan serta penetapan prioritas intervensi;
- ✓ Rencana program/kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting tahun depan;
- ✓ Pemilahan rencana program/kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dalam dilakukan klasifikasi dalam kategori Fisik Prasarana, Sosial Budaya dan Ekonomi.

KELUARAN PRA MUSRENBANG KECAMATAN:

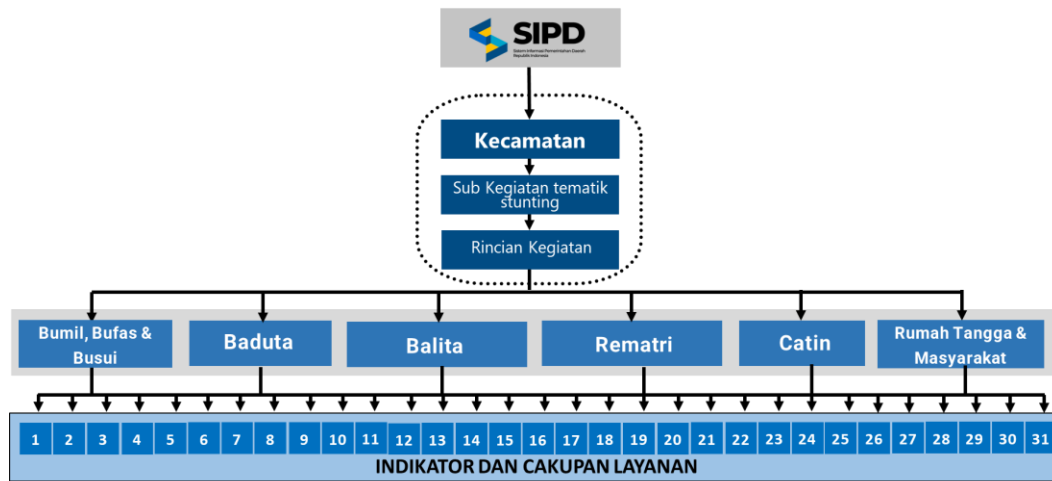
- a. Dokumen yang berisi daftar rencana program/kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting hasil pra-musrenbang kecamatan yang terbagi dalam bidang fisik prasarana, sosial budaya dan ekonomi di desa dan/atau kelurahan dalam wilayah kecamatan berdasarkan hasil dari analisis situasi kecamatan.
- b. Berita Acara Hasil Pra Musrenbang Kecamatan tematik stunting.

4. Penandaan Perencanaan Kecamatan Tahun Depan

Penandaan perencanaan kecamatan tahun depan merupakan bagian dari tahapan penguatan perencanaan percepatan penurunan stunting, yang bertujuan untuk memastikan usulan hasil pra musrenbang kecamatan teralokasi dalam rencana anggaran Tahun depan.

Hasil penandaan perencanaan kecamatan tahun depan berupa penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan dari Subkegiatan tematik stunting dalam rencana anggaran kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam SIPD perencanaan yang menjadi kewenangan kecamatan.

Gambar 8 Alur Penandaan Rencana APBD Kab/Kota
Di Kecamatan (Satu Tahun Depan)



Waktu Pelaksanaan:

Penandaan perencanaan program/kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan pada bulan Juli tahun berjalan.

Pelaksana dan penanggung jawab:

Operator kecamatan, verifikator dan Camat

Adapun langkah penandaan program sebagai berikut:

1. Operator kecamatan melakukan penandaan usulan program/kegiatan hasil pra musrenbang yang terakomodir dalam subkegiatan yang ada dalam rencana anggaran tahun depan yang tertuang dalam SIPD perencanaan yang menjadi kewenangan kecamatan.
2. Selanjutnya pada sub kegiatan yang telah ditandai, dilakukan penandaan terhadap belanja/aktifitas pada akun belanja yang ditujukan kepada sasaran, layanan maupun kegiatan bimbingan dan pengawasan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Belanja/aktifitas yang ditandai dapat lebih dari satu dalam sub kegiatan.
3. Hasil penandaan diinput pada web aksi bangsa yang meliputi kode rekening belanja, uraian belanja, koefisien/volume, satuan, harga satuan serta total belanja, kemudian di verifikasi oleh verifikator kecamatan

4. Camat melakukan pemeriksaan ulang hasil input dalam web dengan membahas bersama Kepala puskesmas, PLKB, Perangkat Daerah di kecamatan, Kepala Desa, dan Lurah dikaitkan dengan hasil pra-musrenbang kecamatan tematik stunting dan dilanjutkan dengan persetujuan (Approved) oleh Camat.

Pelaksana dan penanggungjawab:

Operator kecamatan, verifikator dan Camat

KELUARAN PENANDAAN APBD TAHUN DEPAN DI KECAMATAN:

Dokumen hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan dari Subkegiatan tematik stunting dalam rencana anggaran kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam SIPD perencanaan yang menjadi kewenangan kecamatan.

5. Identifikasi capaian layanan dan realisasi kegiatan APBDes, Swadaya dan Swasta Semester 1

Identifikasi capaian layanan APBD, APBDes, Swadaya dan Swasta merupakan bagian dari tahapan penguatan pelaksanaan yang menghasilkan dokumen identifikasi realisasi anggaran (APBDes, swadaya masyarakat, dan kemitraan), capaian layanan serta masalah yang dihadapi di suatu wilayah pada akhir semester 1.

Gambar 9 Alur Pencatatan Capaian Layanan Kecamatan Semester I



Adapun langkah-langkahnya:

- Operator melakukan input pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting sampai dengan juni tahun berjalan yang terdiri dari:
 - a. Pemutakhiran data sasaran (yang terdapat dalam analisis situasi)
 - b. Pemutakhiran capaian layanan
 - c. realisasi program/kegiatan sampai dengan Juni tahun berjalan yang bersumber dari APBDes, swasta, swadaya masyarakat
 - d. permasalahan dan kendala layanan
- Verifikator melakukan pemeriksaan atas kebenaran dan kelengkapan data dan dilanjutkan dengan verifikasi.
- Setelah data terverifikasi, Camat melakukan persetujuan (approval).

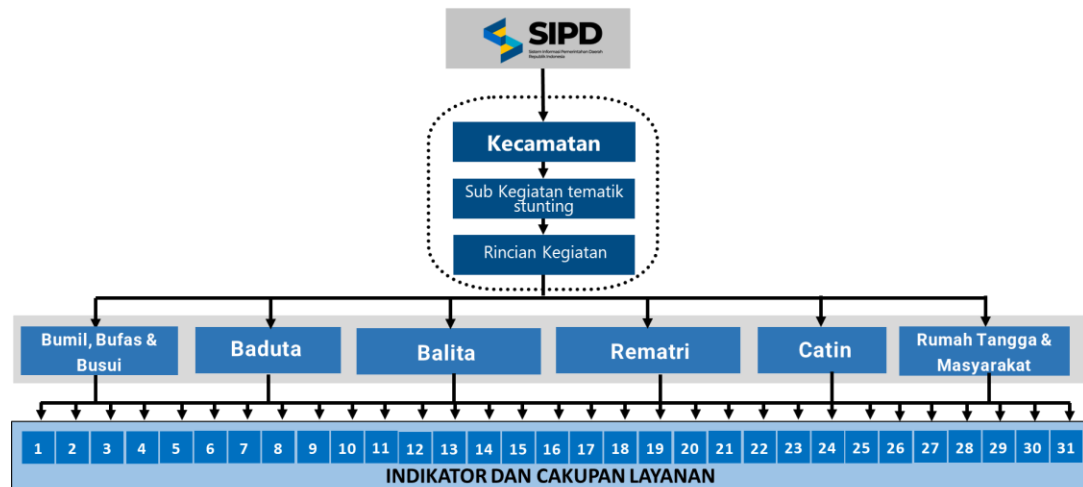
KELUARAN IDENTIFIKASI CAPAIAN LAYANAN SEMESTER I:

Dokumen yang berisi hasil identifikasi realisasi anggaran (APBDes, swadaya masyarakat, dan kemitraan), capaian layanan serta masalah yang dihadapi di suatu wilayah pada akhir semester 1.

6. Penandaan Pelaksanaan Kecamatan paska Perubahan APBD

Penandaan program/kegiatan tahun berjalan setelah APBD Perubahan merupakan bagian dari tahapan penguatan pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, yang bertujuan untuk melakukan penandaan anggaran dan pemetaan program/kegiatan tahun berjalan setelah adanya APBD Perubahan sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan.

Gambar 10 Alur Penandaan Apbd Kab/Kota Di Kecamatan Pasca APBD Perubahan



Kegiatan Penandaan Program/Kegiatan pasca APBD Perubahan antara lain:

1. Mengidentifikasi program/kegiatan dari sub-kegiatan dalam APBD Perubahan yang menjadi kewenangan kecamatan dari dokumen SIPD pelaksanaan.
2. Mengidentifikasi program/kegiatan dari sub-kegiatan dalam APBD Perubahan yang dialokasikan untuk kelurahan dari dokumen SIPD pelaksanaan yang mengintervensi layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Memilah rincian belanja atau aktivitas yang ditujukan untuk sasaran dan pencapaian layanan percepatan pencegahan serta penurunan stunting.

Waktu Pelaksanaan:

Penandaan pelaksanaan program/kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pasca APBD Perubahan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Pelaksana dan penanggung jawab:

Operator kecamatan, verifikator kecamatan dan Camat

Adapun langkah penandaan Program/Kegiatan APBD Kab/Kota Tahun berjalan sebagai berikut:

1. Operator kecamatan melakukan pemilahan program/kegiatan berdasarkan sub kegiatan dalam DPA SKPD perubahan yang menjadi kewenangan kecamatan berdasarkan dokumen SIPD;
2. Selanjutnya pada subkegiatan yang telah ditandai, operator kecamatan menandai belanja/aktifitas pada akun belanja yang ditujukan kepada sasaran, layanan maupun kegiatan bimbingan dan pengawasan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Belanja/aktifitas yang ditandai dapat lebih dari satu dalam sub kegiatan;
3. Operator kecamatan melakukan input hasil penandaan belanja/aktifitas ke dalam web aksi bangda yang meliputi kode rekening belanja, uraian belanja, koefisien/volume, satuan, harga satuan serta total belanja;
4. Camat melakukan pemeriksaan ulang hasil input dalam web dengan membahas bersama Kepala puskesmas, PLKB, Perangkat Daerah di kecamatan, Kepala Desa, dan Lurah dikaitkan dengan hasil pra-musrenbang kecamatan tematik stunting dan dilanjutkan dengan persetujuan (Approved) oleh Camat.

KELUARAN PENANDAAN APBD TAHUN BERJALAN PASKA PERUBAHAN:

Dokumen yang berisi hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD Perubahan sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan

7. Penilaian hasil Monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting kecamatan

Penilaian hasil monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting merupakan tahapan dalam aksi konvergensi di kecamatan yang dilaksanakan dalam rangka evaluasi capaian pelaksanaan aksi konvergensi di kecamatan.

Ada 2 hal yang dilaksanakan dalam tahapan ini, yaitu:

1. Identifikasi Capaian Layanan, Realisasi Program/Kegiatan Dan Penyampaian Laporan Semester II

Identifikasi capaian layanan APBD, APBDes, Swadaya dan Swasta merupakan bagian dari tahapan penguatan pelaksanaan yang menghasilkan dokumen identifikasi realisasi anggaran (APBDes, swadaya masyarakat, dan kemitraan), capaian layanan serta masalah yang dihadapi di suatu wilayah pada akhir semester 2.

Gambar 11 Alur Pencatatan Capaian Layanan Kecamatan Semester II



Adapun langkah-langkahnya:

- Operator melakukan input pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting sampai dengan juni tahun berjalan yang terdiri dari:
 - a. Pemutakhiran data sasaran (yang terdapat dalam analisis situasi)
 - b. Pemutakhiran capaian layanan
 - c. realisasi program/kegiatan sampai dengan Desember tahun berjalan yang bersumber dari APBDes, swasta, swadaya masyarakat
 - d. permasalahan dan kendala layanan

- Verifikator melakukan pemeriksaan atas kebenaran dan kelengkapan data dan dilanjutkan dengan verifikasi.
- Setelah data terverifikasi, Camat melakukan persetujuan (approval).

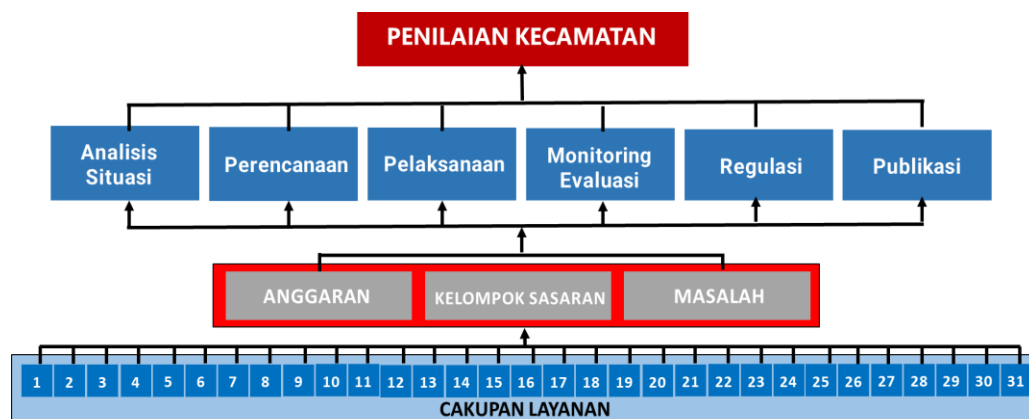
KELUARAN CAPAIAN LAYANAN, REALISASI PROGRAM/KEGIATAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN SEMESTER II:

Dokumen yang berisi hasil identifikasi realisasi anggaran (APBDes, swadaya masyarakat, dan kemitraan), capaian layanan serta masalah yang dihadapi di suatu wilayah pada akhir semester 2.

2. Penilaian Hasil Monitoring Dan Evaluasi Kecamatan

Penilaian hasil monitoring dan evaluasi kecamatan merupakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di kecamatan dalam rangka memberikan umpan balik dan pembelajaran bagi pemerintah terkait kinerja kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang telah dilaksanakan.

Gambar 12 Alur pelaksanaan Penilaian Hasil Monitoring dan Evaluasi Kecamatan



Berdasarkan identifikasi capaian layanan, realisasai anggaran dan permasalahan maka dilakukan penilaian hasil

pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas setiap tahapan aksi konvergensi kecamatan yang meliputi:

- a. Hasil pelaksanaan Analisis Situasi;
- b. Hasil pelaksanaan penguatan perencanaan;
- c. Hasil pelaksanaan penguatan pelaksanaan;
- d. Hasil pelaksanaan dukungan regulasi; dan
- e. Hasil pelaksanaan publikasi.

Waktu Pelaksanaan:

Penilaian Hasil Monitoring dan Evaluasi Kecamatan dilaksanakan pada bulan Desember tahun berjalan.

Penyelenggara:

Camat

Peserta:

- Kepala Desa/Lurah
- OPD/UPTD di kecamatan
- Kepala Puskesmas
- Cabang Dinas Pendidikan
- Pendamping program
- TP-PKK
- Kapolsek
- Danramil
- Swasta

Proses pelaksanaan:

- a. Penilaian Hasil Monitoring dan Evaluasi Kecamatan dipimpin oleh Camat.
- b. Camat menyampaikan data sasaran termutakhir, capaian layanan dan realisasi program/kegiatan untuk dilakukan klarifikasi dan konfirmasi kembali kepada peserta.
- c. Camat menyampaikan hasil penilaian (skoring) dari web aksi bangda dengan hasil tumbuh, berkembang dan berdaya.
- d. Peserta memberikan klarifikasi dan konfirmasi (umpan balik) atas data sasaran termutakhir, capaian layanan dan realisasi

program/kegiatan (jika ada perbaikan dilakukan perbaikan pada saat itu juga).

- e. Camat melakukan persetujuan (approval) setelah ada klarifikasi dan konfirmasi peserta yang hadir atas data sasaran termutakhir, capaian layanan dan realisasi program/kegiatan yang tercatat dalam web aksi bangsa
- f. Skoring pelaksanaan tahapan aksi konvergensi di kecamatan.

KELUARAN PENILAIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KECAMATAN :

- a. Dokumen yang berisi hasil monitoring pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi: analisis situasi, penguatan perencanaan, penguatan pelaksanaan, dukungan regulasi dan publikasi terkait masalah yang dihadapi dan tindaklanjutnya.
- b. Dokumen yang berisi hasil penilaian pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi: analisis situasi, penguatan perencanaan, penguatan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dukungan regulasi dan publikasi. Hasil penilaian aksi konvergensi di masing-masing wilayah maupun daerah dikelompokkan dalam klasifikasi Tumbuh, Berkembang dan Berdaya. Penilaian hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi.

C. AKSI PENDUKUNG:

1. Dukungan regulasi

Dalam pelaksanaan aksi konvergensi kecamatan ini, diperlukan dukungan regulasi/kebijakan guna memastikan setiap tahapan aksi konvergensi berjalan semestinya. Dukungan regulasi sangat penting dalam pelaksanaan aksi konvergensi percepatan pencegahan penurunan stunting di tingkat kecamatan untuk memastikan koordinasi antar sektor di kecamatan agar bekerja sama dalam satu arah dan memastikan semua pihak memiliki tanggung jawab yang jelas. Dan dengan adanya regulasi juga memungkinkan partisipasi masyarakat, LSM, dan pihak swasta dalam mendukung Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, mendorong keterlibatan aktif dari berbagai pihak yang mungkin tidak terlibat langsung di pemerintahan.

2. Publikasi

Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting harus terinformasikan dengan baik kepada semua pihak. Bentuk publikasi dapat dilakukan melalui web aksi bangsa, setiap tahapan aksi konvergensi jika sudah terinput dan disetujui oleh camat adalah bagian dari publikasi aksi konvergensi.

BAB III

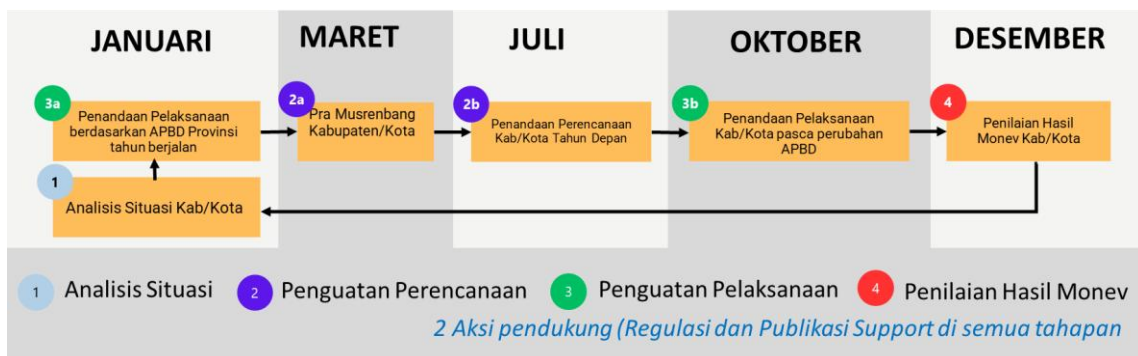
AKSI KONVERGENSI KABUPATEN/KOTA

A. PENGANTAR

Pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota sangat penting karena stunting merupakan isu kesehatan dan pembangunan yang kompleks serta memerlukan pendekatan lintas sektor. Stunting, atau kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah usia lima tahun akibat kekurangan gizi kronis, memiliki dampak jangka panjang yang bisa mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mengoordinasikan upaya-upaya lintas sektor untuk mencapai penurunan stunting yang signifikan.

Tujuan utama dari aksi konvergensi ini adalah menurunkan angka prevalensi stunting di kabupaten dan kota dengan cara meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, gizi, serta intervensi yang mendukung kesehatan lingkungan. Secara khusus, inisiatif ini menargetkan ibu hamil, bayi, balita, dan keluarga rentan agar mereka dapat menerima perhatian lebih dalam hal pemenuhan gizi dan Kesehatan. Dengan koordinasi yang baik di tingkat lokal, setiap intervensi dapat dilaksanakan dengan lebih tepat sasaran dan efisien, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah daerah dapat merancang dan menerapkan kebijakan yang lebih responsif serta memobilisasi sumber daya lokal secara optimal.

Gambar 13 Siklus Aksi Konvergensi Kabupaten/Kota



B. TAHAPAN AKSI KONVERGENSI KABUPATEN/KOTA

Dalam pelaksanaannya aksi konvergensi di tingkat kabupaten dan kota meliputi beberapa aspek kunci sebagai Langkah pemerintah daerah dalam mencapai tujuan konvergensi. Langkah-langkah pelaksanaan aksi konvergensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui isian form menggunakan web monitoring aksi.

Tahapan aksi konvergensi kabupaten/kota meliputi:

1. Aksi Utama meliputi:
 - a. Analisis Situasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting kabupaten/kota
 - b. Penguatan Perencanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting kabupaten/kota
 - c. Penguatan Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting kabupaten/kota
 - d. Penilaian hasil Monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting kabupaten/kota
2. Aksi Pendukung meliputi:
 - a. Dukungan Regulasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting
 - b. Publikasi pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Sebelum tahapan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten/kota, maka dengan dikoordinir oleh Bappeda menetapkan:

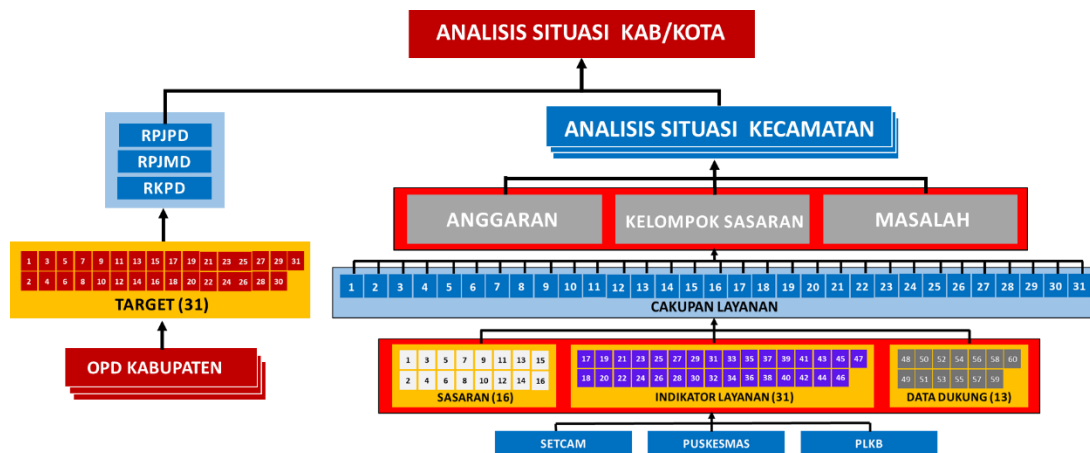
- a. Operator masing-masing perangkat daerah penanggung jawab pelaksanaan intervensi gizi yang bertugas melakukan input data dalam web aksi bangda.
- b. Verifikator masing-masing perangkat daerah penanggung jawab pelaksanaan intervensi gizi yang bertugas melakukan verifikasi terhadap data yang terinput dalam web aksi bangda.
- c. Approval adalah Kepala perangkat daerah bidang perencanaan.
- d. Operator dan verifikator masing-masing perangkat daerah penanggung jawab pelaksanaan intervensi gizi akan diberikan akun khusus untuk dapat mengakses web aksi bangda.
- e. Pemilihan dan penetapan operator dan verifikator ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perangkat daerah.

- f. Operator dan verifikator ditetapkan melalui surat keputusan kepala perangkat daerah.

1. Analisis Situasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota

Analisis situasi merupakan analisis lintas sektor untuk memahami perkembangan prevalensi *stunting*, pola sebaran prevalensi *stunting*, dan mengidentifikasi penyebabnya berdasarkan analisis penyebab kesenjangan layanan dan analisis kendala dalam penyampaian layanan bagi kelompok sasaran secara lengkap dan konvergen.

Gambar 14 Alur pelaksanaan analisis situasi Kabupaten/Kota



Hasil yang diharapkan dari analisis situasi meliputi:

1. Adanya informasi perkembangan prevalensi stunting dan pola sebarannya serta memahami penyebabnya;
2. Adanya target prevalensi stunting berdasarkan dokumen perencanaan
3. Adanya target capaian layanan berdasarkan indikator intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting
4. Adanya evaluasi capaian layanan berdasarkan indikator intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting
5. Adanya kesepakatan perangkat daerah lintas sektor terhadap:
 - a) Intervensi gizi yang akan diprioritaskan perbaikannya pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya;
 - b) Tindakan perbaikan/penyesuaian yang akan dilakukan tiap perangkat daerah terkait dalam perencanaan, penganggaran, dan strategi pelaksanaan Intervensi;

- c) Peran/dukungan yang diperlukan dari kecamatan, desa, dan kelurahan dalam pelaksanaan intervensi yang diprioritaskan.

Ruang Lingkup:

1. Identifikasi target prevalensi stunting dan target capaian indikator layanan.
2. Analisis perkembangan prevalensi, pola sebaran prevalensi *stunting* dalam wilayah kabupaten/kota, dan faktor yang mempengaruhi pola sebaran;
3. Analisis perkembangan cakupan intervensi layanan pada kelompok sasaran berdasarkan target indikator layanan;
4. Analisis penyebab kesenjangan cakupan intervensi gizi (dari aspek perubahan perilaku/demand, aspek ketersediaan layanan/supply, aspek tata kelola/enabling);
5. Analisis kendala penyampaian intervensi pada kelompok sasaran secara lengkap dan serentak (antara lain kendala data kelompok sasaran, kendala koordinasi pelaksanaan antar sektor, koordinasi perangkat daerah dengan kecamatan/desa/kelurahan);
6. Review ketersediaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan untuk mengatasi hasil analisis penyebab kesenjangan cakupan intervensi gizi dan hasil analisis kendala penyampaian intervensi.

Penanggung Jawab dan Pelaksana

Penanggung jawab pelaksanaan analisis situasi adalah Bappeda dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah teknis penanggung jawab layanan.

Waktu Pelaksanaan

Analisis Situasi dilakukan paling lambat bulan Februari tahun berjalan (setelah seluruh kecamatan melakukan analisis situasi).

Tahapan Pelaksanaan Analisis Situasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

a. Persiapan

- 1) Berdasarkan data hasil analisis situasi di kecamatan yang terinput dalam web aksi bangsa, Bappeda memberikan pernyataan sebagai data sasaran dan capaian layanan intervensi.
- 2) Dinas Kesehatan melalui operatornya melakukan penginputan data hasil pengukuran balita bulan Agustus tahun sebelumnya

dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh verifikator Dinas Kesehatan.

- 3) Bappeda melakukan input target prevalensi stunting sesuai dengan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), selanjutnya dilakukan verifikasi oleh verifikator Bappeda.
- 4) Masing-masing perangkat daerah melakukan input target capaian layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting sesuai indikator layanan pada perangkat daerah masing-masing berdasarkan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renja)
- 5) Bappeda mengkoordinasikan perangkat daerah penanggung jawab pelaksanaan intervensi gizi untuk melakukan analisis kebutuhan intervensi berdasarkan hasil olah data web aksi bangsa.
- 6) Hasil yang diharapkan dalam persiapan adalah terkumpulnya data dengan meta data sesuai dan telah dilakukan verifikasi serta validasi untuk dilakukan analisis kebutuhan intervensi oleh masing-masing perangkat daerah.

b. Pelaksanaan analisis situasi

Setelah persiapan analisis situasi dilanjutkan dengan pelaksanaan analisis situasi dengan sekurang-kurangnya meliputi:

- i. Rapat terpadu lintas perangkat daerah untuk mereview perkembangan prevalensi stunting, dan cakupan intervensi gizi.

Agenda utama rapat lintas sektor ini meliputi:

1. Review perkembangan prevalensi dan pola sebaran prevalensi stunting dalam wilayah kabupaten/kota;
2. Pemaparan hasil analisis perangkat daerah yang membidangi urusan Kesehatan perihal faktor yang mempengaruhi kejadian stunting di wilayah kabupaten/kota;
3. Review target prevalensi dan target indikator layanan dan potensi ketercapaiannya;
4. Review perkembangan cakupan layanan intervensi gizi untuk mengidentifikasi intervensi gizi 'yang menjadi masalah' karena cakupan layanannya yang rendah/relatif tertinggal dibanding intervensi gizi lain;

5. Identifikasi lokasi/wilayah 'yang menjadi masalah' karena memiliki prevalensi stunting yang relatif tinggi dan cakupan layanan yang rendah di sebagian besar intervensi gizi;
 6. Identifikasi lokasi/wilayah 'yang menjadi masalah' karena relatif tingginya prevalensi stunting meskipun memiliki cakupan layanan yang baik di sebagian besar intervensi gizi.
- ii. Rapat internal perangkat daerah penanggung jawab pelaksanaan intervensi gizi, untuk mengidentifikasi:
1. penyebab kesenjangan cakupan layanan pada skala kabupaten/kota dan/atau pada skala wilayah tertentu;
 2. kendala penyampaian layanan kepada kelompok sasaran, baik secara umum maupun secara khusus pada wilayah tertentu;
 3. tindakan perbaikan yang perlu dilakukan perangkat daerah bersangkutan dan tindakan yang diperlukan dari perangkat daerah lain;
 4. kegiatan pada tahun anggaran berjalan yang dapat digunakan perangkat daerah bersangkutan untuk melaksanakan tindakan perbaikan;
 5. usulan kegiatan tahun berikutnya untuk tindakan perbaikan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.
- iii. Rapat terpadu lintas perangkat daerah untuk membahas hasil analisis masing-masing perangkat daerah dan untuk menyepakati:
1. intervensi gizi yang akan diprioritaskan perbaikannya pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya;
 2. tindakan perbaikan/penyesuaian yang akan dilakukan tiap perangkat daerah terkait dalam perencanaan, penganggaran, dan strategi pelaksanaan intervensi;
 3. peran/dukungan yang diperlukan dari kecamatan, desa, dan kelurahan dalam pelaksanaan intervensi yang diprioritaskan;
 4. rekomendasi hasil analisis situasi untuk penyusunan rencana kegiatan.
 5. Usulan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.

6. Kepala Bappeda melakukan persetujuan (approved) dalam web aksi bangsa terhadap hasil akhir analisis situasi.

Metode Pelaksanaan Analisis Situasi

Analisis Situasi dilakukan dengan metode yaitu *brainstorming*, FGD, dan analisis sederhana.

Data dan informasi untuk kebutuhan analisis;

- a) Prevalensi stunting yang dirinci tiap desa/kelurahan/kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota.
- b) Capaian indikator layanan yang dibutuhkan sasaran dirinci tiap desa/kelurahan/kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota.
- c) Data sasaran yang dirinci tiap desa/kelurahan/kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota.

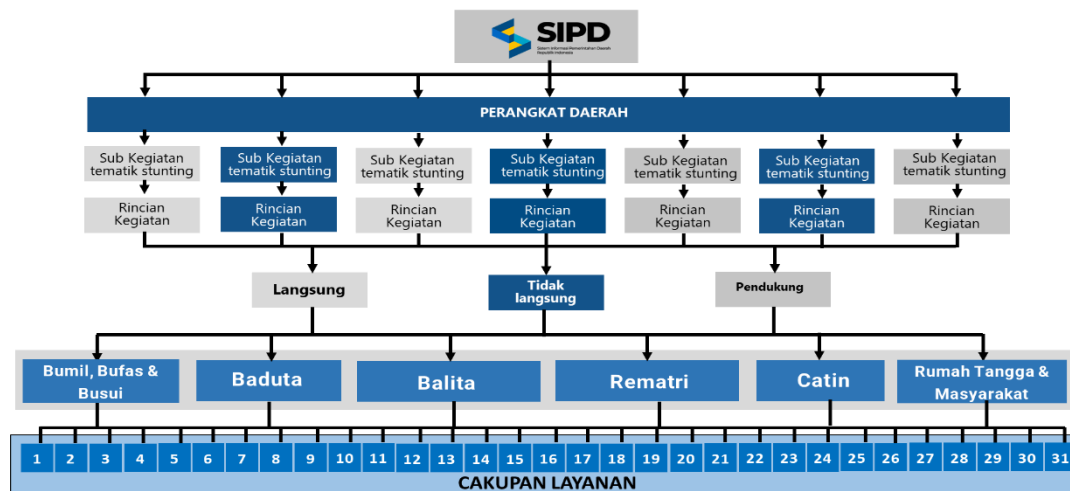
KELUARAN ANALISIS SITUASI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN/KOTA :

Dokumen hasil analisis tentang target dan capaian anggaran, cakupan layanan serta masalah yang dihadapi dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota yang meliputi indikator, kelompok sasaran, penyebab masalah dan solusinya sebagai program prioritas

2. Pelaksanaan Penandaan APBD Kabupaten/kota Tahun berjalan

Penandaan pelaksanaan APBD Kabupaten/kota Tahun Berjalan merupakan bagian pertama tahapan Penguatan Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting kabupaten/kota dengan tujuan memastikan tersedianya program kegiatan intervensi gizi teralokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota tahun berjalan.

Gambar 15 Alur pelaksanaan penandaan APBD Kabupaten/Kota tahun berjalan



Tujuan

Penandaan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun berjalan bertujuan melakukan penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan.

Hasil yang diharapkan

- Adanya hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan;

Penanggung Jawab

Bappeda dan Perangkat daerah pengampun layanan, dan kantor perwakilan pusat di daerah.

Jadwal

Penandaan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun berjalan dilakukan setelah Analisis Situasi dan paling lambat Bulan Februari tahun berjalan

Tahapan Pelaksanaan

1. Bappeda melakukan konsolidasi antar sektor melalui desk perencanaan dan penganggaran yang mendukung penurunan *stunting* tahun anggaran berjalan berdasarkan dokumen SIPD;
2. Selanjutnya masing-masing Perangkat Daerah melakukan penandaan rincian belanja/aktifitas pada kegiatan/subkegiatan tematik *stunting* melalui operator perangkat daerah dalam web aksi bangda.
3. Setelah selesai input, verifikator perangkat daerah melakukan verifikasi.
4. Bappeda mengkoordinir konsolidasi lintas sektor dalam rangka revidi dukungan anggaran penurunan *Stunting* tahun berjalan.

Metode

- a) Desk secara luring atau daring;
- b) *Workshop*;
- c) Rapat koordinasi.

KELUARAN PENANDAAN APBD KABUPATEN/KOTA TAHUN BERJALAN:

Dokumen yang berisi hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik *stunting* dalam APBD tahun berjalan sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan.

3. Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota (Pra-Musrenbang Kab/Kota) tematik *stunting*

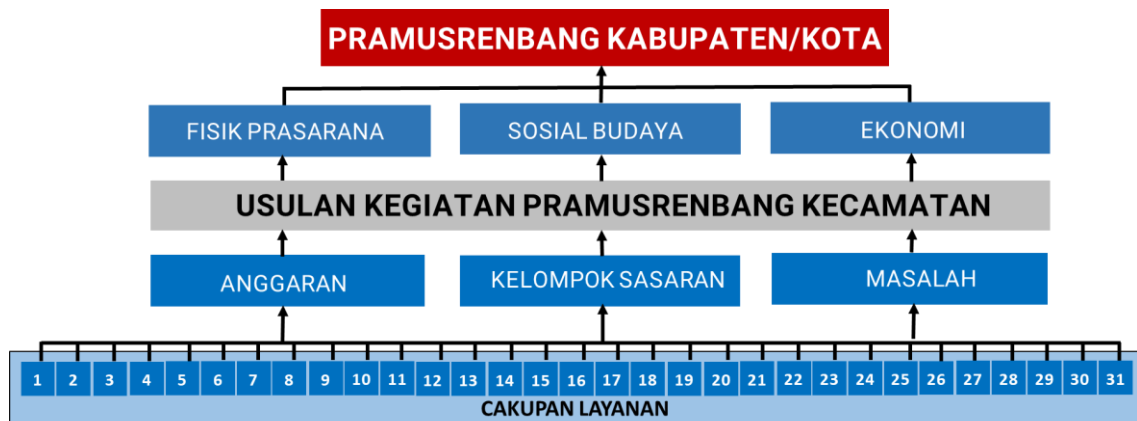
Pra-musrenbang Kabupaten/kota tematik *stunting* merupakan forum pertemuan antar *stakeholders* di tingkat kabupaten/kota untuk mengevaluasi pencapaian dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di wilayah kabupaten/kota, usulan program/kegiatan intervensi dan mengapresiasi peran, kinerja dari berbagai lembaga/pelaku dan kecamatan.

Pra-Musrenbang Kabupaten/kota tematik *stunting* merupakan bagian pelaksanaan tahapan penguatan perencanaan

Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dan dilaksanakan sebelum pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) kabupaten/kota tematik stunting.

Pra-Musrenbang Kabupaten/Kota tematik stunting dilakukan setelah diperoleh hasil analisis situasi dan Penandaan Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota Tahun berjalan termasuk hasil musrenbang kecamatan yang merupakan bagian yang dibahas dalam Pra-Musrenbang Kabupaten/Kota tematik stunting.

Gambar 16 Alur pelaksanaan Pramusrenbang Kabupaten/Kota



Tujuan

Pra-Musrenbang Kabupaten/Kota tematik stunting bertujuan untuk:

1. Melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah kabupaten/kota dalam percepatan pencegahan/penurunan *stunting* berdasarkan hasil analisis situasi.
2. Merumuskan usulan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Melakukan pemilahan usulan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dalam kategori Fisik Prasarana, Sosial budaya dan Ekonomi.
4. Mendeklarasikan komitmen pimpinan kabupaten/kota, DPRD, pimpinan OPD, kecamatan, desa/kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya untuk merealisasikan rencana kegiatan percepatan pencegahan/penurunan *stunting*.
5. Memberikan apresiasi kepada perangkat daerah/lembaga/pelaku yang dinilai berkinerja baik dalam

mendukung kabupaten/kota meningkatkan cakupan, kualitas, dan konvergensi intervensi gizi.

Proses pelaksanaan:

1. Pra-musrenbang kabupaten/kota tematik stunting dipimpin oleh Kepala Daerah atau yang ditunjuk.
2. Penyampaian hasil analisis situasi dan hasil penandaan anggaran rincian belanja dan aktivitas intervensi percepatan pencegahan penurunan stunting.
3. Expose Rencana Kegiatan Percepatan Pencegahan/Penurunan Stunting Kab/Kota (meliputi kegiatan OPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan) tahun berjalan dan tahun depan.
4. Pemilahan usulan program/kegiatan ke dalam dokumen perencanaan daerah berdasarkan kelompok perencanaan yaitu Fisik prasarana dan sarana, sosial budaya dan ekonomi.
5. Deklarasi komitmen pimpinan kabupaten/kota, DPRD, pimpinan OPD, camat, desa/kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya untuk merealisasikan rencana kegiatan.
6. Pemerian apresiasi kepada perangkat daerah/lembaga/pelaku yang dinilai berkinerja baik dalam mendukung kabupaten/kota meningkatkan cakupan, kualitas, dan konvergensi intervensi gizi.

Penanggungjawab/Pelaksana

Sekretaris Daerah dengan dibantu Bappeda

Peserta

Peserta Pra-Musrenbang Kabupaten/Kota adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bappeda, OPD penanggung jawab layanan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran, Badan/Kantor Perwakilan Kementerian Teknis di daerah, unsur PKK, para camat dan kepala Desa/Kelurahan, pendamping dan fasilitator program terkait, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pelaku media, serta unsur-unsur lainnya

Jadwal:

Waktu penyelenggaraan Pra-Musrenbang Kabupaten/Kota tematik stunting dilaksanakan pada bulan Maret sebelum pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

**KELUARAN PRA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN/KOTA (PRA-MUSRENBANG KAB/KOTA) TEMATIK STUNTING :**

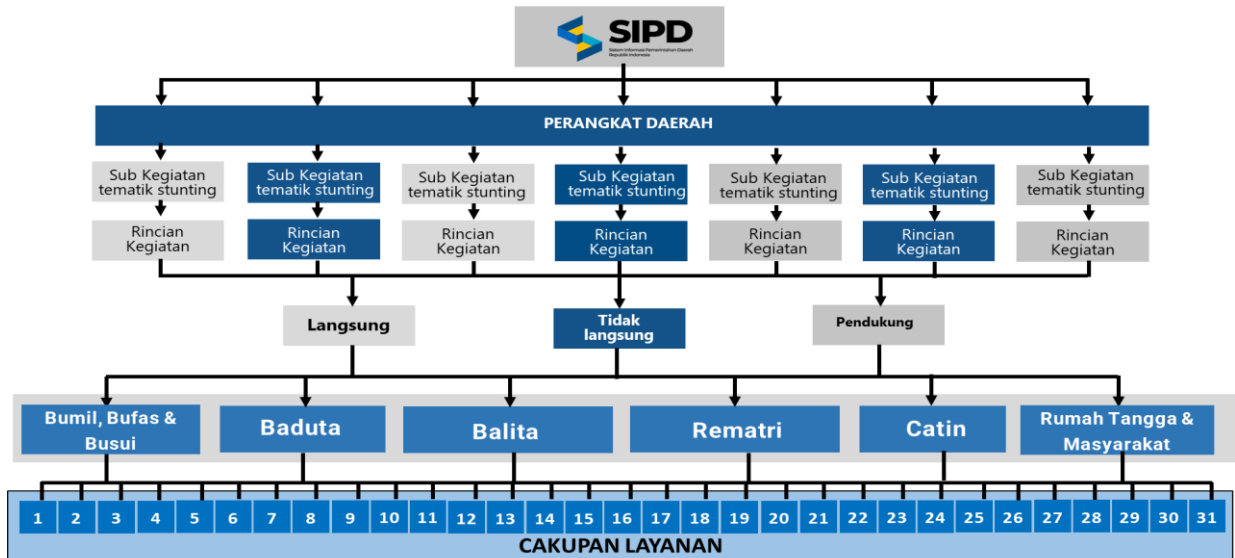
- a. Dokumen yang berisi daftar rencana program/kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting hasil pra-musrenbang kabupaten/kota yang terbagi dalam bidang fisik prasarana, sosial budaya dan ekonomi berdasarkan hasil dari analisis situasi seluruh kecamatan dalam kabupaten/kota dan analisis situasi kabupaten/kota.
- b. Berita Acara hasil pra-musrenbang kabupaten/kota tematik stunting.

4. Penandaan Perencanaan Kabupaten/Kota Tahun depan

Penandaan perencanaan kabupaten/Kota tahun depan merupakan bagian tahapan penguatan perencanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka memastikan hasil rumusan usulan kegiatan tahun depan dalam pra-musrenbang kab/kota terakomodir dalam rencana anggaran tahun depan.

Hasil penandaan perencanaan kabupaten/kota tahun depan berupa penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan dari Subkegiatan tematik stunting dalam rencana anggaran kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam SIPD perencanaan.

Gambar 17 Alur pelaksanaan penandaan perencanaan Kabupaten/Kota tahun depan



Waktu Pelaksanaan:

Penandaan perencanaan program/kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting tahun depan dilaksanakan pada bulan Juli tahun berjalan.

Penanggung Jawab dan Pelaksana:

Bappeda dan perangkat daerah penanggungjawab intervensi.

Tahapan Pelaksanaan

1. Bappeda melakukan konsolidasi antar sektor melalui desk perencanaan dan penganggaran yang mendukung penurunan *stunting* tahun anggaran rencana berdasarkan dokumen SIPD;
2. Selanjutnya masing-masing Perangkat Daerah melakukan penandaan rumusan usulan program/kegiatan hasil pra-musrenbang kabupaten/kota dengan dokumen rencana anggaran tahun depan yang tertuang dalam SIPD perencanaan.
3. Selanjutnya pada sub kegiatan yang telah ditandai, dilakukan penandaan terhadap belanja/aktifitas pada akun belanja yang ditujukan kepada sasaran, layanan maupun kegiatan bimbingan dan pengawasan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Belanja/aktifitas yang ditandai dapat lebih dari satu dalam sub kegiatan.

4. Hasil penandaan diinput pada web aksi bangsa yang meliputi kode rekening belanja, uraian belanja, koefisien/volume, satuan, harga satuan serta total belanja, kemudian di verifikasi oleh verifikator masing-masing perangkat daerah.
5. Bappeda melakukan konsolidasi dalam rangka reviu dukungan anggaran penurunan *Stunting* tahun depan.

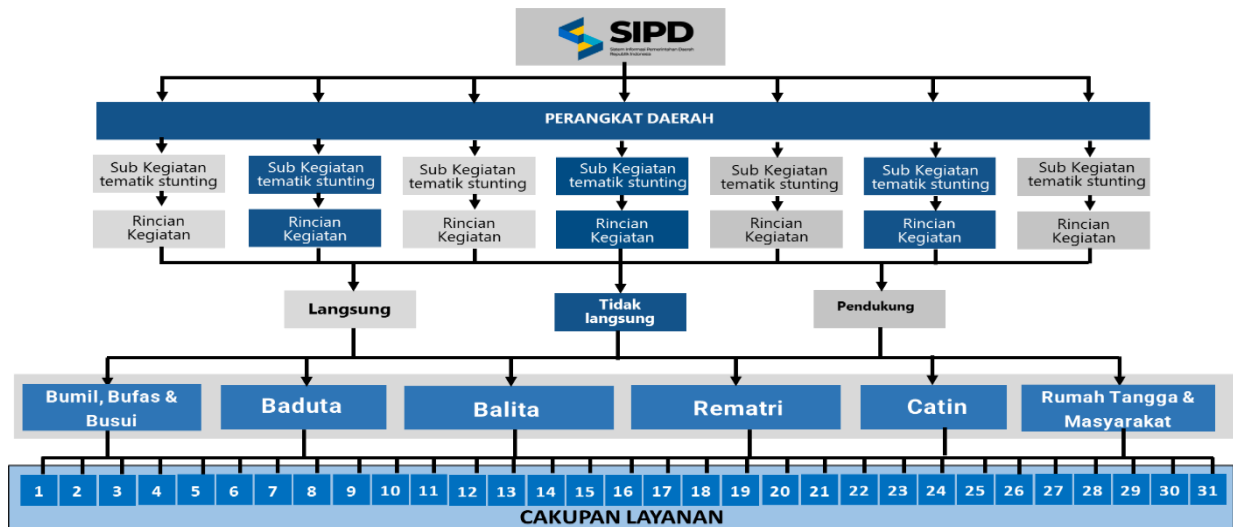
KELUARAN PENANDAAN PERENCANAAN KABUPATEN/KOTA TAHUN DEPAN :

Dokumen hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan dari Subkegiatan tematik dalam rencana anggaran kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam SIPD perencanaan pada perangkat daerah kabupaten/kota tertentu;

5. Pelaksanaan Penandaan APBD Kabupaten/Kota pasca Perubahan

Penandaan program/kegiatan tahun berjalan merupakan bagian dari tahapan penguatan pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, yang bertujuan untuk melakukan penandaan anggaran dan pemetaan program/kegiatan tahun berjalan setelah adanya APBD Perubahan.

Gambar 18 Alur pelaksanaan penandaan APBD Kabupaten/Kota pasca perubahan



Kegiatan Penandaan Program/Kegiatan pasca APBD Perubahan antara lain:

- Mengidentifikasi program/kegiatan dari sub-kegiatan dalam APBD Perubahan dari dokumen SIPD pelaksanaan.
- Memilah rincian belanja atau aktivitas yang ditujukan untuk sasaran dan pencapaian layanan percepatan pencegahan serta penurunan stunting.

Waktu Pelaksanaan:

Penandaan pelaksanaan program/kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Pelaksana dan penanggung jawab:

Bappeda dan perangkat daerah penanggungjawab intervensi.

Adapun langkah penandaan program/kegiatan paska APBD Perubahan sebagai berikut:

1. Operator Bappeda dan perangkat daerah penanggungjawab intervensi melakukan penandaan/tagging berdasarkan kode belanja terkait program/kegiatan percepatan penurunan dan pencegahan stunting yang bersumber dari APBD tahun berjalan.
2. Selanjutnya melakukan pemilahan terhadap program/kegiatan yang mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam APBD Perubahan.

3. Terhadap program/kegiatan yang berubah, selanjutnya Operator melakukan penandaan/tagging meliputi kode rekening belanja, uraian belanja, koefisien/volume, satuan, harga satuan serta total belanja dan di input dalam web aksi bangsa terhadap perubahan dimaksud
4. Hasil input selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan verifikasi oleh verifikator.
5. Bappeda melakukan persetujuan (approval) dalam web aksi bangsa terhadap data-data penandaan/tagging atas program/kegiatan setelah terjadi perubahan APBD.

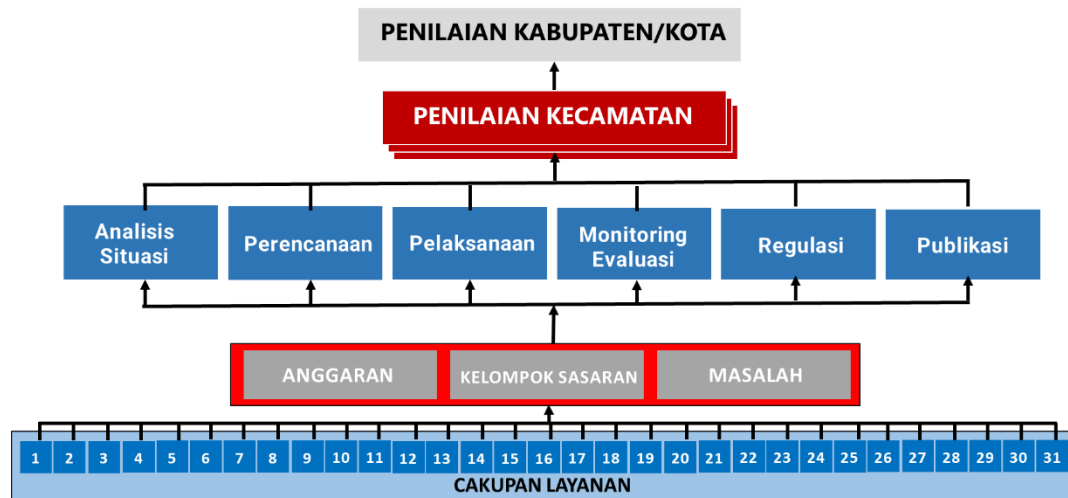
KELUARAN PENANDAAN APBD KABUPATEN/KOTA PASCA PERUBAHAN :

Dokumen yang berisi hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD perubahan sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan.

6. Penilaian hasil Monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota

Penilaian hasil monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting merupakan tahapan dalam aksi konvergensi di kabupaten/kota yang dilaksanakan dalam rangka evaluasi capaian pelaksanaan aksi konvergensi.

Gambar 19 Alur Penilaian hasil Monitoring dan Evaluasi Kabupaten/Kota



Berdasarkan penilaian hasil monitoring dan evaluasi seluruh kecamatan terhadap capaian layanan, realisasi anggaran dan permasalahan penyampaian layanan terhadap kelompok sasaran dilakukan penilaian hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi kabupaten/kota.

Waktu Pelaksanaan:

Penilaian Hasil Monitoring dan Evaluasi Kabupaten/Kota dilaksanakan pada bulan Desember tahun berjalan.

Penyelenggara:

Sekda dibantu Bappeda

Proses pelaksanaan:

- Sekretaris daerah dibantu Bappeda memastikan seluruh kecamatan telah melakukan penilaian hasil monitoring dan evaluasi aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.
- Sekretaris Daerah dibantu Bappeda menyampaikan hasil penilaian (skoring) dari web aksi bangsa dengan hasil tumbuh, berkembang dan berdaya.
- meminta kepada setiap perangkat daerah menyampaikan hasil-hasil pelaksanaan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.

- d. Perangkat daerah menyampaikan capaian intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan tanggung-jawab masing-masing.
- e. Peserta memberikan klarifikasi dan konfirmasi (umpan balik) atas data sasaran termutakhir, capaian layanan dan realisasi program/kegiatan (jika ada perbaikan dilakukan perbaikan pada saat itu juga).
- f. Sekretaris Daerah dibantu Bappeda melakukan persetujuan (approval) setelah ada klarifikasi dan konfirmasi peserta yang hadir atas data sasaran termutakhir, capaian layanan dan realisasi program/kegiatan yang tercatat dalam web aksi bangda.
- g. Skoring pelaksanaan tahapan aksi konvergensi di kabupaten/kota.

KELUARAN PENILAIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN/KOTA:

Dokumen hasil penilaian pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi: analisis situasi, penguatan perencanaan, penguatan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dukungan regulasi dan publikasi. Hasil penilaian aksi konvergensi di masing-masing wilayah maupun daerah dikelompokkan dalam klasifikasi Tumbuh, Berkembang dan Berdaya.

C. AKSI PENDUKUNG:

1. Dukungan regulasi

Dalam pelaksanaan aksi konvergensi kabupaten/kota, diperlukan dukungan regulasi/kebijakan guna memastikan setiap tahapan aksi konvergensi berjalan semestinya. Dukungan regulasi sangat penting dalam pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting untuk memastikan koordinasi antar sektor dapat bekerja sama dalam satu arah dan memastikan semua pihak memiliki tanggung jawab yang jelas.

Selain itu bentuk dukungan regulasi dimaksudkan untuk memperkuat implementasi kebijakan daerah terkait percepatan pencegahan/penurunan stunting di tingkat desa dan kelurahan, partisipasi masyarakat, LSM, dan pihak swasta dalam mendukung Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, mendorong keterlibatan aktif dari berbagai pihak yang mungkin tidak terlibat langsung di pemerintahan.

2. Publikasi

Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting harus terinformasikan dengan baik kepada semua pihak. Bentuk publikasi dapat dilakukan melalui web aksi bangda, setiap tahapan aksi konvergensi jika sudah terinput dan disetujui ditingkat kabupaten/kota adalah bagian dari publikasi aksi konvergensi.

BAB IV

AKSI KONVERGENSI PROVINSI

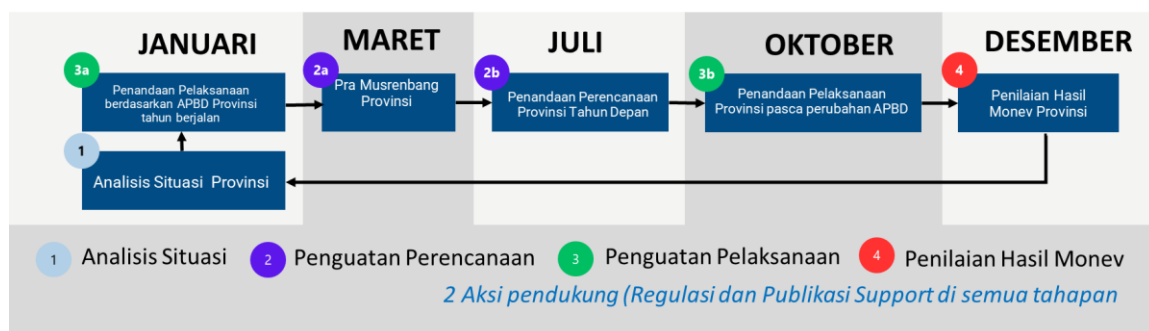
A. PENGANTAR

Stunting merupakan masalah serius yang mengancam kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pemerintah pusat telah menetapkan target nasional untuk menurunkan prevalensi stunting secara signifikan, dan untuk mencapainya diperlukan sinergi dari berbagai level pemerintahan, termasuk peran penting pemerintah provinsi. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan penurunan stunting yang terintegrasi dan terpadu.

Provinsi berperan sebagai fasilitator utama yang menjembatani pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Dalam aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, pemerintah provinsi berfungsi untuk memperkuat koordinasi antar-sektor, memberikan dukungan teknis, serta memobilisasi sumber daya yang diperlukan. Selain itu, provinsi juga memiliki peran dalam memastikan keberlanjutan program dan meningkatkan kapasitas pemerintahan di tingkat kabupaten/kota agar setiap kegiatan penurunan stunting dapat berjalan efektif.

Aksi konvergensi di tingkat provinsi mencakup beberapa upaya kunci, yaitu: penguatan komitmen politik, peningkatan alokasi anggaran, pelatihan dan pendampingan teknis bagi tenaga kesehatan serta kader di lapangan, dan pemantauan serta evaluasi berkala untuk mengukur capaian program di lapangan. Dengan adanya dukungan dan peran aktif dari pemerintah provinsi, diharapkan program penurunan stunting dapat berjalan lebih terarah, optimal, dan mencapai target yang diinginkan.

Gambar 20 Siklus Aksi Konvergensi Provinsi



B. TAHAPAN AKSI KONVERGENSI PROVINSI

Dalam pelaksanaannya aksi konvergensi di Tingkat Provinsi meliputi beberapa aspek kunci sebagai Langkah pemerintah daerah dalam mencapai tujuan konvergensi. Langkah-langkah pelaksanaan aksi konvergensi yang dilakukan oleh Provinsi melalui isian form menggunakan web monitoring aksi.

Tahapan aksi konvergensi Provinsi meliputi:

1. Aksi Utama meliputi:
 - a. Analisis Situasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi
 - b. Penguatan Perencanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi
 - c. Penguatan Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi
 - d. Penilaian hasil Monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi
2. Aksi Pendukung meliputi:
 - a. Dukungan Regulasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting
 - b. Publikasi pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

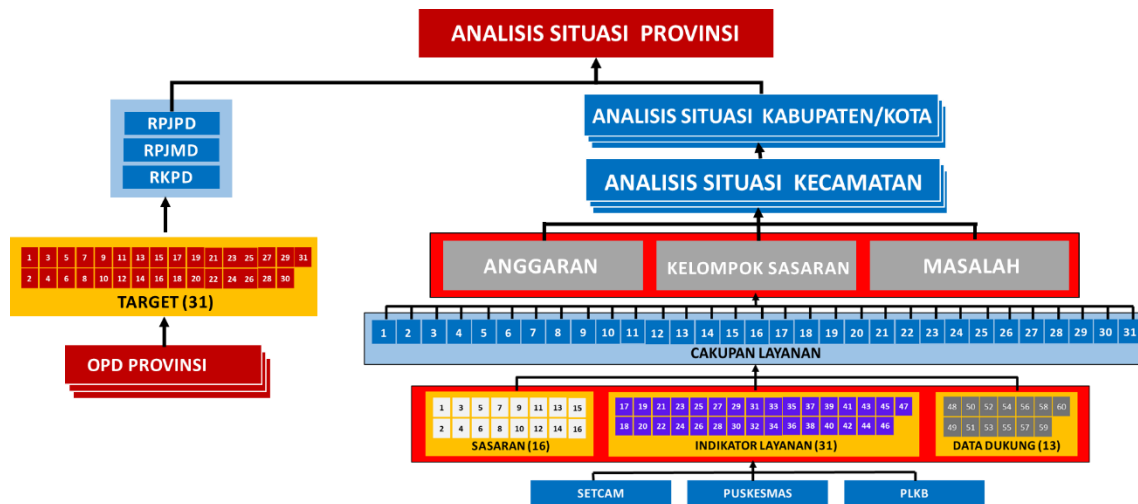
Sebelum tahapan aksi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan di provinsi, maka dengan dikoordinir oleh Bappeda menetapkan:

- a. Operator masing-masing perangkat daerah penanggung jawab pelaksanaan intervensi gizi yang bertugas melakukan input data dalam web aksi bangda.
- b. Verifikator masing-masing perangkat daerah penanggung jawab pelaksanaan intervensi gizi yang bertugas melakukan verifikasi terhadap data yang terinput dalam web aksi bangda.
- c. Operator dan verifikator masing-masing perangkat daerah penanggung jawab pelaksanaan intervensi gizi akan diberikan akun khusus untuk dapat mengakses web aksi bangda.
- d. Pemilihan dan penetapan operator dan verifikator ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perangkat daerah.
- e. Operator dan verifikator ditetapkan melalui surat keputusan kepala perangkat daerah.

1. Analisis Situasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting provinsi

Analisis situasi merupakan analisis lintas sektor untuk memahami perkembangan prevalensi *stunting*, pola sebaran prevalensi *stunting*, dan mengidentifikasi penyebabnya berdasarkan analisis penyebab kesenjangan layanan dan analisis kendala dalam penyampaian layanan bagi kelompok sasaran secara lengkap dan konvergen.

Gambar 21 Alur pelaksanaan Analisis Situasi Provinsi



Hasil yang diharapkan dari analisis situasi meliputi:

1. Adanya informasi perkembangan prevalensi stunting dan pola sebarannya serta memahami penyebabnya;
2. Adanya target prevalensi stunting berdasarkan dokumen perencanaan;
3. Adanya target capaian layanan terhadap indikator intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting
4. Adanya kesepakatan perangkat daerah lintas sektor terhadap:
 - a) Intervensi gizi yang akan diprioritaskan perbaikannya pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya;
 - b) Tindakan perbaikan/penyesuaian yang akan dilakukan tiap perangkat daerah terkait dalam perencanaan, penganggaran, dan strategi pelaksanaan Intervensi;

- c) Peran/dukungan yang diperlukan dari kabupaten/kota dalam pelaksanaan intervensi yang diprioritaskan;

Ruang Lingkup:

1. Identifikasi target prevalensi stunting dan target capaian indikator layanan.
2. Analisis perkembangan prevalensi, pola sebaran prevalensi *stunting* dalam wilayah provinsi, dan faktor yang mempengaruhi pola sebaran;
3. Analisis perkembangan cakupan intervensi layanan pada kelompok sasaran berdasarkan target indikator layanan;
4. Analisis penyebab kesenjangan cakupan intervensi layanan pada kelompok sasaran (dari aspek perubahan perilaku/demand, aspek ketersediaan layanan/supply, aspek tata kelola/enabling);
5. Analisis kendala penyampaian intervensi pada kelompok sasaran secara lengkap dan serentak (antara lain kendala data kelompok sasaran, kendala koordinasi pelaksanaan antar sektor, koordinasi perangkat daerah dengan kabupaten/kota/kecamatan/desa/kelurahan);
6. Review ketersediaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan untuk mengatasi hasil analisis penyebab kesenjangan cakupan intervensi gizi dan hasil analisis kendala penyampaian intervensi.

Penanggung Jawab dan Pelaksana

Penanggung jawab pelaksanaan analisis situasi adalah Bappeda dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah teknis penanggung jawab layanan.

Waktu Pelaksanaan

Analisis Situasi dilakukan paling lambat bulan Maret (setelah seluruh kabupaten/kota melakukan analisis situasi).

Tahapan Pelaksanaan Analisis Situasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

a. Persiapan

- 1) Berdasarkan data hasil analisis situasi di kabupaten yang terinput dalam web aksi bangsa, Bappeda memberikan pernyataan sebagai data sasaran dan capaian layanan intervensi.

- 2) Dinas Kesehatan provinsi melakukan input data hasil pengukuran balita bulan agustus tahun sebelumnya dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh verifikator Dinas Kesehatan.
- 3) Bappeda melakukan input target prevalensi dan capaian layanan berdasarkan indikator layanan sesuai dengan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).
- 4) Masing-masing perangkat daerah melakukan input target capaian layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting sesuai indikator layanan pada perangkat daerah masing-masing berdasarkan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renja)
- 5) Bappeda mengkoordinasikan perangkat daerah penanggung jawab pelaksanaan intervensi gizi untuk melakukan analisis kebutuhan intervensi berdasarkan hasil olah data web aksi bangsa.
- 6) Hasil yang diharapkan dalam persiapan adalah terkumpulnya data kabupaten/kota dan dilakukan analisis kebutuhan intervensi oleh masing-masing perangkat daerah.

b. Pelaksanaan analisis situasi

Setelah persiapan analisis situasi dilanjutkan dengan pelaksanaan analisis situasi dengan sekurang-kurangnya meliputi:

- i. Rapat terpadu lintas perangkat daerah untuk mereview perkembangan prevalensi stunting, dan cakupan intervensi gizi.

Agenda utama rapat lintas sektor ini meliputi:

1. Review perkembangan prevalensi dan pola sebaran prevalensi stunting dalam wilayah provinsi;
2. Pemaparan hasil analisis perangkat daerah yang membidangi urusan Kesehatan perihal faktor yang mempengaruhi kejadian stunting di wilayah provinsi;
3. Review target prevalensi dan target indikator layanan dan potensi ketercapaiannya;
4. Review perkembangan cakupan intervensi layanan pada kelompok sasaran untuk mengidentifikasi intervensi layanan 'yang menjadi masalah' karena cakupan layanannya yang rendah/relatif tertinggal dibanding intervensi gizi lain;
5. Identifikasi lokasi/wilayah 'yang menjadi masalah' karena memiliki prevalensi stunting yang relatif tinggi dan cakupan layanan yang rendah di sebagian besar intervensi layanan;

6. Identifikasi lokasi/wilayah 'yang menjadi masalah' karena relatif tingginya prevalensi stunting meskipun memiliki cakupan layanan yang baik di sebagian besar intervensi layanan.
- ii. Rapat internal perangkat daerah penanggung jawab pelaksanaan intervensi layanan, untuk mengidentifikasi:
 1. penyebab kesenjangan cakupan layanan pada skala provinsi dan/atau pada skala wilayah tertentu;
 2. kendala penyampaian layanan kepada kelompok sasaran, baik secara umum maupun secara khusus pada wilayah tertentu;
 3. tindakan perbaikan yang perlu dilakukan perangkat daerah bersangkutan dan tindakan yang diperlukan dari perangkat daerah lain;
 4. kegiatan pada tahun anggaran berjalan yang dapat digunakan perangkat daerah bersangkutan untuk melaksanakan tindakan perbaikan;
 5. usulan kegiatan tahun berikutnya untuk tindakan perbaikan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.
 - iii. Rapat terpadu lintas perangkat daerah untuk membahas hasil analisis masing-masing perangkat daerah dan untuk menyepakati:
 1. intervensi gizi yang akan diprioritaskan perbaikannya pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya;
 2. tindakan perbaikan/penyesuaian yang akan dilakukan tiap perangkat daerah terkait dalam perencanaan, penganggaran, dan strategi pelaksanaan intervensi;
 3. peran/dukungan yang diperlukan untuk kabupaten/kota dalam pelaksanaan intervensi yang diprioritaskan;
 4. rekomendasi hasil analisis situasi untuk penyusunan rencana kegiatan.
 5. Usulan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Metode Pelaksanaan Analisis Situasi

Analisis Situasi dilakukan dengan metode yaitu *brainstorming*, FGD, dan analisis sederhana.

Data dan informasi untuk kebutuhan analisis;

- a) Prevalensi stunting yang dirinci dalam wilayah provinsi (kabupaten/kota/kecamatan/desa/kelurahan).
- b) Capaian indikator sasaran intervensi layanan pada kelompok sasaran yang dirinci dalam wilayah provinsi (kabupaten/kota/kecamatan/desa/kelurahan)
- c) Data sasaran yang dirinci dalam wilayah provinsi (kabupaten/kota/ kecamatan/desa/ kelurahan).

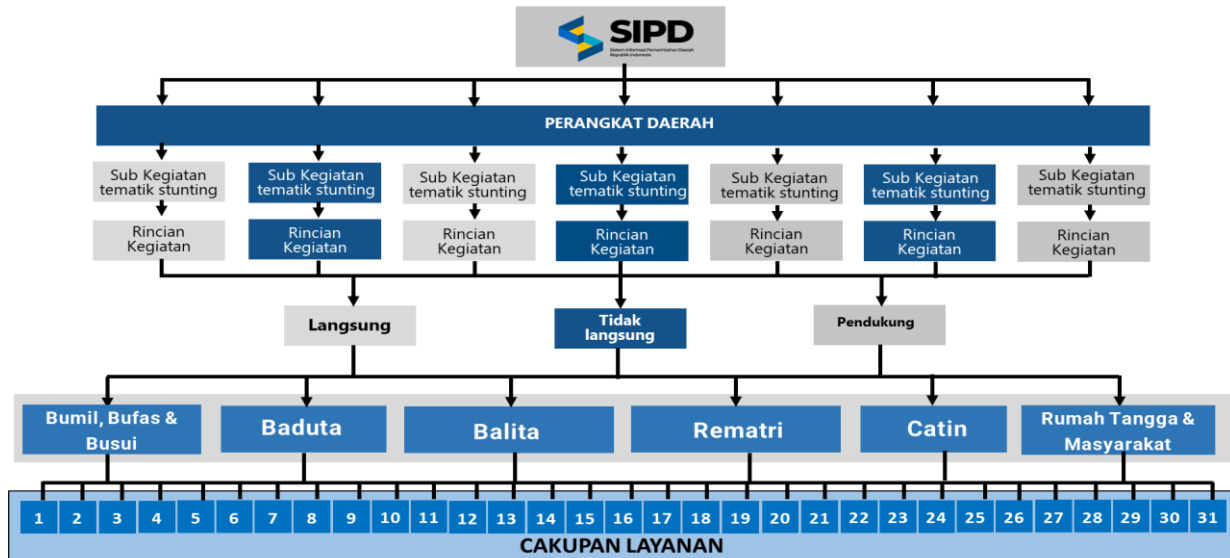
KELUARAN ANALISIS SITUASI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PROVINSI :

dokumen yang berisi hasil analisis tentang target dan capaian anggaran, cakupan layanan serta masalah yang dihadapi dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang meliputi indikator, kelompok sasaran, penyebab masalah dan solusinya sebagai program prioritas.

2. Penandaan Pelaksanaan APBD Provinsi Tahun berjalan

Penandaan pelaksanaan APBD Provinsi Tahun Berjalan merupakan bagian pertama tahapan Penguatan Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dengan tujuan memastikan tersedianya program kegiatan intervensi gizi teralokasikan dalam APBD Provinsi tahun berjalan.

Gambar 22 Alur pelaksanaan Penandaan APBD tahun berjalan



Tujuan

Penandaan Pelaksanaan APBD Provinsi Tahun berjalan bertujuan melakukan penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD Provinsi sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan

Hasil yang diharapkan

- Adanya hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan.

Penanggung Jawab

Bappeda dan Perangkat daerah pengampun layanan, dan kantor perwakilan pusat di daerah.

Jadwal

Penandaan Pelaksanaan APBD Provinsi berjalan dilakukan setelah Analisis Situasi dan paling lambat Bulan Februari tahun berjalan

Tahapan Pelaksanaan

1. Bappeda melakukan konsolidasi antar sektor melalui desk perencanaan dan penganggaran yang mendukung penurunan *stunting* tahun anggaran berjalan berdasarkan dokumen SIPD;
2. Selanjutnya masing-masing Perangkat Daerah melakukan penandaan rincian belanja/aktifitas pada kegiatan/subkegiatan tematik *stunting* melalui operator perangkat daerah dalam web aksi bangda.
3. Setelah selesai input, verifikator perangkat daerah melakukan verifikasi.
4. Bappeda mengkoordinir konsolidasi lintas sektor dalam rangka reviu dukungan anggaran penurunan *Stunting* tahun berjalan.

Metode:

- a) Desk secara luring atau daring;
- b) *Workshop*;
- c) Rapat koordinasi.

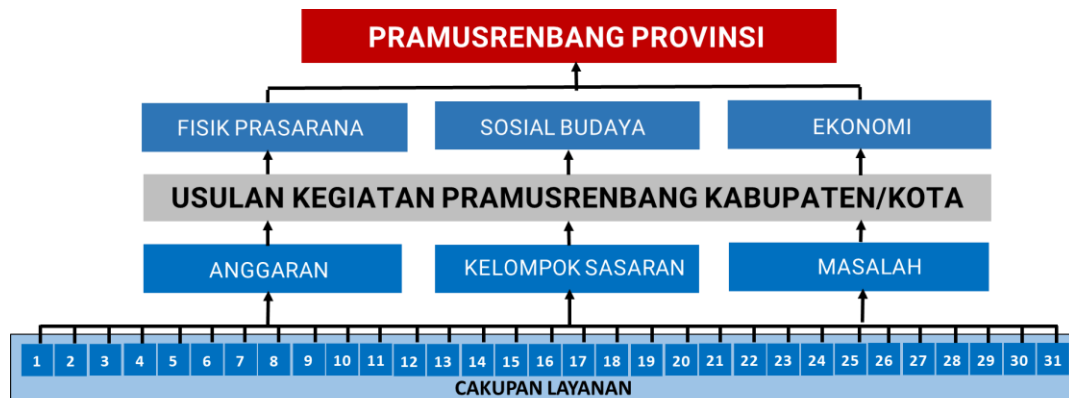
KELUARAN PENANDAAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI TAHUN BERJALAN :

Dokumen yang berisi hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik *stunting* dalam APBD sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan

3. Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Pra-Musrenbang Provinsi) tematik *stunting*

Pra-musrenbang Provinsi tematik *stunting* merupakan forum pertemuan antar *stakeholders* di tingkat Provinsi untuk mengevaluasi pencapaian dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Provinsi, usulan program/kegiatan intervensi dan mengapresiasi peran, kinerja dari berbagai lembaga/pelaku dan kabupaten/kota

Gambar 23 Alur pelaksanaan Analisis Situasi Provinsi



Pra-Musrenbang Provinsi tematik stunting merupakan bagian pelaksanaan tahapan penguatan perencanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dan dilaksanakan sebelum pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) Provinsi.

Pra-Musrenbang Provinsi tematik stunting dilakukan setelah diperoleh hasil analisis situasi dan Penandaan Pelaksanaan APBD provinsi Tahun berjalan termasuk hasil musrenbang Kabupaten/Kota yang merupakan bagian yang dibahas dalam Pra-Musrenbang Provinsi tematik stunting.

Tujuan

Pra-Musrenbang Provinsi tematik stunting bertujuan untuk:

1. Melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah provinsi dalam percepatan pencegahan/penurunan *stunting* hasil analisis situasi.
2. Mendeklarasikan komitmen pimpinan kabupaten/kota, DPRD, pimpinan OPD, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merealisasikan rencana kegiatan percepatan pencegahan/penurunan *stunting*.
3. Merumuskan usulan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.
4. Melakukan pemilahan usulan program/kegiatan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dalam kategori Fisik Prasarana, Sosial budaya dan Ekonomi.
5. Memberikan apresiasi kepada perangkat daerah/lembaga/pelaku yang dinilai berkinerja baik dalam

mendukung kabupaten/kota meningkatkan cakupan, kualitas, dan konvergensi intervensi gizi.

Proses pelaksanaan:

1. Pra-musrenbang provinsi tematik stunting dipimpin oleh Kepala Daerah atau yang ditunjuk.
2. Penyampaian hasil analisis situasi dan hasil penandaan anggaran rincian belanja dan aktivitas intervensi percepatan pencegahan penurunan stunting.
3. Expose Rencana Kegiatan Percepatan Pencegahan/Penurunan Stunting Kab/Kota (meliputi kegiatan OPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan) tahun berjalan dan tahun depan.
4. Pemilahan usulan program/kegiatan ke dalam dokumen perencanaan daerah berdasarkan kelompok perenecanaan yaitu Fisik prasaranan dan sarana, sosial budaya dan ekonomi.
5. Deklarasi komitmen pimpinan kabupaten/kota, DPRD, pimpinan OPD, camat, desa/kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya untuk merealisasikan rencana kegiatan.
6. Pemberian apresiasi kepada perangkat daerah/lembaga/pelaku yang dinilai berkinerja baik dalam mendukung kabupaten/kota meningkatkan cakupan, kualitas, dan konvergensi intervensi gizi.

Penanggungjawab/Pelaksana

Sekretaris Daerah dengan dibantu Bappeda

Peserta

Peserta Pra-Musrenbang Provinsi adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bappeda, OPD penanggung jawab layanan (terutama terkait intervensi layanan pada kelompok sasaran), Badan/Kantor Perwakilan Kementerian Teknis di daerah, unsur PKK, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pelaku media, serta unsur-unsur lainnya

Jadwal

Waktu penyelenggaraan Pra-Musrenbang Provinsi tematik stunting dilaksanakan pada bulan April sebelum pelaksanaan musrenbang Provinsi.

KELUARAN PRA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI
(PRA-MUSRENBANG PROVINSI) TEMATIK STUNTING:

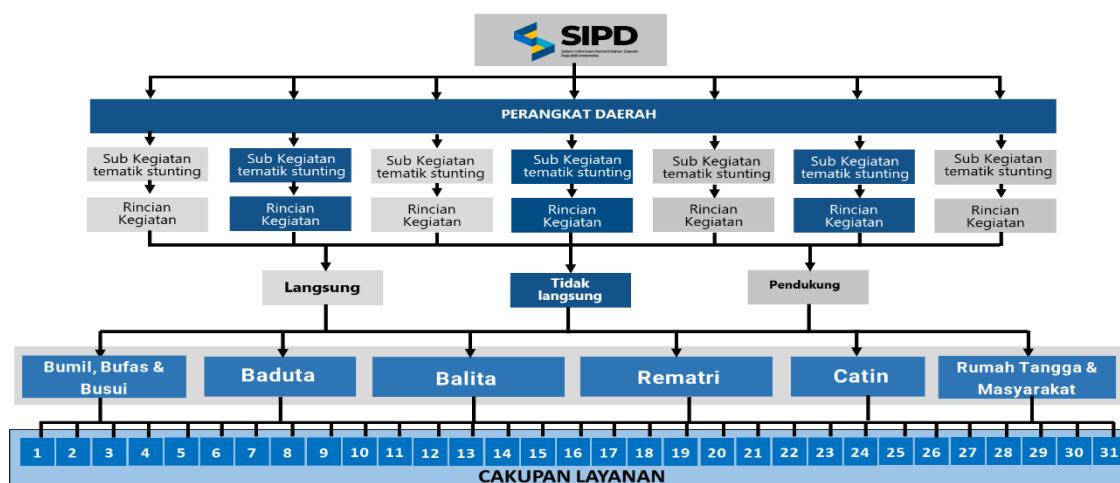
- a. Dokumen yang berisi daftar rencana program/kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting hasil pra-musrenbang provinsi yang terbagi dalam bidang fisik prasarana, sosial budaya dan ekonomi berdasarkan hasil dari analisis situasi seluruh kabupaten/kota dalam provinsi dan analisis situasi provinsi.
- b. Berita Acara hasil pra-musrenbang provinsi tematik stunting.

4. Penandaan Perencanaan Provinsi Tahun depan

Penandaan perencanaan Provinsi tahun depan merupakan bagian tahapan penguatan perencanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka memastikan hasil rumusan usulan kegiatan tahun depan dalam pra-musrenbang provinsi terakomodir dalam rencana anggaran tahun depan.

Hasil penandaan perencanaan provinsi tahun depan berupa penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan dari Subkegiatan tematik stunting dalam rencana anggaran provinsi sebagaimana tertuang dalam SIPD perencanaan.

Gambar 24 Alur pelaksanaan penandaan perencanaan provinsi tahun depan



Jadwal

Penandaan Perencanaan Provinsi Tahun depan dilakukan setelah Pra-musrenbang dan paling lambat Bulan Juli tahun berjalan

Penanggung Jawab dan Pelaksana:

Bappeda dan perangkat daerah penanggungjawab intervensi.

Tahapan Pelaksanaan

1. Bappeda melakukan konsolidasi antar sektor melalui desk perencanaan dan penganggaran yang mendukung penurunan *stunting* tahun anggaran rencana berdasarkan dokumen SIPD;
2. Selanjutnya masing-masing Perangkat Daerah melakukan penandaan rumusan usulan program/kegiatan hasil pra-musrenbang provinsi dengan dokumen rencana anggaran tahun depan yang tertuang dalam SIPD perencanaan.
3. Selanjutnya pada sub kegiatan yang telah ditandai, dilakukan penandaan terhadap belanja/aktifitas pada akun belanja yang ditujukan kepada sasaran, layanan maupun kegiatan bimbingan dan pengawasan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Belanja/aktifitas yang ditandai dapat lebih dari satu dalam sub kegiatan.
4. Hasil penandaan diinput pada web aksi bangda yang meliputi kode rekening belanja, uraian belanja, koefisien/volume, satuan, harga satuan serta total belanja, kemudian di verifikasi oleh verifikator masing-masing perangkat daerah

- Bappeda melakukan konsolidasi lintas sektor dalam rangka review dukungan anggaran penurunan *Stunting* tahun depan.

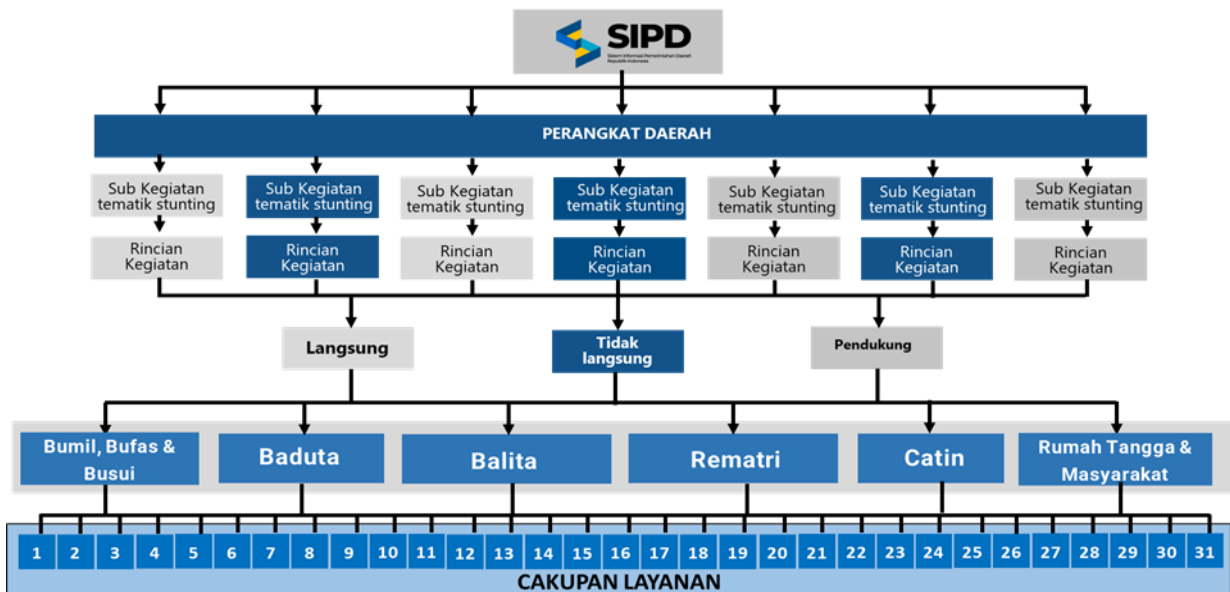
KELUARAN PENANDAAN PERENCANAAN PROVINSI TAHUN DEPAN:

Dokumen hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan dari Subkegiatan tematik dalam rencana anggaran provinsi sebagaimana tertuang dalam SIPD perencanaan pada perangkat daerah provinsi tertentu.

5. Penandaan Pelaksanaan Provinsi pasca Perubahan APBD

Penandaan program/kegiatan tahun berjalan merupakan bagian dari tahapan penguatan pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, yang bertujuan untuk melakukan penandaan anggaran dan pemetaan program/kegiatan tahun berjalan setelah adanya APBD Perubahan.

Gambar 25 Alur pelaksanaan penandaan APBD Provinsi pasca perubahan



Kegiatan Penandaan Program/Kegiatan pasca APBD Perubahan antara lain:

- program/kegiatan dari sub-kegiatan dalam APBD Perubahan dari dokumen SIPD pelaksanaan.
- Memilah rincian belanja atau aktivitas yang ditujukan untuk sasaran dan pencapaian layanan percepatan pencegahan serta penurunan stunting.

Waktu Pelaksanaan:

Penandaan pelaksanaan program/kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Pelaksana dan penanggung jawab:

Bappeda dan perangkat daerah penanggungjawab intervensi.

Adapun langkah penandaan program/kegiatan pasca APBD Perubahan sebagai berikut:

1. Operator Bappeda dan perangkat daerah penanggungjawab intervensi melakukan penandaan/tagging berdasarkan kode belanja terkait program/kegiatan percepatan penurunan dan pencegahan stunting yang bersumber dari APBD tahun berjalan.
2. Selanjutnya melakukan pemilahan terhadap program/kegiatan yang mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam APBD Perubahan.
3. Terhadap program/kegiatan yang berubah, selanjutnya Operator melakukan penandaan/tagging meliputi kode rekening belanja, uraian belanja, koefisien/volume, satuan, harga satuan serta total belanja dan di input dalam web aksi bangsa terhadap perubahan dimaksud
4. Hasil input selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan verifikasi oleh verifikator.

5. Bappeda melakukan persetujuan (approval) dalam web aksi bangsa terhadap data-data penandaan/tagging atas program/kegiatan setelah terjadi perubahan APBD

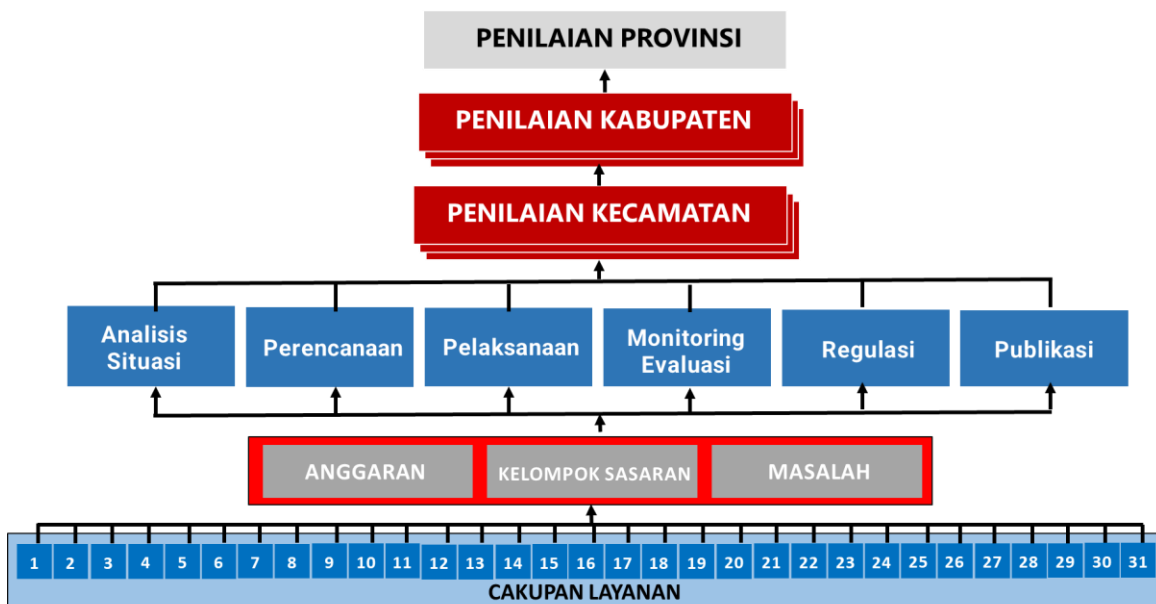
KELUARAN PENANDAAN PELAKSANAAN PROVINSI PASCA PERUBAHAN

Dokumen yang berisi hasil penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD perubahan sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan.

6. Penilaian hasil Monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi

Penilaian hasil monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting merupakan tahapan dalam aksi konvergensi di Provinsi yang dilaksanakan dalam rangka evaluasi capaian pelaksanaan aksi konvergensi.

Gambar 26 Alur pelaksanaan Penilaian hasil Monitoring dan Evaluasi Provinsi



Berdasarkan penilaian hasil monitoring dan evaluasi seluruh kabupaten/kota terhadap capaian layanan, realisasi anggaran dan permasalahan penyampaian layanan terhadap kelompok sasaran dilakukan penilaian hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi provinsi.

Waktu Pelaksanaan:

Penilaian Hasil Monitoring dan Evaluasi Kabupaten/Kota dilaksanakan pada bulan **Desember** tahun berjalan.

Penyelenggara:

Sekda dibantu Bappeda

Proses pelaksanaan:

- a. Sekretaris daerah dibantu Bappeda memastikan seluruh kabupaten/kota telah melakukan penilaian hasil monitoring dan evaluasi aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.
- b. Sekretaris Daerah dibantu Bappeda menyampaikan hasil penilaian (skoring) dari web aksi bangda dengan hasil tumbuh, berkembang dan berdaya.
- c. meminta kepada setiap perangkat daerah menyampaikan hasil-hasil pelaksanaan intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.
- d. Perangkat daerah menyampaikan capaian intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan tanggung-jawab masing-masing.
- e. Peserta memberikan klarifikasi dan konfirmasi (umpan balik) atas data sasaran termutakhir, capaian layanan dan realisasi program/kegiatan (jika ada perbaikan dilakukan perbaikan pada saat itu juga).
- f. Sekretaris Daerah dibantu Bappeda melakukan persetujuan (approval) setelah ada klarifikasi dan konfirmasi peserta yang hadir atas data sasaran termutakhir, capaian layanan dan realisasi program/kegiatan yang tercatat dalam web aksi bangda.
- g. Skoring pelaksanaan tahapan aksi konvergensi di kabupaten/kota.

KELUARAN 6. PENILAIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PROVINSI:

Dokumen hasil penilaian pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi: analisis situasi, penguatan perencanaan, penguatan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dukungan regulasi dan publikasi. Hasil penilaian aksi konvergensi di masing-masing wilayah maupun daerah dikelompokkan dalam klasifikasi Tumbuh, Berkembang dan Berdaya.

C. AKSI PENDUKUNG:

1. Dukungan regulasi

Dalam pelaksanaan aksi konvergensi provinsi, diperlukan dukungan regulasi/kebijakan guna memastikan setiap tahapan aksi konvergensi berjalan semestinya. Dukungan regulasi sangat penting dalam pelaksanaan aksi konvergensi percepatan pencegahan penurunan stunting untuk memastikan koordinasi antar sektor dapat bekerja sama dalam satu arah dan memastikan semua pihak memiliki tanggung jawab yang jelas.

Selain itu bentuk dukungan regulasi dimaksudkan untuk memperkuat implementasi kebijakan daerah terkait percepatan pencegahan/penurunan stunting di tingkat desa dan kelurahan, partisipasi masyarakat, LSM, dan pihak swasta dalam mendukung Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, mendorong keterlibatan aktif dari berbagai pihak yang mungkin tidak terlibat langsung di pemerintahan.

2. Publikasi

Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting harus terinformasikan dengan baik kepada semua pihak. Bentuk publikasi dapat dilakukan melalui web aksi bangda, setiap tahapan aksi konvergensi jika sudah terinput di tingkat provinsi adalah bagian dari publikasi aksi konvergensi.

BAB V

PENUTUP

Aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dalam memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor. Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga isu multidimensi yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masa depan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan komitmen, integrasi, dan kesinambungan dalam setiap langkah yang diambil di berbagai tingkatan.

Buku ini telah dirancang sebagai panduan untuk semua pihak yang terlibat, mulai dari level provinsi hingga kecamatan, dalam menyusun dan melaksanakan intervensi pencegahan dan penurunan stunting. Diharapkan setiap tingkatan mampu menjalankan perannya secara optimal sesuai kewenangan masing-masing, dengan tetap mengedepankan prinsip kerja sama yang efektif dan berkesinambungan. Melalui aksi konvergensi ini, seluruh pemangku kepentingan dapat berfokus pada penyebab utama stunting di wilayah mereka serta mengimplementasikan intervensi yang tepat sasaran, berbasis data, dan relevan dengan kondisi lokal.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah provinsi diharapkan terus mendukung dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam menjalankan program penurunan stunting. Hal ini meliputi penyediaan pelatihan teknis, peningkatan alokasi sumber daya, penguatan pemantauan dan evaluasi, serta mekanisme supervisi berjenjang. Pemantauan berkala dan evaluasi capaian program menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memberikan dampak nyata terhadap penurunan stunting.

Penurunan stunting adalah tantangan bersama yang membutuhkan waktu, komitmen, serta kerja keras dari seluruh elemen masyarakat. Dengan terus memperkuat aksi konvergensi, diharapkan seluruh provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan di Indonesia dapat mencapai target penurunan stunting sesuai dengan visi nasional. Melalui upaya bersama, kita dapat mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

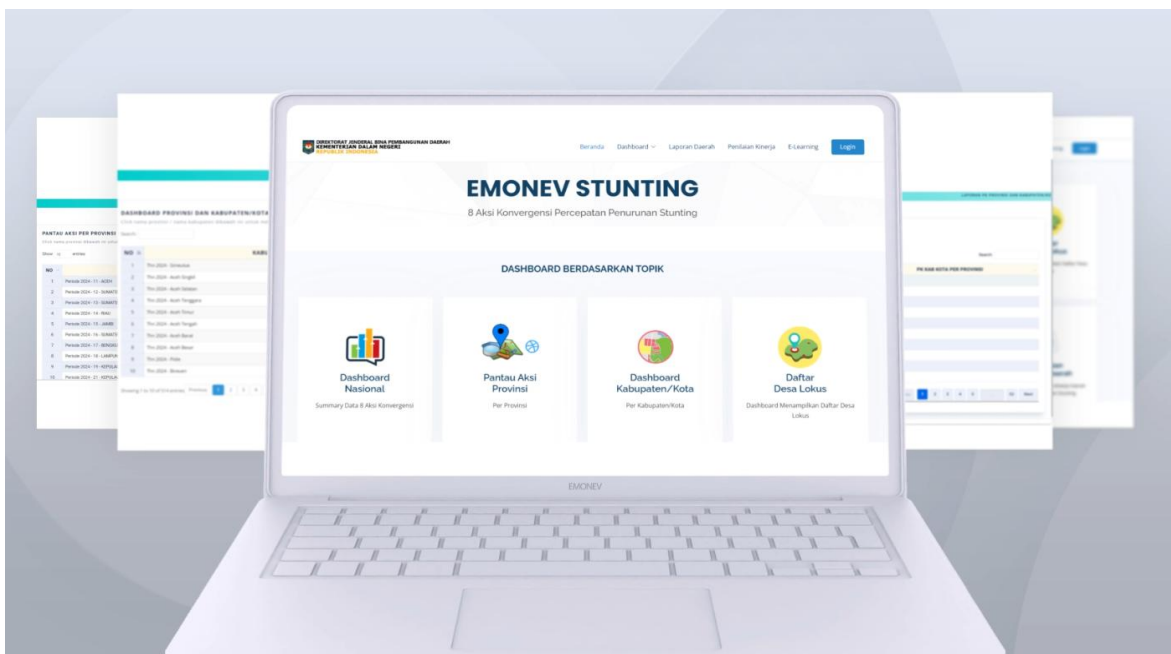


LAMPIRAN

KEMENTERIAN
GEDUNG



TRANSFORMASI **DIGITAL** AKSI **KONVERGENSI**



Platform yang dirancang untuk mendukung pengelolaan dan informasi pelaksanaan aksi **konvergensi** percepatan pencegahan dan **penurunan stunting**.

Login Kecamatan



**APLIKASI
E-MONEV2**

Username

Password

Login ke E-Monev2

Halaman Pemantauan Progres Kecamatan

E-Monitoring



DASHBOARD

Pantau Aksi

Dashboard

ANALISIS SITUASI

PERENCANAAN

PELAKSANAAN

PENILAIAN HASIL MONEV

PENDUKUNG

LAPORAN

DASHBOARD PANTAU AKSI - KECAMATAN SESEAN

Kabupaten Toraja Utara - Provinsi Sulawesi Selatan

Dashboard Tingkat Kecamatan

ANSIT					
#	Nama Bagian	Nama Form	Entry	Verified	Approved
1	Ansot	Identifikasi Ketersediaan Data	✓	✗	✗
2	Ansot	Master Data Awal	✓	✗	✗
3	Ansot	Data Pemetaan Program Kegiatan	✓	✗	✗
4	Ansot	Master Ansot	✓	✗	✗
PENGUATAN PELAKSANAAN					
#	Nama Bagian	Nama Form	Entry	Verified	Approved
1	PENGUATAN PELAKSANAAN	Tagging Anggaran Tlin Berjalan	✓	✗	✗
1	PENGUATAN PELAKSANAAN	Tagging Anggaran Perubahan	✓	✗	✗
1	PENGUATAN PELAKSANAAN	Capaian Layanan Semester 1	✓	✗	✗
PRAMUSRENBANG					
#	Nama Bagian	Nama Form	Entry	Verified	Approved
1	PRAMUSRENBANG	Pramusrenbang - Pelaksanaan	✓	✗	✗
1	PRAMUSRENBANG	Pramusrenbang - Peserta	✓	✗	✗
REVIU KEGIATAN					
#	Nama Bagian	Nama Form	Entry	Verified	Approved
2	Ansot	Capaian layanan Semester 2	✓	✗	✗
1	REVIU KEGIATAN	Hasil Penilaian Monev	✓	✗	✗

©2019-2020 Rika Raniwati - Sistem Monitoring Aksi Inovasi (seman) - 2020 - 2024

ANALISIS SITUASI KECAMATAN

E-Monitoring

MASTER ANSIT

Analisis Situasi

Master Ansit / Data Sasaran - Awal

Junar, 07 Feb 2025 | 18:10:09

Periode 2025

Data Sasaran - Awal - Periode : 2025 (7) - Kota/kab : Toraja Utara - Kecamatan : SESEAN - User Role : 11 (Operator SETCAM) - jadwal_ok : 1

Download Data

Show 10 entries

Search:

Action_Button	ID	No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	(sa_01) Jumlah Penduduk	(sa_02) Jumlah Keluarga/Rumah Tangga	(sa_03) Jumlah Remaja Putri	(sa_04) Jumlah Ibu Hamil	(sa_05) Jumlah Ibu Nifas	(sa_06) Jumlah Calon Pengantin	(sa_07) Jumlah Ibu Hamil KEK	(sa_08) Jumlah Anak usia 0-5 bulan	(sa_09) Jumlah Anak usia 6-23 bulan	(sa_10) Jumlah Anak usia 24-59 bulan	(sa_11) Jumlah kasus diare pada anak usia 0-59 bulan	(sa_12) Jumlah kasus gizi buruk
	162	1	Sesean	Rante Pangli	Lembang Buntu Lobo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	163	2	Sesean	Rante Pangli	Lembang Parinding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	164	3	Sesean	Rante Pangli	Kelurahan Deri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	165	4	Sesean	Rante Pangli	Bori Rantatelok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	166	5	Sesean	Rante Pangli	Kelurahan Bori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Showing 1 to 9 of 9 entries

Previous 1 Next

©Ditjen Bina Bangsa - Sistem Monitoring Aksi Konvergensi - 2020 - 2024

PRAMUSRENBANG KECAMATAN TEMATIK STUNTING

E-Monitoring

ANSIT

PRAMUSRENBANG - KECAMATAN

Ansit / PRAMUSRENBANG

Junar, 07 Feb 2025 | 18:11:15

Periode 2025

PRAMUSRENBANG - KECAMATAN - Periode : (7) - Kota/kab : - Kecamatan : - User Role : 11 (Operator Kecamatan) - jadwal_ok : 1

Tambah Data

Download Data

Show 10 entries

Search:

ACTION	NOMOR	CL	INDIKATOR INTERVENSI	PERMASALAHAN	PENYEBAB MASALAHAN	REKOMENDASI	USULAN KEGIATAN	KATEGORI	BIDANG	KEBUTUHAN ANGGARAN	TAHUN PELAKSANAAN	VOLUME	SATUAN	RENCANA LOKASI KEGIATAN	STATUS USULAN
	1			masalah x1	penyebab x1	rekomendasi x1	usulan keg x1	Langsung	Ekonomi	10.000	desa x1	Berjalan	2.00	satuan1	Ke Kabu
	2			masalah x2	penyebab x2	rekomendasi x2	usulan keg x2			0	desa x1		0.00		
	3			Rumah ibu hamil yang bersangkutan jauh posyandu	Tidak transportasi reguler dilokasi	Penyediaan sarana transportasi oleh Desa	Penyediaan kendaraan operasional	Tidak Langsung	Risk Prasarana	10.000.000	DEsa, desa b	Rencana	1.00	unit	Ke Kabu

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous 1 Next

©Ditjen Bina Bangsa - Sistem Monitoring Aksi Konvergensi - 2020 - 2024

PENANDAAN RENCANA KEGIATAN KECAMATAN

E-Monitoring

ANSIT
TAGGING RENCANA - KECAMATAN

Junar, 07 Feb 2025 | 18:12:48

Periode 2025

Ansir / TAGGING RENCANA

ANSIT
TAGGING RENCANA - KECAMATAN - Periode : (7) - Kota/kab : - Kecamatan : - User Role : 11 (Operator Kecamatan) - jadwal_ok : 1

+ Tambah Data

Download Data

Show 10 entries

Search:

ACTION	NO	ID INDIKATOR	INDIKATOR	Kode Kepmendagri 900.01.15.5-1317	Kode Kepmendagri Lainnya	Nomenklatur urusan (Sub Kegiatan)	Uraian Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Keluaran	Satuan Keluaran	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Total Anggaran Sub Kegiatan	Total Anggaran Rincian
No data available in table																

Showing 0 to 0 of 0 entries

PreviousNext

©Ditjen Bina Bangsa - Sistem Monitoring Aksi Konvergensi - 2020 - 2024

PENANDAAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN KECAMATAN

E-Monitoring

ANSIT
TAGGING BERJALAN - KECAMATAN

Junar, 07 Feb 2025 | 18:16:05

Periode 2025

Ansir / TAGGING BERJALAN

ANSIT
TAGGING BERJALAN - KECAMATAN - Periode : (7) - Kota/kab : - Kecamatan : - User Role : 11 (Operator Kecamatan) - jadwal_ok : 1

+ Tambah Data

Download Data

Show 10 entries

Search:

ACTION	NO	ID INDIKATOR	INDIKATOR	Kode Kepmendagri 900.01.15.5-1317	Kode Kepmendagri Lainnya	Nomenklatur urusan (Sub Kegiatan)	Uraian Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Keluaran	Satuan Keluaran	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	Total Anggaran Sub Kegiatan	Total Anggaran Rincian
👍 👎 🗑️ 📄 🔍 🔖 🔖 🔖 🔖 🔖 🔖 🔖 🔖 🔖 🔖 🔖 🔖	1	cl_04	Jumlah ibu hamil periksa kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan	7 01 02 2 01 0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rgjj lqjij lykkl	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	dokumen	desa xxxx	APBD	KECAMATAN	500.000	

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous1Next

©Ditjen Bina Bangsa - Sistem Monitoring Aksi Konvergensi - 2020 - 2024

MONITORING DAN EVALUASI KECAMATAN

E-Monitoring

DASHBOARD

ANALISIS SITUASI

PERENCANAAN

PELAKSANAAN

PENILAIAN HASIL MONEV

Data Sasaran Semester-1

Data Pendukung Semester-1

Cakupan Layanan Semester-1

Data Sasaran Semester-2

Data Pendukung Semester-2

Cakupan Layanan Semester-2

Monitoring Pelaksanaan

PENDUKUNG

MASTER ANSIT

Analisa Situasi

Master Ansit / Data Sesean - Sem1

Data Sasaran - Sem1 - Periode : 2025 (7) - Kota/kab : Toraja Utara - Kecamatan : SESEAN - User Role : 11 (Operator SETCAM)

--jadwal_ok : 1

Download Data

Search:

Show 10 entries

Action_Button	ID	No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	(sa_01) Jumlah Penduduk	(sa_02) Jumlah Keluarga/Rumah Tangga	(sa_03) Jumlah Remaja Putri	(sa_04) Jumlah Ibu Hamil	(sa_05) Jumlah Ibu Nifas	(sa_06) Jumlah Calon Pengantin	(sa_07) Jumlah Ibu Hamil KEK	(sa_08) Jumlah Anak usia 0-5 bulan	(sa_09) Jumlah Anak usia 6-23 bulan	(sa_10) Jumlah Anak usia 24-59 bulan	(sa_11) Jumlah kasus diare pada anak usia 0-59 bulan	(sa_12) Jumlah An. usli 2 bulan
	171	1	Sesean	Rante Pangli	Lembang Buntu Lobo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	172	2	Sesean	Rante Pangli	Lembang Parinding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	173	3	Sesean	Rante Pangli	Kelurahan Deri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	174	4	Sesean	Rante Pangli	Bori Rantatelok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	175	5	Sesean	Rante Pangli	Kelurahan Bori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Showing 1 to 9 of 9 entries

Previous

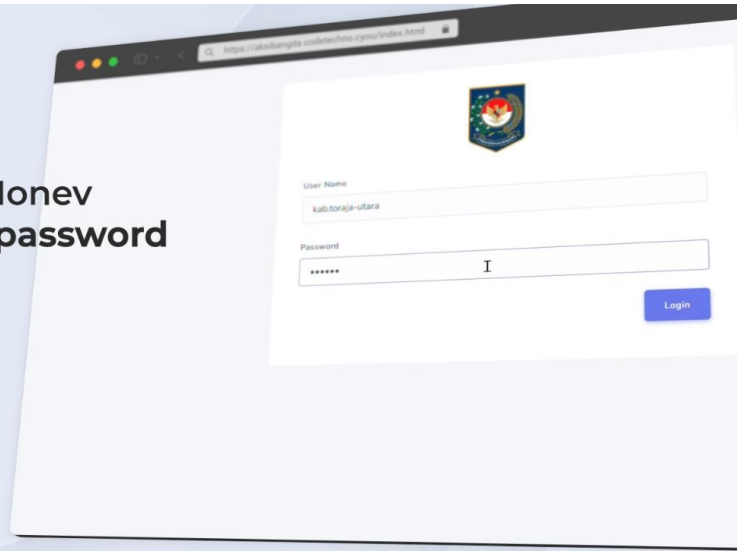
1

Next

©Ditjen Bina Bangsa - Sistem Monitoring Akisi Konvergen - 2020 - 2024

Login Kabupaten

Login ke Dashboard e-Monev dengan **username** dan **password** yang telah diberikan.





User Name

Password



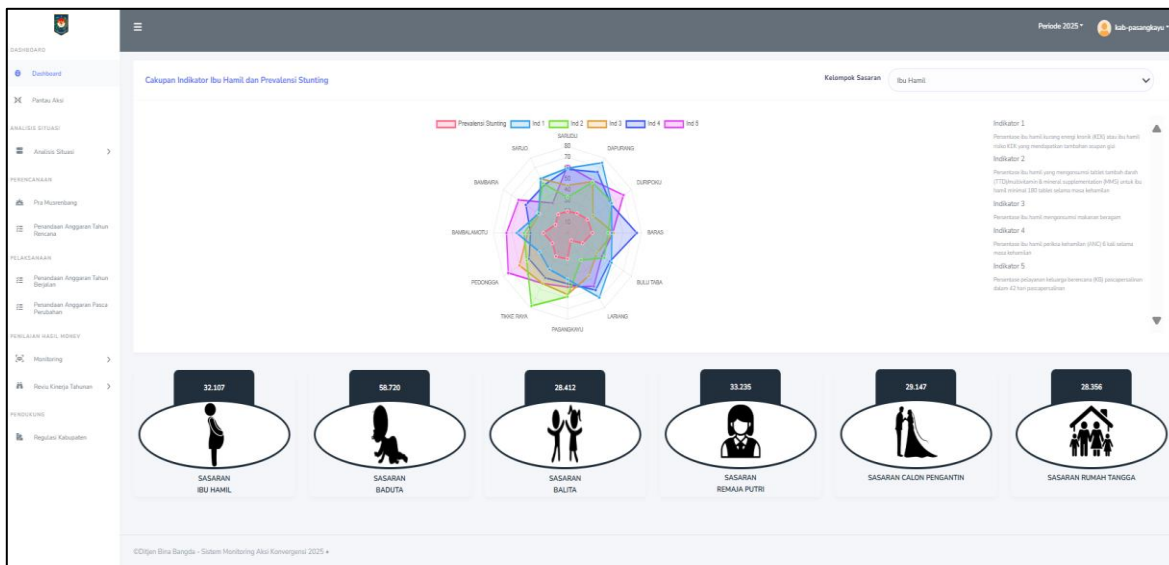
I'm not a robot



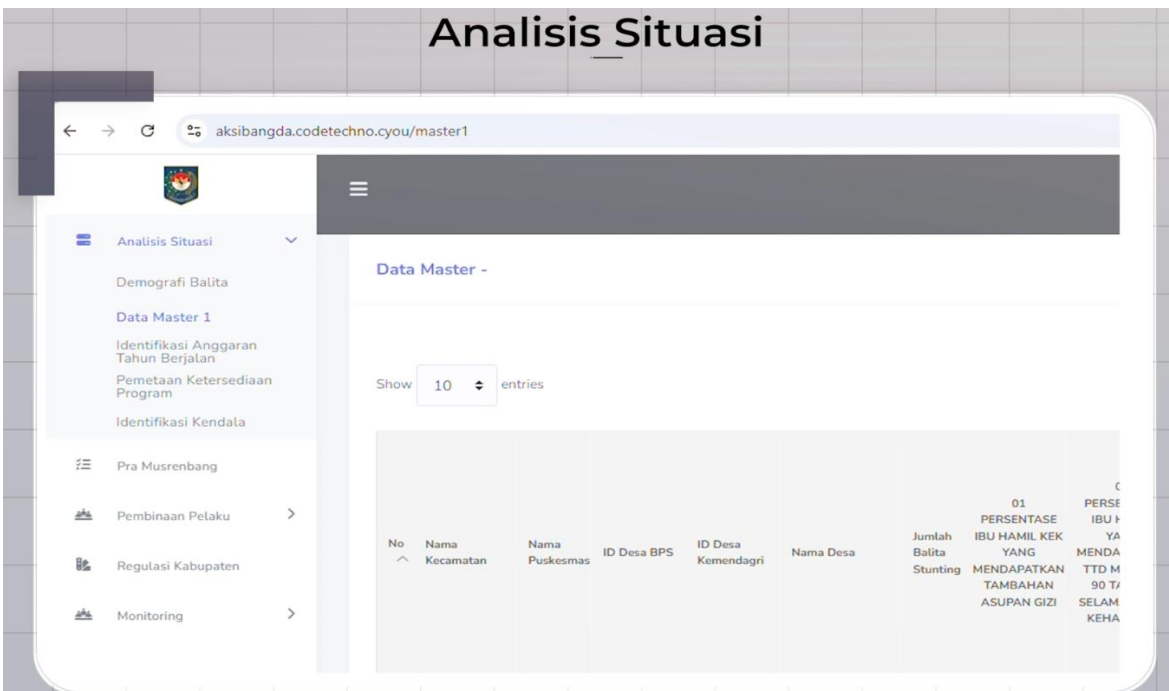
reCAPTCHA
Privacy - Terms

→ Login

DASHBOARD KABUPATEN/KOTA



Analisis Situasi



Identifikasi Anggaran

The screenshot displays a web application interface for budget identification. The top navigation bar shows the user is logged in as 'kab.lebak'. The sidebar on the left contains a menu with the following items: 'Analisis Situasi', 'Demografi Balda', 'Data Master 1', 'Identifikasi Anggaran Tahun Berjalan', 'Pembinaan Ketersediaan Program', 'Identifikasi Kendaia', 'Pra Musrenbang', 'Pembinaan Petaka', 'Regulasi Kabupaten', and 'Monitoring'. The main content area is titled 'Tambah/ubah Identifikasi Anggaran Tahun Berjalan' and contains a form with the following fields: 'Indikator' (dropdown menu), 'Kode Kemendagri 900.01.15.5-1317' (text input), 'Nomenklatur Urusan kabupaten/Kota (Sub Kegiatan)' (text input), 'Kinerja' (text input), 'Indikator Keluaran' (text input), 'Uraian Kegiatan' (text input), 'Target Keluaran' (text input with a unit dropdown), 'Lokasi' (text input), 'Total Anggaran Sub Kegiatan' (text input), 'Sumber Dana' (dropdown menu), and 'Pelaksana' (dropdown menu). At the bottom of the form are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Setor' (Submit).

Pra Musrenbang

Regulasi Kabupaten.

Regulasi Kabupaten

Periode 2025 * kab.lebak *

1. Tambah Data

Show 10 entries

Search

No	Jenis Regulasi	No Regulasi	Tentang	Tahun Regulasi	Status Regulasi	Kawijakan desa dalam pelaksanaan intervensi gis melalui APBDesa	Pemeriksaan dalam meniadakan pemenuhan desa	Monev/evaluasi APBDesa dari tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi kegiatan pemenuhan desa	Perbaikan kualitas data laporan dan pemenuhan manfaat yang dilakukan oleh desa/kelurahan	Skema insentif bagi pelaku pemenuhan starting di desa/kelurahan	Action
1	Peraturan Bupati	001	Peraturan Peraturan Penurunan Stunting	2023	Masih Berlaku	1	1	1	1	1	

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

©Dijin Bina Bangsa - Sistem Monitoring Akai Konvergen 2025 *

Monitoring Pelaksanaan

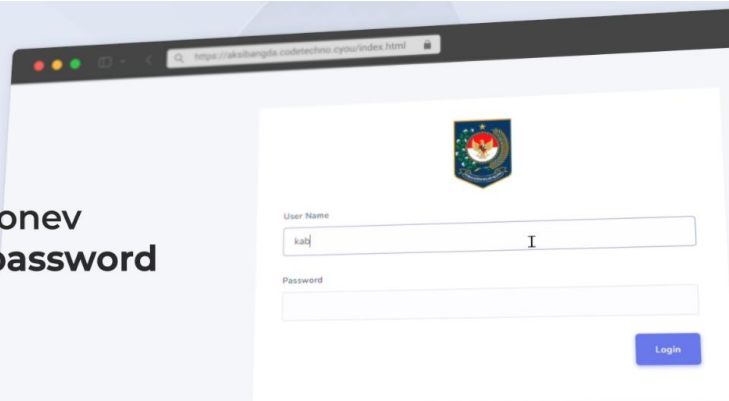
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan

Periode 2025 * kab.lebak *

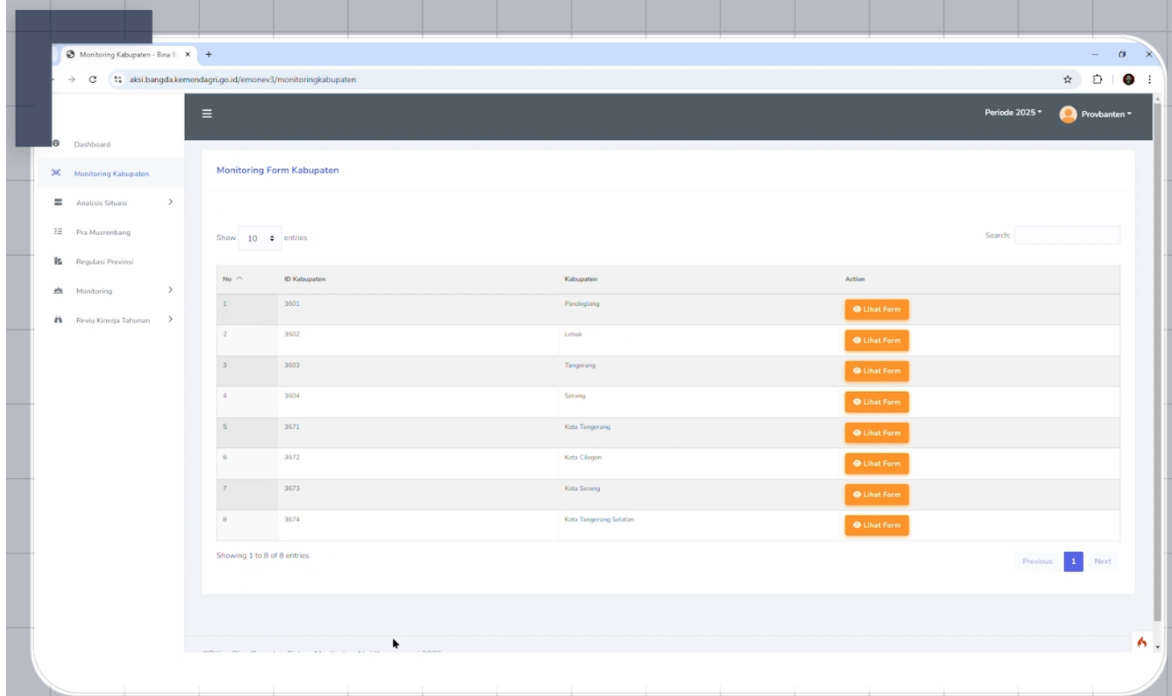
NO	INTERVENSI	BASELINE	PROGRES	DEVIASI	ANGGARAN			
		%	%	%	APBD Tahun Berjalan	APBD Realisasi	PKP	APBD Tahun Rencana
1	4.01 STATUS DESA KELUHAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBANGAN (BAGI ATAU OPEN DETECTION FREE ZONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.02 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AIR MINUM YANG LAYAK DI KABUPATEN/KOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.03 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AKSES SANITASI (AIR LIMBAH DOMESTIK) LAYAK DI KABUPATEN/KOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.04 JUMLAH PENERIMA BANTUAN LUKAH (PE) JAHANNAN KESEHATAN NASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.05 JUMLAH KELUARGA MISKIN DAN RENTAN YANG MEMPEROLEH BANTUAN TUNJUK BERKAWAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4.06 JUMLAH KELUARGA MISKIN DAN RENTAN YANG MEMPEROLEH BANTUAN SOSIAL PANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.07 JUMLAH KRS YANG MENDAPATKAN PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.08 PERSENTASE REMAHTRI YANG MENDAPATKAN TTD	70,00	80,00	10,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
9	4.09 CAKUPAN CALON PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG MENPEROLEH PEMERIKSAAN KESEHATAN SEBAGAI BAGIAN DARI PELAKSIAN NIKAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4.10 PERSENTASE ANAK BERUSA DI BAWAH LIMA TAHUN GDI BURUK YANG MENDAPAT LUKAHAN TAPALAKSANA GDI BURUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.11 PERSENTASE ANAK BERUSA DI BAWAH LIMA TAHUN YANG DIPINDA/PERTUMBUHAN DAN JARDI TUMBUH/PERTUMBUHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Login Provinsi

Login ke Dashboard e-Monev dengan username dan password yang telah diberikan.



Monitoring Kabupaten



No	ID Kabupaten	Kabupaten	Action
1	3601	Pandajene	Lihat Form
2	3602	Luhak	Lihat Form
3	3603	Tangerang	Lihat Form
4	3604	Sering	Lihat Form
5	3671	Kota Tangerang	Lihat Form
6	3672	Kota Cilegon	Lihat Form
7	3673	Kota Serang	Lihat Form
8	3674	Kota Tangerang Selatan	Lihat Form

Analisis Situasi

Data Master 1

Dashboard

Monitoring Kabupaten

Analisis Situasi

Data Master 1

Identifikasi Anggaran Tahun Berjalan

Identifikasi Kendala

Pro Musrenbang

Regulasi Provinsi

Monitoring

Revisi Kinerja Tahunan

Periode 2025

Data Master

Show 10 entries

Search

No	Nama Kabupaten	Jumlah Balita Stunting	01 PERSENTASE IBU HAMIL KEK YANG MENDAPATKAN TAMBAHAN ASUPAN GIZI	02 PERSENTASE IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TTD MINIMAL 90 TABLET SELAMA MASA KEHAMILAN	03 PERSENTASE BEHAKTI YANG MENDAPATKAN TTD	04 BAYI USIA KURANG DARI 6 BULAN YANG MENDAPATKAN ASI EKSLUSIF	05 PERSENTASE ANAK USA 5-23 BULAN MENDAPATKAN MAKANAN PENEMPMING ASI (MP-ASI)	06 PERSENTASE ANAK BERUSIA DI BAWAH LIMA TAHUN GIZI BURUK YANG MENDAPAT LAYANAN TATALAKSANA GIZI BURUK	07 PERSENTASE ANAK BERUSIA DI BAWAH LIMA TAHUN YANG DIPANTAU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGANNYA	08 PERSENTASE ANAK BERUSIA DI BAWAH LIMA TAHUN GIZI KURANG YANG MENDAPAT TAMBAHAN ASUPAN GIZI	09 PERSENTASE ANAK BERUSIA DI BAWAH LIMA TAHUN YANG MEMPEROLEH IMUNISASI DASAR LENGKAP	10 PERSENTASE PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) PASCA PERSALINAN	11 PERSENTASE KEHAMILAN YANG TIDAK DIINGINKAN	12 CAKUPAN CALON PASANGAN USA BURUK (PUS) YANG MENDAPATKAN AIR MINUM YANG SEHAT DAN LAYANAN PELAYANAN NIKAH	13 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AIR MINUM YANG SEHAT DAN LAYANAN PELAYANAN NIKAH
1	Pondoklagung	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2	Lekuk	36.00	5.93	300.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00

Showing 1 to 2 of 2 entries

Identifikasi Anggaran

Pilih Indikator dan Kode Kepmendagri

Tambah/ubah Identifikasi Anggaran Tahun Berjalan

Periode 2025

Provinsi

Indikator

Kode Kepmendagri 900.01.15.5-1317

Nomenklatur Urusan kabupaten/Kota (Sub Kegiatan)

Kinerja

Indikator Keluaran

Uraian Kegiatan

Target Keluaran

Lokasi

Total Anggaran Sub Kegiatan

Sumber Dana

Pelaksana

Simpan

Batal

--Pilih Indikator--

--Pilih Indikator--

Persentase Ibu Hamil Kek Yang Mendapatkan Tambahan Asupan Gizi

Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Ttd Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan

Persentase Rematri Yang Mendapatkan Ttd

Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan Asi Ekslusif

Uraian Kegiatan

Volume

satuan

Lokasi

Alokasi Anggaran

- Pilih -

- Pilih OPD -

Pra Musrenbang

Input data pelaksanaan dan klik simpan setelah selesai.

Periode 2025 * 

Tambah/ubah Pelaksanaan Pra Musrenbang

Tanggal Pelaksanaan

Tempat Pelaksanaan

Jumlah Peserta

Pimpinan Rapat

©Ditjen Bina Bangsa - Sistem Monitoring Aksi Konvergensi 2025

Regulasi Provinsi

Klik ikon tambah data untuk input data regulasi.

Periode 2025 * 

Tambah/ubah Data Regulasi Provinsi

Nomor Regulasi

Tentang Regulasi

Tahun Regulasi

Jenis Dokumen

Upload Dokumen Regulasi No file chosen

Monitoring Monitoring Pelaksanaan Kegiatan.

aksibangdakemendagri.go.id/emonev3/pelaksanaanprov

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan

NO	INTERVENSI	ANGGARAN		
		AP/SD Tahun Anggaran	AP/SD Pelaksanaan	IS/PT
1	«L01 STATUS DESA KELLURAHAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) ATAU OPEN DEFECATION FREE (ODF)	0,00	0,00	0,00
2	«L02 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AIR MINUM YANG LAYAK DI KABUPATEN/KOTA	0,00	0,00	0,00
3	«L03 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AKSES SANITASI (AIR LIMBAH DOMESTIK) LAYAK DI KABUPATEN/KOTA	0,00	0,00	0,00
4	«L04 JUMLAH PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	0,00	0,00	0,00
5	«L05 JUMLAH KELUARGA MISKIN DAN RENTAN YANG MEMPEROLEH BANTUAN TUNAI BERSYARAT	0,00	0,00	0,00
6	«L06 JUMLAH KELUARGA MISKIN DAN RENTAN YANG MEMPEROLEH BANTUAN SOSIAL PANGAN	0,00	0,00	0,00
7	«L07 JUMLAH KRS YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN	0,00	0,00	0,00
8	«L08 PERSENTASE REMATRI YANG MENDAPATKAN TTD	0,00	0,00	0,00
9	«L09 CARUPAN CALON PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG MEMPEROLEH PEMERIKSAAN KESEHATAN SEBAGAI BAGIAN DARI PELAYANAN NIKAH	0,00	0,00	0,00

REVIU KINERJA TAHUNAN

Dashboard - Bina Bangsa

aksibangdakemendagri.go.id/emonev3/dashboard

Dashboard

Dashboard	
Monitoring Kabupaten	
Analisis Situasi	
Pra Musrenbang	
Regulasi Provinsi	
Monitoring	
Reviu Kinerja Tahunan	- Reviu Kegiatan Tahun Berjalan - Reviu Kegiatan Tahun Rencana



Inovasi dan Praktek Baik Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 (pasal 18) Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai tim pengarah percepatan penurunan stunting, diantaranya bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Peran Kemendagri dalam percepatan penurunan *Stunting* tercantum pada Stranas yaitu: (a) Pilar 1 (Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa); (b) Pilar 3 (Peningkatan konvergensi intervensi gizi spesifik dan sensitif di Kementerian/Lembaga, Pemprov, pemda kabupaten/kota dan pemerintah desa); dan (c) Pilar 5 (Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi).

Beberapa capaian yang diperoleh dari berbagai Provinsi maupun Kabupaten/Kota, tidak terlepas dari dukungan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kegiatan yang bersifat kolaboratif, inisiatif, modifikatif maupun inovasi yang berhasil dilakukan dalam upaya melakukan percepatan penurunan stunting. Hal ini dapat dikatakan sebagai best practice dalam upaya percepatan penurunan stunting.

1. Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat



Pada Kabupaten Garut, hasil SSGI tahun 2022, bahwa bayi baru lahir stunting masih tinggi yaitu 18%. Karena itu berbagai upaya dilakukan untuk percepatan penurunan stunting dimana salah satunya difokuskan pada ibu hamil, berupa peningkatan kualitas kesehatan ibu selama hamil. Untuk itu

Kabupaten Garut memiliki kegiatan pendukung yaitu:

Gerakan Bersama Memastikan Semua Ibu Hamil Terlayani (MELANI)



Gerakan bersama ini secara umum mewujudkan *zero new stunting* di tingkat RW, Kelurahan serta Kecamatan. Secara khusus, Gerakan MELANI meliputi:

- 1) Meningkatkan cakupan K6, pemeriksaan ibu hamil 6 kali dalam masa kehamilan, 2 kali diperiksa oleh dokter dan 2 kali diperiksa USG.
- 2) Meningkatkan perhatian dan pemantauan tenaga kesehatan dan masyarakat pada ibu hamil resiko tinggi yang akan ditandai dengan bendera.
- 3) Meningkatkan cakupan ibu hamil yang mengikuti kelas ibu hamil.
- 4) Meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 5) Memberikan jaminan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu dengan JKN PBI APBN/APBD.
- 6) Memberikan penghargaan pada Kecamatan, Puskesmas, Desa/Kelurahan pada akhir program serta pihak-pihak lain yang berkomitmen dan berdedikasi.



2. Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil e-PPGBM, kasus stunting di Kabupaten Aceh Jaya mengalami penurunan dari bulan januari 9,21% sampai mei sejumlah 7,69%. Namun berdasarkan hasil SKI Aceh Jaya mengalami kenaikan data stunting dari 19,9% di tahun 2022 menjadi 34% di tahun 2023.

Upaya untuk mempercepat dan mengintegrasikan penanganan stunting TPPS kabupaten telah melakukan pertemuan untuk mengevaluasi kendala tahun 2024 serta membuat rencana untuk tahun 2025, TPPS kecamatan memantau pelaksanaan konvergensi di tingkat gampong memastikan sasaran mendapatkan layanan yang baik. Seluruh Camat memantau pelaksanaan kegiatan intervensi serentak di bulan juni sesuai dengan surat edaran Bupati tentang Pelaksanaan Gerakan Pengukuran dan intervensi Serentak, dan melakukan upaya penanganan dengan cepat terhadap balita yang mengalami permasalahan gizi.

Beberapa kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Aceh Jaya, antara lain:



- 1) **Inovasi Bangraja (Bangkit Generasi aceh Jaya)** Inovasi ini diinisiasi oleh Bappeda untuk memperkuat perencanaan dan Fokus pada pencegahan dan Penanganan *Stunting*
- 2) **Inovasi JUMALUR** (Jumat Makan Telur) di PAUD, Inovasi ini diinisiasi oleh Bunda PAUD Aceh Jaya kegiatan yang dilakukan di hari jumat dengan gerakan makan telur bersama di PAUD yang disediakan oleh guru PAUD kandungan protein yang tinggi diharapkan akan mencegah anak mengalami *Stunting*
- 3) **Inovasi MAKBUL** (Makan Buah Lokal), inovasi ini di pelopori oleh Dinas Pangan agar dapat dipraktikkan dalam keluarga;
- 4) **Inovasi Sigam Tampan** (sistem Ketahanan Pangan gampong), inovasi ini juga diinisiasi oleh dinas Pangan dengan tujuan untuk memperkuat ketahanan pangan local di *Gampong* agar anak terutama anak *Stunting* dan keluarga beresiko *Stunting* dapat diberi asupan yang baik dari bahan lokal

- 5) **Rumah Gizi Gampong** Melalui Layanan Kelas Gizi Terintegrasi di PAUD dan Gampong, kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Kesehatan bersama dengan puskesmas-puskesmas dalam Kabupaten Aceh Jaya; dan



Masyarakat Gampong Alue Ambang, Kecamatan Teunom sehingga menghasilkan sebuah Inovasi Gampong;

- 6) **Gemar Makan Ikan**, inovasi dari dinas kelautan dan perikanan yang memberikan asupan gizi dari jenis ikan

- 7) **Inovasi Posting (Pojoy Stunting)**, Inovasi Pencegahan dan Penanganan Kasus *Stunting* di Gampong Alue Ambang Kecamatan Teunom ini merupakan Hasil kreativitas



- 8) **Inovasi Cegah Stunting** dari Dandim/ Danramil Aceh Jaya dengan Teknik pemberian bantuan kepada anak -anak *Stunting* atau keluarga beresiko berupa makanan beras dan telur untuk asupan gizi yang berperan dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus *Stunting* di Kecamatan Setia Bakti.

- 9) **Inovasi Pangan Lokal Bergizi (Anak mal Nutrisi) Melalui Rumoh Gizi Gampong (RGG)** Inovasi ini di inisiasi oleh Dinas Kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan Asupan Gizi Anak yang Bersesiko Stunting dan Bermasalah Gizi, dari



sasaran anak stunting 624 Anak semua mendapatkan Pangan Lokal Bergizi juga disertai kelas edukasi untuk memberikan perubahan perilaku dan pengasuhan anak yang lebih baik dan juga Pedampingan/Kunjungan

Dokter Spesialis SPA ke Puskesmas untuk tindak lanjut anak Bermasalah Gizi

3. Kota Depok, Provinsi Jawa Barat

1) Geberhebring Juara Depok (Hayuk Berantas Stunting Mewujudkan Anak Sehat Jiwa Dan Raga) Kota Depok



Deklarasi Geberhebring komitmen pada upaya percepatan penurunan stunting dilakukan secara berjenjang di seluruh tingkat kecamatan dipimpin oleh seluruh Camat dan ketua TP.PKK dan ketua TP.PKK Kota Depok.

Gerakan ini mendorong berbagai

perangkat daerah dan lintas sektor melakukan program kegiatan secara konvergen, baik intervensi spesifik dan sensitif dalam upaya percepatan penurunan stunting di kota Depok.

2) Gerakan D'stunting Menara,



Komitmen terus dilakukan berkolaborasi dengan TP.PKK Kota Depok dengan deklarasi dilakukan secara berjenjang di seluruh tingkat Kota, kecamatan, Kelurahan dan Desa.

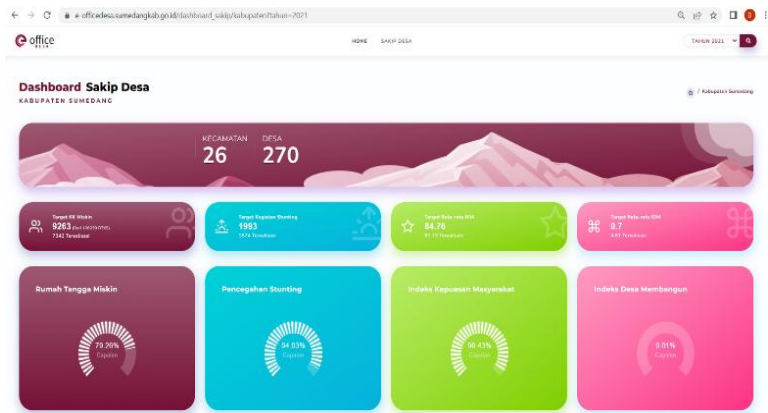
Bukti Keberlanjutan Inovasi Terbukti

Tertuang Pada Dokumen Perencanaan Dalam Perda 9 Tahun 2021 tentang RPJMD KOTA DEPOK TAHUN 2021-2026 Pada Misi Mewujudkan Kota Yang Sehat, Aman, Tertib Dan Nyaman salah satu Indikator Kinerja Kota Sehat adalah Penurunan Prevalensi Stunting.

4. Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

1) Sakip Desa

Tujuannya adalah untuk mengukur kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan upaya pembangunan dan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa yang dilakukan melalui sistem yang akuntabel, terintegrasi dan sistematis.



Tahapan Sakip Desa

- Perencanaan Pembangunan Desa
- Perjanjian Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pengelolaan Data Kinerja
- Pelaporan Kinerja
- Evaluasi dan Pembinaan Kinerja



Indikator Sakip Desa

- Jumlah Rumah Tangga Miskin
- Cakupan Layanan Konvergensi Stunting
- Indeks Kepuasan Masyarakat

Anggaran



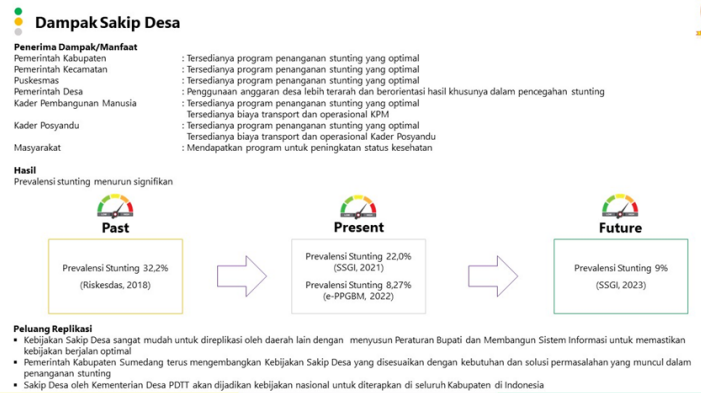
Dalam membidik setiap Indikator Sakip Desa, Kepala Desa harus menentukan kegiatan apa saja yang membidik indikator tersebut. Anggaran tersebut akan dijadikan bagian dari perjanjian kinerja Kepala Desa dengan Camat

Tahap Persiapan

Sakip Desa disosialisasikan kepada Pemerintah Desa melalui acara Roadshow Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) dan Sekretaris Daerah secara *door to door* mendatangi para Kepala Desa yang dikumpulkan di setiap Kecamatan

Tahap Pelaksanaan

- Kepala Desa diwajibkan melakukan perjanjian kinerja dengan Camat untuk meningkatkan pencegahan stunting yang terintegrasi dalam rangka menurunkan angka stunting dan mewujudkan zero new stunting



- Indikator Kinerja yang diperjanjikan adalah Cakupan Layanan Konvergensi Stunting
- Untuk memaksimalkan pelaksanaan sakip desa, Pemerintah Kabupaten Sumedang membangun Sistem e-Sakip Desa

Sakip Desa masuk Top 10 Inovasi Jawa Barat

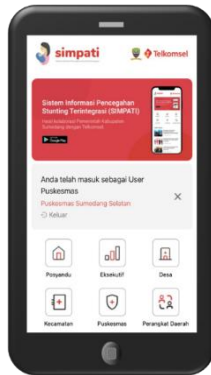
- Bupati Sumedang Sebagai Indonesia Visionary Leader Season VII (Kategori The Best Overall) Dari MNC PORTAL INDONESIA
- Sekretaris Daerah Sumedang mendapatkan Piala Adhigana Kategori Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Teladan dari Kemenpan RB



- Innovative Government Award (2020) Kategori "Sangat Inovatif" dari Kemendagri

- Innovative Government Award Programme of The Year dari MARKPLUS Inc.

2) Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Simpati)



Tujuannya yaitu menyediakan data balita dan cakupan intervensi percepatan penurunan stunting yang cepat, dinamis dan akurat. Sehingga, pemerintah di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dapat mengambil kebijakan yang tepat dan efektif dalam menangani wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi stunting cukup tinggi.

Melalui dashboard Simpati dapat diketahui secara real time data balita dan cakupan layanan intervensi percepatan penurunan stunting di setiap desa.

Data dalam aplikasi Simpati

- Data Balita
- Identitas Balita
- Riwayat Pemeriksaan/Pengukuran

Cakupan intervensi percepatan penurunan stunting

- Cakupan kesehatan ibu dan anak (KIA)
- Konseling gizi, kebersihan, pengasuhan orang tua
- Air minum dan sanitasi
- PAUD
- Perlindungan sosial
- Ketahanan pangan

Informasi dan Artikel terkait penanganan stunting

Pengguna aplikasi Simpati

- Orang Tua Balita
- Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM)
- Pemerintah Desa
- Puskesmas
- Kecamatan
- Dinas/Badan/Kantor
- Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati)



Dokumentasi Kunjungan
Menteri PANRB, Menteri Desa
PDTT, BKKBN melihat e-Simpati



5. Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan telah menunjukkan komitmen kuat dalam percepatan penurunan stunting melalui berbagai inovasi strategis yang melibatkan kolaborasi lintas sektor. Beberapa inovasi yang diimplementasikan antara lain Dashboard Pemantauan Stunting, yang memungkinkan pemantauan data secara real-time untuk intervensi yang lebih tepat sasaran, serta program Paket Sehat Ibu dan Anak (Pa'tekong) yang mengintegrasikan layanan kesehatan ibu hamil dan balita dengan dukungan dari pemerintah daerah dan komunitas. Selain itu, pendekatan berbasis kearifan lokal, seperti pendampingan keluarga melalui tokoh adat dan kader posyandu, turut memperkuat efektivitas program. Dengan langkah-langkah ini, Sulawesi Selatan terus berupaya menciptakan model intervensi yang inovatif dan berkelanjutan untuk mencapai target nasional dalam penurunan stunting.

Berikut ini beberapa inovasi yang di gagas oleh Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan:

NO	KABUPATEN	INOVASI
1	PANGKEP	- Mega Macca (Messo, Magala, Macca) berarti kenyang memastikan semua sasaran 1000 HPK terpenuhi asupan gizinya, - Perahu Sehat Pulau Bahagia (PSPB) jaringan pelayanan puskesmas secara mobile di wilayah kepulauan
2	BARRU	- Pede Makessing akronim dari Pemerintah desa dan masyarakat cegah stunting sari dinas PMDP2KBP3A - KIKIS STUNTING dari BAZNAS Kabupaten Barru sehingga penanganan percepatan penurunan stunting benar-benar berkelanjutan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa/kelurahan
3	ENREKANG	- Inovasi GEMPITA, Gerakan Masyarakat Peduli Stunting sampai saat ini digerakkan oleh pemerintah Kab. Enrekang. - Inovasi Ceting Abah, singkatan dari Celengan Stunting Bapak Bunda Asuh. Ceting Abah merupakan bentuk tabungan yang disiapkan di setiap kantor atau lembaga pemerintahan dan swasta di Kab. Enrekang. Hasil dari celengan tersebut nantinya akan digunakan untuk membeli

NO	KABUPATEN	INOVASI
		barang untuk pemenuhan gizi masyarakat seperti susu, beras, telur, vitamin, dll.
4	MAKASSAR	• LOPIS (Lorong pengendali stunting) dengan tujuan membimbing kader dalam peningkatan pengetahuan untuk pendampingan pada kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK R, PPKS serta UPPKS) serta untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi keliarga berisiko stunting
5	SINJAI	• Madeceng adalah singkatan dari "masyarakat Desa Cegah Stunting" Kegiatan ini melibatkan tokoh masyarakat, Tim Pendamping Gizi, Puskesmas dan Pemerintah setempat dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan intervensi pada kasus/ balita stunting dan Bumil Kek selama 90 hari berturut-turut
6	PALOPO	• Jumpa Bestie (Jumat Pahala berantas Stunting) dilakukan pemberian makanan tambahan berupa sembako, Menu Gizi Seimbang dan pemberian edukasi pada keluarga kasus stunting yg kurang mampu • Gardu canting berupa kursi biru (kursus ibu menyusui) 160 bayi kurang dari 6 bulan inovator PKM sendana
7	BANTAENG	• Bendera Saskia (Satu Bendera Satu Sasaran Kesehatan Ibu dan Anak), berada di Puskesmas Sinoa Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng yang bertujuan untuk memudahkan petugas kesehatan menemukan lokasi rumah sasaran saat berkunjung. Bendera Saskia merupakan singkatan dari Satu Bendera Satu Sasaran Kesehatan Ibu dan Anak. • Dekap Bayi, berada di Puskesmas Campagaloe Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng yang bertujuan sebagai sebuah upaya peningkatan pelayanan yang fokus pada sasaran imunisasi dasar lengkap pada bayi, dengan cara kunjungan ke seluruh rumah sasaran dan pembiayaan di support dengan dana Desa melalui pemberian PMT bagi anak bayi dan Ibu Hamil.
8	JENEPONTO	• Inovasi "Zero Stunting" di Kelurahan Empoang Utara, Desa Bulusi batang dan Desa Karelayu Kabupaten Jeneponto

NO	KABUPATEN	INOVASI
9	PINRANG	Inovasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pinrang yaitu INOVASI KOLASE PRO INSTING adalah kepanjangan dari Konvergensi Lintas Sektor dan Program Untuk Intervensi Stunting. . Kalau diartikan KONVERGENSI untuk pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Pinrang.
10	LUWU	Terbentuknya Inovasi Catingan Keren dalam bentuk aplikasi dengan tujuan memudahkan pelaporan penyuluh KB terkait penggunaan aksptor KB di masyarakat yang diprakarsai oleh OPD Pengendalian Penduduk dan KB (PPKB) dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Luwu.
11	TANA TORAJA	LESTI (Lelang Untuk Stunting), adalah kegiatan menghimpun dana dari keluarga, warga, tamu dan undangan yang hadir dalam acara. Dana yang terkumpul di gunakan untuk mendukung membantu pihak perempuan dalam memenuhi kebutuhan gizi yang optimal dalam rangka pencegahan stunting setelah melangsungkan pernikahan
12	TORAJA UTARA	Inovasi "KASIH IBU PENTING"(aKsi serIBU Peduli stunting) adalah salah satu inovasi yang dilakukan untuk mendapatkan dana dalam rangka percepatan penurunan stunting dalam kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting dalam hal ini pengolahan bahan makanan pangan lokal yang ditujukan kepada sasaran berisiko stunting khususnya Ibu Hamil dan baduta serta balita stunting, Inovasi ini digerakkan pada kegiatan masyarakat misalnya Rambu Solo'(Acara Kedukaan)dan Rambu Tuka'(Acara Syukuran) yang mana dilaksanakan di masing-masing lembang/kelurahan di setiap kecamatan

6. Sulawesi Tengah

1) Program Tangguh Bersinar

Program Tangguh Bersinar atau Program Terpadu Percepatan Penurunan *Stunting* dan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perangkat Daerah adalah program yang digagas oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024. Pelaksanaan program ini masih melanjutkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada semester I. Program ini merupakan upaya

terpadu percepatan penurunan stunting dan penanggulangan kemiskinan yang melibatkan semua elemen baik dari pemerintah, swasta melalui dana



CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar dan luas, pelaku usaha maupun Masyarakat.

Kabupaten Sigi dipilih sebagai lokus utama karena memiliki prevalensi stunting tertinggi di Sulawesi Tengah pada tahun 2022. Program ini mencakup 118 desa dari total 176 desa di Kabupaten Sigi, dengan target menurunkan angka stunting menjadi 23 % pada tahun 2024. Pada semester II, dalam program ini masing-masing perangkat daerah yang

menjadi penanggung jawab pada desa binaan, Kembali menyalurkan bantuan dan melakukan intervensi, baik sensitif maupun spesifik, tahap 3 dan 4. Program ini berakhir pada bulan Desember 2024 dan akan dilakukan rapat evaluasi program yang direncanakan pada akhir bulan Januari tahun 2025.

2) Program Siap Gencar Aman Stunting (Siaran Stunting)



Program ini bertujuan

meningkatkan kesadaran dan kolaborasi berbagai pihak dalam upaya penurunan stunting. Pada semester II, kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Program Desa Siaran Stunting dilaksanakan secara bersinergi dengan sistem kolaborasi antar OPD yang termasuk dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi, yang bekerja sama secara konvergensi memberikan intervensi baik sensitive maupun

spesifik sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam penanganan percepatan penurunan Stunting di daerah lokus.



3) MOU Dengan Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Pencegahan Pernikahan Anak



Dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting di Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah provinsi terus berkomitmen untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga adat, dalam mengatasi faktor-faktor penyebab utama stunting. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah selaku Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi

Tengah dengan Badan Musyawarah Adat (BMA) Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga adat dalam pencegahan pernikahan anak, yang merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya stunting. Pernikahan anak tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup generasi mendatang. Oleh karena itu, kerja sama ini diharapkan dapat mendorong peran aktif masyarakat adat dalam mensosialisasikan pentingnya usia perkawinan yang ideal sesuai dengan regulasi nasional dan adat setempat.

MoU ini mencakup beberapa poin penting, di antaranya:

- Edukasi dan penyadaran kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan anak terhadap kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
- Penguatan peran tokoh adat dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pencegahan pernikahan anak dan penurunan stunting.
- Integrasi program-program adat dengan kebijakan pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

7. Kalimantan Timur

Pelaksanaan pencegahan stunting dan intervensi yang dilakukan telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang TPPS Provinsi Kalimantan Timur. TPPS Provinsi Kalimantan Timur sedang melakukan akselerasi dan sinergitas program dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting melalui kegiatan

konvergensi oleh Bidang-Bidang yang tergabung didalam TPPS yaitu Bidang Koordinasi dan Konvergensi, Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif, Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management, serta Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga.

Aplikasi Senada

Aplikasi Senada adalah Aplikasi Sentral Analitik Data yang dikembangkan oleh Dinas Komunikais dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini merupakan bentuk komitmen dari Diskominfo dalam menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan menyediakan platform dashboard dalam format MAP Thematic maupun data grafis dalam menghadapi era digitalisasi dan mengkolaborasikan dengan data-data yang dapat membantu Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Timur.

Aplikasi ini merupakan perwujudan dalam pelaksanaan interoperability data dimana adanya kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai data secara terintegrasi. Aplikasi Senada ini menjadi komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data Pemerintah Daerah.



8. Kota Gorontalo

Melalui Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Kota Gorontalo telah ditetapkan bahwa target prevalensi *stunting* di Kota Gorontalo sebesar 13% pada tahun 2024. Target ini akan disesuaikan seiring dengan capaian angka *stunting* Kota Gorontalo yang mencapai 23,6% pada tahun 2023 dan terbitnya Surat Kementerian



Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: B-0838/D.05/PP.06.02/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Pemutakhiran Target Prevalensi Stunting Nasional dan Provinsi Tahun 2025 dan 2045 yang secara nasional menargetkan angka prevalensi stunting sebesar 18,8% tahun 2025 dan 5% tahun 2045.

Inovasi Pemerintah Kota Gorontalo untuk menurunkan angka stunting antara lain:

1) Tanda Aman Calon Pengantin (TANCAP NIKAH),



yaitu program integrasi lintas sektoral antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Agama berupa pemberian layanan paripurna bagi Calon Pengantin (Catin) laki-laki dan

perempuan sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak melalui penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang bertujuan menuju generasi unggul.

2) Posyandu Remaja Solusi Meningkatkan Kesehatan Remaja (PORSMEKER),

yaitu kegiatan posyandu remaja yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat termasuk remaja dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberi kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi remaja untuk meningkatkan derajat kesehatan dan keterampilan hidup sehat remaja. Pelayanan kesehatan remaja di Posyandu mencakup upaya promotif dan preventif yang meliputi: KIE Kesehatan reproduksi remaja, pencegahan penyalahgunaan Napza, gizi, aktifitas fisik dan pencegahan Penyakit Tidak Menular.



3) Gerakan Bersama Kurangi Angka Bumil KEK, Gizi Buruk dan Stunting (Gema Kuah Bugis),



yaitu inovasi yang bertujuan untuk menurunkan jumlah Bumil KEK agar calon bayinya tidak akan bermasalah gizi seperti balita gizi kurang, gizi sangat kurang (buruk) dan stunting. Dengan inovasi ini Tenaga Gizi dan Tenaga Bidan berkolaborasi dengan sesama lintas program lain

seperti (Tenaga Dokter, Petugas Surveilancen, Pengelola Program Penyakit Tidak Menular (PTM), Tenaga Kesehatan Lingkungan dan Tenaga Farmasi) serta dari lintas sektor (Lurah, LPM, Karang Taruna, PKK dan Kader) dalam menangani masalah gizi masyarakat di wilayah Puskesmas Kota Barat. Terutama peran serta lintas sektor dalam penanganan BUMIL KEK, Balita Gizi Buruk dan *Stunting* berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal.

9. Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan

Bapak Asuh Anak Stunting

Pemerintah Provinsi menggalang sumberdaya dengan melibatkan pihak pemerintah maupun non-pemerintah melalui program "Bapak Asuh Anak Stunting" (BAAS). Program ini mengajak berbagai pihak untuk bergotong royong membantu anak-anak stunting mendapatkan pemenuhan gizi dan pendampingan yang optimal. BAAS bertujuan untuk (1) Meningkatkan asupan gizi anak stunting melalui pemberian makanan tambahan, bantuan pangan, dan edukasi gizi. (2) Memperkuat pendampingan keluarga dalam merawat dan mengasuh anak stunting dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. (3) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi anak stunting untuk memastikan mereka mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang memadai dan mendorong perubahan perilaku di masyarakat terkait pola asuh dan sanitasi yang sehat untuk mencegah stunting di masa depan.



Direktorat Jenderal
Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Alamat: Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20,
Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750